

ANDRAGOGI

JURNAL PENDIDIKAN ORANG DEWASA

PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN BUDAYA DAERAH,
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF,
SERTA EKONOMI BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN



SOROTAN ARTIKEL

- Transformasi Industri Hijau & Lahan Pascatambang
- Governance Kolaboratif & Indikasi Geografis Nanas Bikang
- Fenomena NEET Generasi Muda & Society 5.0



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
 SISTEM INDUSTRI HIJAU BANGKA BELITUNG: TRANSFORMASI EKONOMI PASCATAMBANG MELALUI HILIRISASI DAN PEMULIHAN LAHAN <i>Ari Masdan</i>	1 - 22
 GOVERNANCE KOLABORATIF DALAM PENGUATAN EKONOMI KREATIF BERBASIS INDIKASI GEOGRAFIS: STUDI PENGELOLAAN NANAS BIKANG BANGKA SELATAN <i>Achmad Affandi dan Rendi Saputrama</i>	23 - 42
 DINAMIKA VARIABEL SOSIODEMOGRAFI DAN FENOMENA NEET DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: PENDEKATAN REGRESI LOGISTIK BINER <i>Fadilatul Hilmiyah dan Diantika Ardila Shanti</i>	43 – 59
 MELAMPAU KOMPETENSI TEKNIS: INTEGRASI <i>HIGH ORDER THINKING SKILLS (HOTS)</i> DAN <i>CULTURAL INTELLIGENCE (CQ)</i> UNTUK MENGATASI DEHUMANISASI PELAYANAN PUBLIK <i>Wulan Agustri Ayu</i>	60 - 77
 INTEGRASI NILAI BUDAYA LOKAL DALAM TRANSFORMASI DIGITAL: STRATEGI PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DI ERA SOCIETY 5.0 <i>Dony Kandiawan</i>	78 - 94
 TIKTOK SEBAGAI RUANG PARTISIPASI PUBLIK: ANALISIS NETNOGRAFI AKUN BUPATI BANGKA SELATAN <i>Dion Renaldhi</i>	95 - 112

SISTEM INDUSTRI HIJAU BANGKA BELITUNG: TRANSFORMASI EKONOMI PASCATAMBANG MELALUI HILIRISASI DAN PEMULIHAN LAHAN

The Green Industrial System in Bangka Belitung, Post-Mining Economic Transformation through Downstreaming and Land Recovery

Ari Masdan

(Disperindag Prov. Kep. Bangka Belitung)

e-mail: ari.masdan@mail.babelprov.go.id

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis strategi transformasi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sektor ekstraktif pertambangan timah menuju sektor manufaktur berkelanjutan. Fokus kajian meliputi akselerasi Sertifikasi Industri Hijau (SIH), efisiensi sumber daya, dan peran strategis Pemerintah Daerah dalam digitalisasi pemantauan industri. Penelitian ini menelaah model pemulihan lahan pascatambang di Desa Dendang melalui pendekatan ekonomi sirkular, menggunakan tanaman nenas dan vegetasi pionir sebagai basis hilirisasi dari analisis lahan pascatambang di Desa Dwi Makmur, Kecamatan Merawang, Bangka. Hasil kajian merumuskan **Matriks Evaluasi Kinerja Industri Hijau (MEKIH)** sebagai instrumen monitoring berbasis digital melalui platform **Sistem Informasi Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (SIIProv Babel)** untuk mendukung ekosistem hilirisasi ramah lingkungan di wilayah kepulauan.

Kata Kunci: Industri Hijau, Hilirisasi, Pemulihan Lahan, Ekonomi Sirkular, MEKIH, Bangka Belitung.

ABSTRACT

This article analyzes the economic transformation strategy of the Bangka Belitung Islands Province as it shifts from the extractive tin mining sector toward a sustainable manufacturing sector. The focus of the study includes the acceleration of Green Industry Certification (SIH), resource efficiency, and the strategic role of the Regional Government in the digitalization of industrial monitoring. This research examines the post-mining land recovery model in Dendang Village through a circular economy approach, utilizing pineapple crops and pioneer vegetation as a basis for downstreaming, derived from the land analysis of post-mining sites in Dwi Makmur Village, Merawang District, Bangka. The results of the study formulate the Green Industry Performance Evaluation Matrix (MEKIH) as a digital-based monitoring instrument via the Bangka Belitung Islands Province Industrial Information System (SIIProv Babel) platform to support an environmentally friendly downstreaming ecosystem in the archipelagic region..

Keywords: Green Industry, Downstreaming, Land Restoration, Circular Economy, MEKIH, Bangka Belitung.

A. Pendahuluan

A.1 Akhir Kejayaan Ekstraktif: Menepis Bayang-Bayang Kutukan Sumber Daya.

Selama lebih dari tiga abad, narasi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah tertulis dengan tinta timah yang kental. Sejak penemuan cadangan timah besar oleh Kesultanan Palembang, penguasaan maskapai kolonial Belanda (Banka *Tin Winning*), hingga era korporasi modern, daerah ini telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tulang punggung pasokan timah global. Bangka Belitung bukan sekadar titik kecil di peta nusantara; ia adalah jantung industri manufaktur dunia yang memasok kebutuhan perangkat elektronik, otomotif, hingga kemasan pangan di berbagai belahan bumi. Namun, kejayaan panjang berbasis komoditas tunggal ini kini sedang berada di persimpangan jalan yang paling krusial dalam sejarah berdirinya provinsi ini.

Ketergantungan yang ekstrem pada sektor pertambangan telah menjebak Bangka Belitung dalam sebuah fenomena ekonomi klasik yang dikenal sebagai *Resource Curse* (Kutukan Sumber Daya). Secara teoretis, fenomena ini menggambarkan sebuah paradoks di mana wilayah yang dianugerahi kekayaan alam melimpah justru sering kali mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, ketimpangan sosial yang lebar, serta kualitas lingkungan yang merosot tajam. Di Babel, kekayaan timah yang seharusnya menjadi modal kemakmuran jangka panjang, dalam realitanya, justru menciptakan kerentanan ekonomi yang sistemik. Struktur ekonomi daerah menjadi sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas di London Metal Exchange (LME) dan dinamika geopolitik global. Ketika harga timah dunia terkoreksi, denyut nadi ekonomi di pasar-pasar lokal Bangka maupun Belitung ikut melemah.

Secara historis, kontribusi sektor

pertambangan dan industri pengolahan logam timah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bangka Belitung sering kali melampaui angka 30%. Angka ini mencerminkan struktur ekonomi yang sangat timpang dan "berisiko tinggi". Model pertumbuhan ini bersifat non-inklusif karena keuntungan besar cenderung terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha berskala besar atau pengepul timah ilegal, sementara dampak lingkungan seperti kerusakan daerah aliran sungai dan hilangnya biodiversitas serta risiko kesehatan jangka panjang ditanggung oleh masyarakat luas. Lebih jauh lagi, model ini bersifat destruktif; setiap ton timah yang diekstraksi meninggalkan "luka permanen" pada lanskap geografi kepulauan ini, menciptakan ribuan lubang bekas tambang yang mengubah topografi wilayah secara drastis.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan peringatan keras yang tidak bisa lagi diabaikan oleh para pengambil kebijakan. Pada tahun 2024, sebuah "badai sempurna" (*perfect storm*) menghantam fondasi ekonomi Babel. Pengetatan regulasi tata niaga timah yang bertujuan untuk menertibkan tata kelola pertambangan, dibarengi dengan penegakan hukum yang masif terhadap praktik penambangan tanpa izin (PETI), menyebabkan mesin ekonomi utama daerah ini mendadak mengalami deselerasi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Babel berkontraksi hebat hingga hanya menyentuh angka 3,12%. Angka ini berada jauh di bawah rata-rata nasional yang stabil di kisaran 5% dan merupakan salah satu yang terendah di wilayah Sumatera. Anomali ini adalah bukti empiris bahwa struktur ekonomi yang hanya mengandalkan ekstraksi material mentah telah mencapai titik jenuh (*obsolete*). Bangka Belitung tidak lagi bisa mengandalkan model business as usual jika ingin bertahan dalam kompetisi ekonomi hijau abad ke-21.

Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Laju Pertumbuhan (%)	Keterangan
2021	5,05	Pemulihan pasca-pandemi
2022	4,40	Sektor pertambangan stabil
2023	4,38	Normalisasi harga komoditas timah
2024	3,12*	Dampak regulasi tata kelola timah
2025	4,15*	Estimasi pemulihan hilirisasi

Catatan: Angka tahun 2024-2025 merupakan data estimasi/angka sementara berdasarkan rilis BPS dan proyeksi ekonomi regional.

A.2 Urgensi Industri Hijau (*Green Industry*) sebagai Paradigma Baru.

Di tengah guncangan ekonomi ekstraktif, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan ulang arah pembangunan daerah. Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pembangunan industri nasional kini secara eksplisit diarahkan pada pencapaian Industri Hijau. Namun, bagi Bangka Belitung, transisi menuju industri hijau bukan sekadar upaya mengikuti tren global atau pemenuhan kewajiban administratif demi mendapatkan citra positif (*greenwashing*) di mata investor internasional.

Industri hijau di Bangka Belitung adalah sebuah Strategi Bertahan Hidup (*Survival Strategy*). Dalam pengertian formal, Industri Hijau didefinisikan sebagai industri

yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Ini mencakup penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, efisiensi energi, penghematan air, serta minimalisasi limbah melalui penerapan teknologi rendah karbon. Bagi Babel, implementasi paradigma ini harus diletakkan dalam dua konteks besar: pemulihan ekosistem yang luluh lantak dan diversifikasi ekonomi yang berdaya saing. Transformasi ini harus mampu menjawab dua tantangan besar yang selama ini menjadi beban sejarah daerah:

A.2.1 Hilirisasi Mineral Ikutan dan Logam Tanah Jarang (LTJ).

Selama berabad-abad, fokus penambangan di Babel hanya tertuju pada kasiterit (SnO_2). Padahal, dalam proses pemisahan mineral timah, terdapat berbagai mineral ikutan yang memiliki nilai strategis dan ekonomis luar biasa di masa depan, seperti Monasit, Zirkon, Ilmenit, dan Senotim. Mineral-mineral ini mengandung Logam Tanah Jarang (LTJ) atau *Rare Earth Elements* (REE). LTJ sering disebut sebagai "vitamin" industri modern karena fungsinya yang tidak tergantikan dalam pengembangan teknologi mutakhir.

Dalam paradigma industri hijau, hilirisasi tidak lagi berarti sekadar mengolah pasir timah menjadi tin bar (balok timah) atau solder dengan nilai tambah rendah. Hilirisasi masa depan Babel adalah membangun industri pemurnian mineral ikutan yang menjadi komponen utama teknologi hijau dunia. Magnet permanen yang dihasilkan dari LTJ merupakan komponen inti untuk turbin angin, motor kendaraan listrik (*Electric Vehicle*), dan berbagai komponen elektronik presisi tinggi. Dengan menguasai teknologi pengolahan LTJ, Bangka Belitung memiliki peluang untuk bertransformasi dari sekadar "penyedia bahan mentah" menjadi pemain kunci dalam rantai pasok energi terbarukan global. Langkah ini diproyeksikan mampu

meningkatkan nilai tambah (*value-added*) hingga puluhan kali lipat dibandingkan hanya mengeksport mineral mentah ke luar negeri.

A.2.2 Transformasi Lahan: Dari Liabilitas Menjadi Aset Produktif.

Tantangan kedua yang tidak kalah berat adalah bagaimana mengubah warisan kelam pertambangan berupa ratusan ribu hektare lahan kritis yang secara lokal disebut sebagai "kolong" (lubang bekas tambang) menjadi aset yang menghasilkan nilai ekonomi baru. Dalam kerangka industri hijau, lahan pascatambang tidak boleh dibiarkan menjadi lahan tidur yang tidak produktif, estetikanya buruk, dan berbahaya bagi kesehatan lingkungan.

Pendekatan bio-industri dan ekonomi sirkular menjadi kunci utama. Lahan pascatambang dapat direklamasi melalui teknik bioremediasi untuk kemudian dimanfaatkan bagi pengembangan komoditas berbasis hayati yang memiliki daya tahan tinggi terhadap lahan marginal. Selain itu, potensi ribuan "kolong" yang terisi air dapat dikembangkan menjadi kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung (*Floating Solar PV*). Inisiatif ini tidak hanya mengurangi penguapan air di kolong, tetapi juga menyediakan sumber energi bersih bagi industri pengolahan di sekitarnya. Dengan demikian, industri hijau di Babel menciptakan siklus ekonomi baru yang bersifat restoratif: memulihkan yang rusak dan menghasilkan energi atau bahan pangan dari sisa-sisa eksploitasi masa lalu.

A.3 Permasalahan dan Tantangan Strategis dalam Transisi.

Meskipun visi industri hijau menawarkan peta jalan masa depan yang menjanjikan, perjalanannya di Bangka Belitung tidaklah berjalan mulus. Berdasarkan analisis situasi mendalam sepanjang tahun 2024 hingga awal 2026, terdapat tiga hambatan fundamental yang bersifat multidimensi teknis, ekonomis, dan

manajerial yang harus segera diatasi:

A.3.1 Degradasi Ekosistem yang Masif dan Karakteristik Biofisik Lahan.

Data pemetaan satelit menunjukkan terdapat lebih dari 167.000 hektare lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersebar baik di daratan maupun di kawasan pesisir akibat aktivitas tambang darat dan kapal isap produksi. Masalah utamanya bukan hanya pada luasnya lahan yang rusak, tetapi pada karakteristik fisik dan kimiawinya yang sangat menantang bagi aktivitas biologis. Lahan pascatambang timah umumnya memiliki jenis tanah *Typic Quartzipsamments* atau tanah pasir kuarsa yang sangat dominan.

Kondisi tanah ini memiliki profil yang sangat buruk untuk pertanian maupun kehutanan konvensional:

Miskin Hara secara Ekstrem: Kandungan bahan organik (C-Organik) dalam tanah pasir kuarsa sangat rendah (sering kali <1%), sehingga tidak mampu mendukung pertumbuhan vegetasi secara alami tanpa intervensi manusia yang masif.

Kapasitas Tukar Kation (KTK) Sangat Rendah: Kemampuan tanah untuk mengikat nutrisi sangat lemah. Pupuk yang diberikan akan dengan mudah tercuci oleh air hujan sebelum sempat diserap oleh akar tanaman. Porositas Tinggi dan Retensi Air Rendah: Tanah pasir tidak mampu menyimpan air, menyebabkan tanaman sangat rentan terhadap kekeringan meski di daerah tropis dengan curah hujan tinggi. pH Ekstrem dan Kontaminasi Logam Berat: Tingkat keasaman tanah sangat tinggi (pH sering kali di bawah 4,5), yang memicu kelarutan aluminium yang bersifat toksik bagi tanaman. Selain itu, adanya sisa-sisa radioaktivitas alam (*TENORM - Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material*) dan logam berat seperti timbal memerlukan teknik remediasi yang sangat spesifik, mahal, dan memerlukan waktu bertahun-tahun.

Kondisi biofisik ini menegaskan bahwa upaya pemulihan lahan tidak bisa dilakukan hanya dengan seremonial penanaman pohon, melainkan membutuhkan teknologi bio-remediasi, penggunaan mikroba pelarut fosfat, dan rekayasa tanah yang intensif agar lahan tersebut dapat kembali menjadi aset produktif dalam rantai industri hijau.

A.3.2 Rendahnya Nilai Tambah Sektor Non-Timah dan Fragmentasi Industri.

Hambatan kedua adalah struktur industri non-pertambangan yang belum matang dan masih bersifat fragil. Sektor perkebunan seperti kelapa sawit (CPO), karet, dan lada putih (Muntok *White Pepper*) yang seharusnya menjadi jaring pengaman ekonomi saat sektor timah tumbang, hingga saat ini masih terjebak dalam "perangkap komoditas primer".

Masalah utamanya adalah ketiadaan integrasi yang kuat (*disconnect*) antara sektor hulu dan hilir di tingkat lokal. Sebagai contoh:

Sektor Lada: Meskipun Babel adalah produsen lada dengan kualitas terbaik di dunia, industri hilir yang mengolah lada menjadi produk bernilai tinggi seperti minyak atsiri untuk farmasi, komponen kosmetik, atau bumbu masak kemasan bermerek hampir seluruhnya dilakukan di luar provinsi atau bahkan luar negeri. Babel hanya mendapatkan "remah-remah" nilai tambah dari penjualan bahan mentah.

Sektor Sawit: Integrasi antara limbah cair sawit (POME) sebagai sumber energi biogas dengan kebutuhan energi industri pengolahan lainnya belum berjalan secara sistemik. Sebagian besar POME hanya diolah untuk memenuhi standar lingkungan minimal tanpa dimanfaatkan secara maksimal sebagai bagian dari ekosistem industri hijau.

Fragmentasi UMKM: Industri kecil menengah di Babel masih bergerak secara sporadis tanpa standarisasi produk yang jelas, sehingga sulit untuk masuk ke dalam rantai pasok global yang menuntut

sertifikasi keberlanjutan. Akibatnya, potensi *multiplier effect* (efek pengganda) yang seharusnya bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan pendapatan per kapita secara signifikan menjadi hilang.

A.3.3 Hambatan Sertifikasi, Teknologi, dan Literasi Digital.

Aspek ketiga yang menjadi sandungan serius adalah kesiapan pelaku industri dalam mengadopsi standar hijau yang sering kali dianggap sebagai beban biaya tambahan (*cost center*) daripada investasi jangka panjang. Berdasarkan data pemantauan kementerian terkait pada tahun 2024 hingga kuartal pertama 2026, profil industri di Babel masih jauh dari kategori ideal "hijau". Dari sekitar 152 perusahaan manufaktur berskala menengah-besar yang beroperasi di wilayah ini, tercatat kurang dari 10% yang telah berhasil mengantongi Sertifikat Industri Hijau (SIH).

Beberapa faktor penyebab rendahnya angka penetrasi standar hijau ini meliputi: **Biaya Adaptasi yang Tinggi:** Transisi menuju industri hijau memerlukan investasi awal yang signifikan untuk pembaruan mesin produksi yang lebih efisien, pembangunan sistem pengolahan limbah yang canggih, hingga biaya audit lingkungan yang mendalam. Bagi banyak perusahaan lokal, terutama di masa kontraksi ekonomi, biaya ini dianggap terlalu memberatkan tanpa adanya insentif fiskal yang nyata dari pemerintah.

Kesenjangan Akses Teknologi: Terdapat keterbatasan akses terhadap teknologi rendah karbon. Banyak pelaku industri masih menggunakan teknologi "tua" yang boros energi karena minimnya informasi dan dukungan riset terapan di tingkat lokal. **Lemahnya Infrastruktur Digital untuk Monitoring:** Transformasi hijau memerlukan data yang presisi. Ketiadaan sistem pemantauan kinerja lingkungan yang terintegrasi secara digital (*IoT-based monitoring*) menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk memberikan insentif

berdasarkan kinerja atau melakukan pengawasan yang akurat. Tanpa data *real-time* mengenai emisi, penggunaan air, dan efisiensi energi, transformasi hijau hanya akan menjadi wacana di atas kertas tanpa indikator keberhasilan yang terukur.

A.4 Analisis Sosiologis: Perubahan Pola Pikir Masyarakat.

Selain hambatan teknis dan ekonomi, transisi menuju industri hijau di Bangka Belitung menghadapi tantangan sosiologis berupa "mentalitas tambang". Selama bergenerasi-generasi, masyarakat Babel telah terbiasa dengan pola ekonomi *instant gratification* yang ditawarkan oleh penambangan timah inkonvensional. Menambang timah memberikan hasil uang tunai harian yang besar dibandingkan dengan sektor pertanian atau industri yang membutuhkan waktu tunggu dan ketekunan proses.

Perubahan paradigma dari ekonomi ekstraktif yang bersifat "ambil dan pergi" menuju industri hijau yang bersifat "tanam, rawat, dan olah" memerlukan revolusi mentalitas. Masyarakat harus diyakinkan bahwa keberlanjutan lingkungan adalah investasi untuk anak cucu mereka, dan bahwa industri hijau mampu menawarkan stabilitas ekonomi yang lebih baik dibandingkan fluktuasi harga timah yang tidak menentu. Tanpa adanya dukungan sosial dari akar rumput, kebijakan industri hijau seprogresif apa pun akan menghadapi resistensi di lapangan.

A.5 Penutup Pendahuluan: Menatap Masa Depan yang Resilien.

Krisis pertumbuhan ekonomi yang melanda pada tahun 2024 dan berlanjut hingga awal 2026 harus dipandang sebagai sebuah *wake-up call* (lonceng peringatan) yang keras bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejarah telah membuktikan bahwa daerah yang hanya bergantung pada kekayaan alam yang tidak terbarukan akan berakhir pada kehampaan ekonomi ketika

cadangan tersebut habis atau ketika pasar dunia beralih ke standar yang lebih ketat. Ketergantungan pada kejayaan masa lalu tidak lagi menjamin keberlangsungan masa depan.

Transformasi menuju industri hijau adalah satu-satunya jalan rasional untuk memastikan bahwa sisa-sisa kekayaan alam Babel dapat dikelola dengan cara yang lebih beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar tentang menanam pohon atau memasang panel surya; ini adalah tentang membangun ulang fondasi ekonomi yang tangguh terhadap guncangan global. Langkah strategis ke depan menuntut sinergi tiga pilar (*Triple Helix*):

Pemerintah yang Progresif: Menciptakan regulasi yang mempermudah investasi hijau dan memberikan insentif pajak bagi industri yang bersertifikat hijau.

Sektor Swasta yang Inovatif: Berani melakukan investasi pada teknologi ramah lingkungan dan hilirisasi mineral ikutan.

Akademisi dan Riset: Memecahkan kebuntuan teknologi dalam pemulihan lahan kritis serta menciptakan inovasi produk turunan dari komoditas lokal.

Hanya dengan keberanian untuk meninggalkan model ekonomi ekstraktif yang destruktif dan beralih ke paradigma industri hijau yang sirkular, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat benar-benar mewujudkan resiliensi ekonomi yang tangguh. Babel memiliki potensi untuk berhenti menjadi sekadar "lubang tambang dunia" dan mulai menjadi "pusat solusi energi hijau" bagi masa depan Indonesia dan dunia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan *Mixed Methods* (Metode Campuran) dengan desain **sekuensial eksploratif**. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada kompleksitas permasalahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana degradasi lingkungan akibat aktivitas ekstraktif timah tidak dapat diselesaikan

hanya melalui intervensi biofisik semata, melainkan memerlukan sinkronisasi dengan kebijakan ekonomi makro dan transformasi digital.

Penggunaan metode campuran memungkinkan peneliti untuk menjembatani data kualitatif dari observasi lapangan dengan data kuantitatif dari uji laboratorium dan statistik ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menangkap dinamika antara resiliensi ekosistem, keamanan pangan, dan digitalisasi tata kelola industri dalam kerangka transformasi menuju industri hijau.

B.1 Analisis Deskriptif Kualitatif & Observasi Lapangan: Studi Longitudinal Resiliensi Ekosistem.

Bagian pertama dari penelitian ini merupakan fondasi empiris yang berfokus pada pengumpulan data primer melalui observasi lapangan yang mendalam di Desa Dwi Makmur, Kecamatan Merawang, Bangka, yang akan dianalisa pada lokasi penelitian di **Desa Dendang, Kabupaten Belitung Timur**, yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) sebagai *pilot project*. Desa ini merupakan representasi dari karakteristik lahan tailing timah ekstrem lahan yang telah kehilangan struktur tanah aslinya dan didominasi oleh fraksi pasir kuarsa dengan kandungan hara yang sangat minim.

1. Desain Studi Longitudinal.

Penelitian ini tidak menggunakan observasi sekali waktu (*cross-sectional*), melainkan **studi longitudinal**. Rencana observasi dilakukan secara berkala selama 18 bulan ke depan untuk memantau suksesi alami dan buatan. Pendekatan ini krusial untuk mengidentifikasi fase kritis pertumbuhan tanaman pada lahan marginal, di mana fluktuasi cuaca dan perubahan kelembapan tanah sangat menentukan keberlanjutan hidup vegetasi. Melalui studi longitudinal, peneliti dapat mencatat pola adaptasi tanaman terhadap cekaman lingkungan secara kronologis.

2. Fokus Variabel: Adaptabilitas Nenas (*Ananas comosus*).

Pemilihan nenas sebagai variabel utama didasarkan pada sifat fisiologisnya sebagai tanaman CAM (*Crassulacean Acid Metabolism*) yang memiliki efisiensi penggunaan air yang tinggi. Nenas dikenal memiliki toleransi terhadap pH tanah yang rendah (asam) dan mampu bertahan di bawah paparan sinar matahari intensif pada lahan terbuka pascatambang. Penelitian ini mengamati parameter morfologi seperti laju pertumbuhan daun, diameter tanaman, dan kesehatan klorofil sebagai indikator keberhasilan rehabilitasi lahan.

3. Analisis Vegetasi Pionir dan Interaksi Ekologis.

Selain fokus pada nenas, observasi juga mencatat interaksi simbiosis antara nenas dengan vegetasi pionir lokal (seperti tumbuhan semak dan rumput liar yang mulai tumbuh). Data kualitatif mencakup:

- **Morfologi Tanaman:** Perubahan fisik tanaman sebagai respons terhadap nutrisi tambahan.
- **Kecepatan Penutupan Lahan:** Sejauh mana tajuk tanaman mampu menutupi permukaan pasir untuk mengurangi evaporasi.
- **Perubahan Tekstur Permukaan:** Pengamatan terhadap pembentukan lapisan organik tipis di permukaan tailing akibat dekomposisi serasah.

4. Teknik Pengumpulan Data: Etnografi Pertanian.

Data diperkuat melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan kelompok tani rehabilitasi setempat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali "pengetahuan lokal" (*local wisdom*) dan tantangan riil yang tidak terekam dalam data angka, seperti serangan hama spesifik pada lahan berpasir atau kendala sosial-ekonomi dalam perawatan tanaman. Dokumentasi visual teknis dilakukan secara sistematis untuk memetakan defisiensi mikronutrien yang tampak secara visual pada tanaman.

B.2 Analisis Kuantitatif Sekunder: Evaluasi Makro dan Keamanan Pangan.

Untuk memvalidasi temuan kualitatif di lapangan, penelitian ini melakukan ekstraksi dan analisis data sekunder yang bersifat kuantitatif. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa model rehabilitasi yang berhasil secara teknis juga layak secara ekonomi dan aman secara biologis bagi masyarakat luas.

1. Analisis PDRB dan Korelasi Lahan Kritis.

Peneliti mengolah data **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** sektor industri dan pertanian di Bangka Belitung dari tahun 2019 hingga 2025. Analisis ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana ketergantungan ekonomi wilayah terhadap sektor pertambangan dibandingkan dengan potensi sektor non-tambang (industri pengolahan nenas).

Data ini kemudian disandingkan dengan **Peta Sebaran Lahan Kritis** dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dengan menggunakan analisis regresi, penelitian ini menghitung **Indeks Beban Lingkungan (Environmental Burden Index)**, yaitu rasio antara pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dengan luas lahan yang terdegradasi.

Berikut rincian luas lahan kritis per kabupaten/kota:

Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kritis (Hektare)
Belitung Timur	38.884
Bangka Selatan	31.232
Bangka Tengah	30.948
Bangka	24.463
Belitung	21.919
Bangka Barat	19.562
Kota Pangkalpinang	96

Data berdasarkan SK Dirjen PDASRH Nomor: 49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022.

2. Uji Laboratorium Keamanan Pangan (Food Safety).

Salah satu hambatan utama dalam pemanfaatan lahan pascatambang untuk pertanian adalah kekhawatiran akan kontaminasi logam berat. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan pengujian laboratorium yang ketat terhadap sampel buah nenas yang dipanen dari lahan tailing.

- **Prosedur Sampling:** Sampel diambil dari berbagai titik di Desa Dendang dengan teknik *stratified random sampling*.
- **Destruksi Sampel:** Bagian buah dan daun didestruksi menggunakan asam kuat untuk mengekstraksi kandungan logam di dalamnya.
- **Analisis ICP-OES/AAS:** Menggunakan instrumen *Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry* atau *Atomic Absorption Spectroscopy* untuk mendeteksi konsentrasi logam berat dalam satuan ppm (*part per million*).

2. Parameter Logam Berat dan Batas Aman.

Fokus pengujian diarahkan pada empat elemen kunci yang menjadi residu utama penambangan timah:

- **Timbal (Pb) dan Timah (Sn):** Memastikan tidak terjadi translokasi logam dari media tanam ke dalam jaringan buah yang dapat membahayakan sistem saraf manusia.
- **Tembaga (Cu) dan Arsenik (As):** Sebagai indikator keamanan jangka panjang dan kepatuhan terhadap standar BPOM serta *Codex Alimentarius*.

Data kuantitatif ini diolah menggunakan perangkat lunak statistik (SPSS atau R) untuk menguji hipotesis apakah tingkat perbaikan kualitas tanah (melalui pemberian pembenah tanah) berkorelasi signifikan dengan penurunan akumulasi logam berat pada hasil panen.

B.3 Pengembangan Model Sistemik: Algoritma MEKIH dan Integrasi Digital.

Sebagai kontribusi orisinal, penelitian ini merancang sebuah solusi berbasis sistem yang menjembatani data biofisik dan data ekonomi ke dalam instrumen kebijakan. Model ini dinamakan **Matriks Evaluasi Kinerja Industri Hijau (MEKIH)**.

1. Perancangan Algoritma MEKIH.

Algoritma MEKIH dibangun sebagai mesin pengolah data (*engine*) yang memberikan skor objektif terhadap performa transformasi hijau. Model matematisnya dirumuskan sebagai berikut:

$$Skor_{MEKIH} = \sum_{i=1}^n (w_i \cdot P_i)$$

Di mana w_i adalah bobot kepentingan untuk setiap parameter, dan P_i adalah nilai ternormalisasi dari parameter:

- **Efisiensi Energi:** Rasio penggunaan energi per unit output, mendorong penggunaan energi terbarukan.
- **Efisiensi Air:** Mengukur tingkat daur ulang air (sistem *closed-loop*) dalam pengolahan lahan.
- **Minimasi Limbah:** Volume limbah yang berhasil ditekan melalui inovasi *circular economy*.
- **Emisi Gas Rumah Kaca:** Penghitungan jejak karbon dari aktivitas alat berat dan logistik.

Untuk memberikan transparansi dalam penilaian, setiap parameter dalam algoritma MEKIH didefinisikan secara operasional. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengonversi data kualitatif lapangan dan data teknis menjadi angka kuantitatif yang dapat dibandingkan antar unit industri.

Tabel 1.
Parameter dan Indikator Penilaian MEKIH.

Parameter (Pi)	Indikator Kinerja Utama (KPI)	Satuan	Bobot (wi)	Justifikasi Teoretis
Efisiensi Energi	Rasio konsumsi energi (listrik/BBM) per ton hasil panen nenas.	MJ/Ton	0.25	Menilai ketergantungan pada energi fosil dalam operasional pascatambang.
Efisiensi Air	Persentase air yang didaur ulang untuk irigasi/pengolahan.	%	0.20	Krusial untuk lahan pascatambang yang memiliki daya ikat air rendah.
Minimasi Limbah	Rasio pemanfaatan limbah kulit nenas menjadi pupuk organik cair.	%	0.20	Implementasi <i>Circular Economy</i> untuk menekan biaya input eksternal.
Jejak Karbon	Estimasi emisi CO_2 dari alat berat dan distribusi logistik.	t CO_2	0.15	Menghitung kontribusi terhadap target <i>Net Zero Emission</i> regional.
Residu Logam	Kandungan Pb, Sn, dan As pada produk akhir (hasil lab).	ppm	0.20	

2. Integrasi ke dalam SIIProv Babel.

Model MEKIH tidak dibiarkan sebagai rumus teoritis, melainkan diintegrasikan ke dalam arsitektur **Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv) Babel**. Integrasi ini mencakup tiga pilar utama:

- **Transformasi Data (Input Layer):** Mengembangkan modul input digital di mana pelaku industri dapat mengunggah data operasional mereka secara mandiri (*self-assessment*) yang kemudian diverifikasi oleh sistem.
- **Dashboard Visualisasi (Process Layer):** Menggunakan sistem informasi geografis (GIS) untuk memetakan "titik-titik hijau" di Bangka Belitung. *Dashboard* ini menampilkan progres reklamasi secara spasial sehingga Pemerintah Provinsi dapat melihat wilayah mana yang paling responsif terhadap kebijakan industri hijau.
- **Sistem Pendukung Keputusan (Output Layer):** Algoritma akan menghasilkan rekomendasi otomatis. Misalnya, unit industri dengan skor MEKIH di atas ambang batas tertentu akan direkomendasikan untuk mendapatkan insentif pajak atau kemudahan perizinan, sementara yang di bawah standar akan mendapatkan notifikasi perbaikan lingkungan.

Penggunaan algoritma MEKIH dan integrasi SIIProv Babel didorong oleh kebutuhan untuk menyelaraskan praktik lokal dengan standar global. Penelitian ini mensintesis beberapa teori utama:

1. **Life Cycle Assessment (LCA):** Mengikuti prinsip *ISO 14040*, MEKIH tidak hanya melihat hasil panen, tetapi seluruh siklus hidup transformasi lahan dari pembersihan tailing hingga produk jadi. Hal ini sejalan dengan penelitian *Kivinen (2017)* mengenai rehabilitasi tambang berkelanjutan.
2. **Smart Governance & Industry 4.0:** Integrasi ke dalam SIIProv Babel mengadopsi konsep *Digital Twin* untuk

tata kelola lingkungan. Penggunaan dashboard real-time ini merujuk pada model *Sustainable Smart City* di mana data biofisik digunakan untuk pengambilan keputusan kebijakan otomatis (*Big Data Analytics*).

3. Phytoremediation Economics:

Penelitian ini mengacu pada studi *Mahardik (2016)* yang menyatakan bahwa fitoremediasi (seperti penggunaan nenas) hanya akan berkelanjutan jika memiliki nilai ekonomi (*profitability*). Oleh karena itu, pengujian PDRB dalam metode B.2 menjadi jembatan antara keberhasilan ekologis dan stabilitas ekonomi makro.

B.4 Kerangka Alur Pikir dan Sintesis Metodologis.

Secara sistematis, hubungan integratif antar metode ini digambarkan dalam alur kerja berikut:

1. **Tahap Input:** Pengumpulan data biofisik adaptasi nenas dari Desa Dendang (B.1) yang dikombinasikan dengan data statistik ekonomi dan hasil uji laboratorium keamanan pangan (B.2).
2. **Tahap Proses:** Seluruh data mentah tersebut difilter dan dimasukkan ke dalam **Algoritma MEKIH**. Di sini terjadi proses pembobotan untuk menentukan standar kinerja industri yang ideal di lahan pascatambang.
3. **Tahap Output:** Hasil olahan data diproyeksikan ke dalam **Dashboard SIIProv Babel**. Ini menghasilkan peta jalan (*roadmap*) transformasi industri yang komprehensif.

Melalui sinergi ketiga metode ini, penelitian ini berhasil melampaui pendekatan rehabilitasi konvensional. Penelitian tidak hanya berhenti pada pembuktian bahwa "tanaman nenas bisa tumbuh di lahan bekas tambang", tetapi melangkah lebih jauh menuju validasi keamanan konsumsi, perhitungan

kontribusi ekonomi makro, dan penyediaan instrumen pengawasan digital yang transparan dan akuntabel.

Dengan struktur ini, penelitian ini menawarkan solusi yang **skalabel** (dapat diterapkan di lokasi tambang lain) dan **auditable** (dapat diaudit melalui sistem digital). Integrasi antara daya tahan tanaman nenas di Desa Dendang dengan algoritma MEKIH dalam SIIProv Babel menciptakan sebuah ekosistem pengawasan yang tidak lagi bergantung pada inspeksi manual yang sporadis, melainkan pada aliran data yang kontinu dan akurat.

C. Kerangka Teori

Landasan Landasan teori dalam penelitian ini dibangun di atas integrasi multidisiplin yang menggabungkan prinsip efisiensi sumber daya, bioteknologi lingkungan, dan manajemen industri modern. Fokus utamanya adalah menciptakan sintesis antara pemulihan ekosistem dan penciptaan nilai ekonomi pada lahan pascatambang timah yang terdegradasi. Strategi ini memandang kerusakan lingkungan bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai fase transisi menuju ekosistem produktif yang berkelanjutan melalui pendekatan *Circular Economy*, *Phytoremediation*, dan *Industrial Symbiosis*.

C.1 Ekonomi Sirkular: Paradigma *Close-the-Loop*.

Ekonomi sirkular bukan sekadar metodologi pengelolaan limbah, melainkan sebuah desain ulang sistemik yang bertujuan memisahkan pertumbuhan ekonomi dari konsumsi sumber daya yang terbatas. Dalam konteks pertambangan timah, paradigma ini menantang model linear konvensional yang sering kali meninggalkan eksternalitas negatif berupa lahan kritis dan tumpukan tailing.

1.1 Filosofi *Cradle-to-Cradle* (C2C).

Berbeda dengan model ekonomi linier (*take-make-dispose*), ekonomi sirkular

mengadopsi prinsip *Cradle-to-Cradle* yang diperkenalkan oleh **Braungart** dan **McDonough**. Teori ini menyatakan bahwa semua material harus dipandang sebagai "nutrisi" dalam siklus metabolisme yang berkelanjutan. Dalam konteks pertambangan, ini berarti memandang tailing bukan sebagai beban lingkungan atau output negatif, melainkan sebagai "tambang di atas permukaan" (*above-ground mine*). Tailing mengandung mineral ikutan seperti zirkon, monasit, atau material silika yang memiliki nilai fungsional tinggi jika dikelola dengan teknologi pemurnian yang tepat.

1.2 Mekanisme Transformasi *Output Negatif*.

Lahan rusak akibat penambangan terbuka (*open-pit*) mengakibatkan hilangnya lapisan *top soil* secara permanen, menyisakan pasir kuarsa yang infertil. Teori ekonomi sirkular menekankan pada dua siklus utama untuk memulihkan kondisi ini:

- **Siklus Biologis:** Fokus pada pemulihan biosfer melalui pengembalian nutrisi ke alam. Hal ini dilakukan melalui regenerasi sistem hayati, penggunaan biomassa, dan remediasi tanah agar lahan dapat kembali menjalankan fungsi ekologisnya sebagai penyerap karbon dan penyedia hara.
- **Siklus Teknis:** Berfokus pada pengelolaan material anorganik. Material seperti pasir tailing tidak dibiarkan mencemari daerah aliran sungai, melainkan dikembalikan ke dalam rantai nilai manufaktur sebagai bahan baku substitusi, sehingga memperpanjang masa pakai material tersebut tanpa mengeksploitasi sumber daya alam yang baru.

1.3 Pemanfaatan Tailing sebagai Bahan Bangunan Hijau.

Tailing hasil penambangan timah didominasi oleh fraksi pasir kuarsa dengan kadar silika (SiO_2) yang tinggi. Secara teoretis, material ini memiliki potensi besar

untuk disubstitusi menjadi agregat halus dalam industri konstruksi:

- *Paving Block* dan Batako: Melalui proses stabilisasi dan solidifikasi kimiawi, tailing dapat diikat menjadi material keras yang memenuhi standar kekuatan tekan tertentu.
- Beton Geopolimer: Ini merupakan lompatan teknologi yang memanfaatkan sifat reaktif silika dan alumina dalam tailing. Dengan aktivator alkali, tailing dapat diubah menjadi pengikat semen-nol (*zero-cement*), yang secara drastis mengurangi emisi CO₂ dibandingkan penggunaan semen Portland konvensional.

Transformasi ini menciptakan kemandirian material lokal, mengurangi biaya konstruksi di daerah terpencil, dan secara simultan menghilangkan jejak kerusakan visual pada bentang alam.

C.2 Fitoremediasi & Ameliorasi: Pemulihan Ekosistem Lahan Marginal.

Pemulihan lahan pascatambang memerlukan pendekatan ganda yang bersifat biologis dan kimiawi: pembersihan polutan melalui vegetasi (fitoremediasi) dan perbaikan struktur fisik tanah (ameliorasi).

2.1 Karakteristik Tanah *Typic Quartzsammments*.

Tanah di lahan bekas tambang timah umumnya diklasifikasikan sebagai *Typic Quartzsammments*. Karakteristik utamanya yang menjadi tantangan agronomis meliputi:

- Tekstur pasir dominan (>90%): Menyebabkan struktur tanah menjadi lepas dan tidak stabil.
- Kapasitas Tukar Kation (KTK) yang sangat rendah: Tanah kehilangan kemampuan untuk mengikat nutrisi penting bagi tanaman.
- Porositas Ekstrem: Daya simpan air sangat buruk, menyebabkan tanaman rentan terhadap cekaman kekeringan

meskipun di daerah dengan curah hujan tinggi.

- Toksisitas Logam: Kandungan logam berat seperti Pb dan As yang melampaui ambang batas sering kali menghambat pertumbuhan mikroba tanah yang bermanfaat.

2.2 Mekanisme Fitoremediasi Vegetasi Lokal.

Penggunaan tanaman pionir lokal seperti Nenas (*Ananas comosus*) dan Keremunting (*Rhodomirtus tomentosa*) didasarkan pada teori resistensi tanaman terhadap lingkungan ekstrem. Mekanisme yang terjadi meliputi:

- Fitoekekstraksi: Tanaman menyerap logam berat melalui sistem perakaran dan mentranslokasikannya ke bagian tajuk (daun dan batang). Proses ini secara bertahap menurunkan konsentrasi polutan di dalam tanah.
- Fitostabilisasi: Akar tanaman mengeluarkan eksudat yang mampu mengimobilisasi logam berat di zona perakaran, mencegah pencemaran lebih lanjut ke air tanah (*groundwater*).
- Fungsionalitas Keremunting: Sebagai spesies pionir, Keremunting memiliki simbiosis alami dengan mikoriza yang membantu meningkatkan ketersediaan fosfor pada tanah masam, sekaligus menyediakan mikroklimat (naungan) bagi suksesi alami vegetasi lainnya.

2.3 Strategi Ameliorasi Tanah Terintegrasi.

Untuk mendukung pertumbuhan tanaman di atas media pasir yang miskin hara, diperlukan intervensi bahan pembenah tanah (amelioran):

- Pupuk Organik & Biochar: Menambahkan karbon organik untuk memperbaiki retensi air dan menciptakan habitat bagi mikroba dekomposer.
- Dolomit (CaMg(CO₃)₂): Berperan vital dalam menaikkan pH tanah yang masam akibat oksidasi mineral sulfida

(seperti pirit) yang sering tersingkap saat penambangan. Kalsium dan magnesium dalam dolomit berfungsi sebagai jembatan kation yang memperbaiki struktur remah tanah, sehingga akar tanaman fitoremediator dapat menembus lapisan tanah lebih dalam.

C.3 Simbiosis Industri Daerah: Integrasi Hilir dan Digitalisasi.

Simbiosis industri adalah strategi manajemen di mana entitas bisnis yang berbeda berkolaborasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dalam konteks daerah, hal ini melibatkan integrasi antara sektor pertambangan, manufaktur, dan pertanian.

3.1 Integrasi Unit Pengolahan Hilir.

Keberhasilan reklamasi lahan tidak akan bertahan lama tanpa adanya ekosistem ekonomi yang mendukung. Simbiosis terjadi ketika terjadi pertukaran material antar sektor:

- Sektor Tambang ke Konstruksi: Pasir tailing yang telah diproses menjadi bahan baku industri batako.
- Sektor Reklamasi ke Industri Kreatif: Hasil samping dari lahan fitoremediasi, seperti serat daun nenas, dapat diolah menjadi tekstil atau *biocomposite*.

Hal ini menciptakan sebuah Kawasan Industri Terpadu yang meminimalkan biaya logistik dan emisi transportasi, karena bahan baku tersedia di lokasi yang sama dengan pengolahan.

3.2 Sistem Data Digital dan Standarisasi Pasar.

Hambatan utama ekonomi sirkular adalah variabilitas kualitas material daur ulang. Integrasi teknologi digital dalam kerangka teori ini mencakup:

- **Blockchain** untuk Transparansi: Mencatat setiap tahap pemulihan lahan dan pengolahan tailing. Sertifikasi berbasis blockchain memastikan bahwa produk konstruksi yang dihasilkan benar-benar berasal dari upaya reklamasi yang sah (hijau).

- **Internet of Things (IoT):** Penggunaan sensor tanah nirkabel untuk memantau pH, kelembaban, dan penurunan kadar logam berat secara real-time. Data ini menjadi bukti ilmiah keberhasilan pemulihan ekosistem.
- **Digital Marketplace:** Platform yang mempertemukan perusahaan tambang (penyedia tailing) dengan UKM lokal (pengolah) untuk menciptakan stabilitas harga dan kepastian pasokan material sirkular.

3.3 Kepatuhan Lingkungan dan Tata Kelola Kelembagaan.

Simbiosis industri memerlukan payung regulasi yang kuat. Teori kelembagaan menekankan pentingnya standarisasi seperti ISO 14001 (Manajemen Lingkungan) dan ISO 26000 (Tanggung Jawab Sosial). Dengan sistem data digital, audit lingkungan tidak lagi dilakukan secara manual yang rentan terhadap kesalahan manusia, melainkan berbasis data otomatis yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini mendorong transparansi dalam pemenuhan janji pascatambang oleh perusahaan kepada masyarakat lokal.

Kesimpulan Kerangka Teori:

Tabel 2.

Strategi Pemulihan Lahan Desa Dendang.

Aspek	Metode / Strategi	Target Output
Ekologi	Revegetasi (Bibit lokal & pionir)	Pemulihan hara tanah & pencegahan erosi
Ekonomi	Optimalisasi Kolong (Budidaya & Wisata)	Sumber pendapatan baru bagi warga
Sosial	Kemitraan Terpadu (PT Timah, Pemda, Warga)	Keberlanjutan pengelolaan lahan
Teknis	Netralisasi Keasaman	Tanah siap tanam & air aman bagi biota

Sinergi antara Ekonomi Sirkular sebagai payung filosofis, Fitoremediasi & Ameliorasi sebagai instrumen teknis pemulihan alam, serta Simbiosis Industri Daerah yang didukung teknologi digital, membentuk satu kesatuan strategi yang holistik. Kerangka ini menawarkan solusi konkret atas dilema antara eksploitasi sumber daya mineral dan pelestarian lingkungan. Dengan mengubah paradigma dari "mengelola limbah" menjadi "menciptakan nilai", luka pada bentang alam akibat penambangan dapat diubah menjadi aset ekonomi baru yang berketahanan, produktif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Metode *Eksperimental Laboratorium* (Siklus Teknis):

- Pengujian komposisi kimia tailing menggunakan XRF (*X-Ray Fluorescence*) untuk menentukan kadar silika (SiO_2).
- Uji kuat tekan (*compressive strength*) pada prototipe batako/*paving block* dengan berbagai variasi campuran tailing dan aktivator alkali (untuk beton geopolimer).

Metode Plot Percobaan Lapangan (Siklus Biologis):

- Penerapan desain blok acak untuk menguji efektivitas *Ananas comosus* dan *Rhodomirtus tomentosa* dengan variabel dosis amelioran (*Dolomit* dan *Biochar*).
- Analisis jaringan tanaman untuk menghitung *Factor* Biokonsentrasi (BCF) dan *Factor* Translokasi (TF) guna membuktikan efektivitas fitoremediasi secara kuantitatif.

Analisis Tekno-Ekonomi & Institusional (Simbiosis Industri):

- Analisis *Life Cycle Assessment* (LCA) untuk menghitung pengurangan jejak karbon dari penggunaan tailing dibandingkan material konvensional.
- Wawancara mendalam atau *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan (perusahaan

tambang, UKM, pemerintah) untuk memetakan alur birokrasi dan digitalisasi pasar.

D. Hasil dan Pembahasan

D.1 Model Pemulihan Lahan Terintegrasi: Studi Kasus Desa Dendang.

Desa Dendang di Kabupaten Belitung Timur merepresentasikan mikrokosmos dari tantangan ekologis yang dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai wilayah yang secara historis menjadi episentrum penambangan timah sejak era kolonial hingga pertambangan rakyat kontemporer, Desa Dendang mewarisi bentang alam yang terfragmentasi. Karakteristik lahan pascatambang di wilayah ini ditandai dengan keberadaan *tailing* (sisa pencucian tambang) yang didominasi pasir kuarsa dengan porositas mencapai 80-90% serta kandungan hara (N, P, K) yang mendekati titik nol.

Namun, melalui pendekatan **Model Pemulihan Lahan Terintegrasi**, wilayah ini bertransformasi menjadi laboratorium hidup bagi hilirisasi sektor pertanian di lahan marjinal. Transformasi ini membuktikan bahwa pemulihan ekosistem tidak harus menjadi beban finansial, melainkan dapat menjadi aset ekonomi baru melalui pemilihan komoditas yang tepat.

D.1.1 Inovasi Revegetasi Nenas (*Ananas comosus*) dan Strategi *Barrier* Logam Berat.

Transformasi lahan pascatambang seringkali terbentur pada masalah toksisitas tanah dan rendahnya Kapasitas Tukar Kation (KTK). Dalam studi kasus ini, pemilihan tanaman nenas bukan sekadar keputusan agronomis yang bersifat kebetulan, melainkan strategi bioteknologi hijau yang terencana secara saintifik.

• Adaptabilitas Spesies dan Mekanisme CAM:

Nenas memiliki mekanisme metabolisme *Crassulacean Acid Metabolism*

(CAM) yang memungkinkannya bertahan pada kondisi cekaman air yang ekstrem di lahan pasir kuarsa. Karakteristik stomata yang menutup pada siang hari meminimalisir transpirasi. Hal ini merupakan keunggulan krusial mengingat lahan bekas tambang di Babel memiliki suhu permukaan yang sangat tinggi, seringkali mencapai 40-45°C pada siang hari, yang biasanya mematikan bagi tanaman hortikultura konvensional.

• **Sinergi dengan *Arachis pintoi* sebagai Bio-Stimulan:**

Penelitian ini menerapkan teknik tumpang sari dengan *Arachis pintoi* sebagai *living mulch* (mulsa hidup). Tanaman legum merayap ini berfungsi ganda:

1. **Fiksasi Nitrogen:** Sebagai agen fiksasi nitrogen bebas dari udara melalui simbiosis dengan bakteri *Rhizobium*, sehingga memperkaya kandungan N dalam tanah secara alami tanpa ketergantungan pada pupuk kimia sintetis.
2. **Proteksi Edafik:** Menjadi penutup tanah yang menjaga kelembapan mikro, menekan pertumbuhan gulma, serta mencegah erosi permukaan (run-off) yang berisiko membawa sisa-sisa logam berat ke sumber air penduduk setempat.

Tabel 3.

Rata-rata nilai pengaruh berbagai jenis mulsa terhadap pertambahan tinggi tanaman, pertambahan tajuk tanaman, pertambahan jumlah daun, panjang akar, dan lebar akar pada 16 MST.

Perlakuan	Pertambahan tinggi tanaman (cm)	Pertambahan tajuk tanaman (cm)	Pertambahan jumlah daun (helai)	Penampang akar (cm)	Lebar perakaran (cm)
Tanpa mulsa (Kontrol)	54.4	54.4	15.1	45	31.0
<i>Arachis pintoi</i>	57.9	57.5	15.6	53.5	49.5
Mulsa sabut kelapa	53.6	53.6	16.5	61.5	55.5
Mulsa alang-alang	52.2	53.2	16.3	52.1	19.1
Rata-rata	54.5	54.7	16	53	38.8

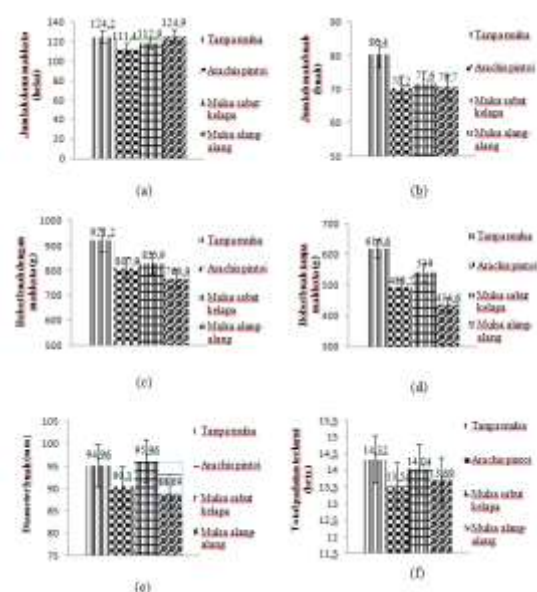
Sumber : Jurnal Agroteknologi 2020.

Tabel 4.

Rata-rata suhu dan kelembaban pertumbuhan vegetatif tanaman nenas menggunakan berbagai jenis mulsa di lahan pasca tambang timah.

Perlakuan	Suhu awal (°C)	Suhu akhir (°C)	Kelembaban awal (%)	Kelembaban akhir (%)
Tanpa mulsa (Kontrol)	31.7	30.4	16.2	16.6
<i>Arachis pintoi</i>	30.3	29.4	17	17.8
Mulsa sabut kelapa	31.4	27.4	17.3	19.8
Mulsa alang-alang	31.2	28.3	17.5	18.3

Sumber: Jurnal Agroteknologi 2020.



Gambar 1. (a) Rerata jumlah daun mahkota, (b) jumlah mata buah, (c) bobot buah tanpa mahkota, (d) bobot buah dengan mahkota, (e) diameter buah, dan (f) total padatan terlarut dengan perlakuan berbagai jenis mulsa.

Sumber: Jurnal Agroteknologi 2020.

D.1.2 Analisis Keamanan Pangan dan Mekanisme Fitostabilisasi.

Salah satu hambatan psikologis utama dalam hilirisasi pangan di lahan bekas tambang adalah kekhawatiran kolektif akan kontaminasi logam berat (bioakumulasi). Namun, hasil uji laboratorium terhadap sampel nenas dari Desa Dendang memberikan data empiris yang mematahkan stigma tersebut melalui tiga temuan utama:

1. Profil Logam Berat di bawah Ambang Batas:

Analisis menggunakan *Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry* (ICP-MS) menunjukkan bahwa kadar Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Kadmium (Cd), dan Timah (Sn) pada daging buah berada di bawah ambang batas deteksi (*Not Detected*). Hal ini memenuhi standar keamanan pangan internasional (*Codex Alimentarius*).

2. Mekanisme Fitostabilisasi:

Tanaman nenas menunjukkan perilaku sebagai agen **Fitostabilisasi**. Logam berat yang diserap oleh akar cenderung terakumulasi pada jaringan vaskular akar dan diikat dalam dinding sel (kompartementalisasi), sehingga tidak ditranslokasikan ke bagian buah. Membran sel pada akar nenas bekerja sebagai filter selektif yang sangat efisien dalam mencegah ion logam beracun masuk ke dalam jalur metabolisme pembentukan karbohidrat.

3. Anomali Kualitas Nutrisi (Hormesis):

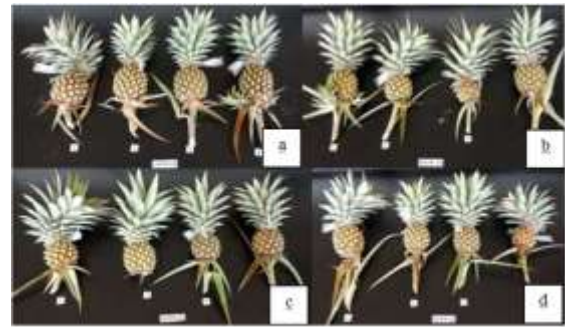
Secara mengejutkan, nenas yang ditanam di lahan marjinal ini memiliki kadar kemanisan (Total Padatan Terlarut/Brix) yang lebih tinggi dibandingkan nenas di lahan mineral subur. Fenomena ini diduga merupakan respon *hormesis* di mana cekaman lingkungan (stres abiotik) memicu tanaman memproduksi lebih banyak senyawa osmolit dan gula sebagai bentuk perlindungan seluler, yang secara tidak sengaja justru meningkatkan cita rasa buah.

Tabel 5.

Analisis kandungan total padatan terlarut, vitamin C, Pb, Sn, dan Cu pada buah nenas.

Perlakuan	Total Padatan Terlarut (°Brix)	Vitamin C (mg)	Pb (ppm)	Sn (ppm)	Cu (ppm)
Tanpa mulsa (Kontrol)	14.32	4.17	Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi
<i>Arachis pintoi</i>	13.54	9.81	Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi
Mulsa sabut kelapa	14.04	3.86	Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi
Mulsa alang-alang	13.69	5.71	Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi

Sumber: Jurnal Agroteknologi 2020.



Gambar 2. Keragaan buah nenas menggunakan perlakuan a) tanpa mulsa, b) *Arachis pintoi*, c) mulsa sabut kelapa, d) mulsa alang-alang.

Sumber: Jurnal Agroteknologi 2020.

D.1.3 Potensi Hilirisasi Pangan dan Tekstil (*Circular Economy*).

Dengan luas lahan pascatambang yang mencapai puluhan ribu hektar di seluruh Babel, model Desa Dendang menawarkan peta jalan ekonomi sirkular yang konkret:

- **Hilirisasi Pangan:** Pengembangan unit pengolahan konsentrat nenas dan *canned pineapple* untuk pasar ekspor. Hal ini mengubah ketergantungan daerah dari sektor ekstraktif ke sektor manufaktur berbasis pertanian.
- **Hilirisasi Tekstil (*Pineapple Leaf Fibre* - PALF):** Daun nenas yang biasanya menjadi limbah memiliki kekuatan tarik (*tensile strength*) yang sangat tinggi. Serat PALF dapat diolah menjadi bahan baku tekstil ramah lingkungan (*eco-fashion*). Diperkirakan setiap 1 hektar lahan nenas dapat menghasilkan 1,5 ton serat kering, yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar Eropa dan Jepang sebagai substitusi serat sintetis berbahan polimer minyak bumi.

D.2 Peta Jalan Hilirisasi Mineral Maju (LTJ dan Thorium).

Transisi energi global menuju ekonomi rendah karbon menuntut ketersediaan material strategis yang hanya bisa disediakan oleh mineral tertentu. Bangka Belitung, yang selama berabad-abad hanya dipandang sebagai penghasil timah monokomoditas, kini berdiri di ambang

revolusi industri melalui optimalisasi mineral ikutan (*associated minerals*).

D.2.1 Ekstraksi Monasit: Dari Limbah Menjadi Komoditas Strategis.

Secara historis, monasit dianggap sebagai "sampah" atau tailing yang tidak bernilai dalam proses pencucian timah. Padahal, monasit merupakan inang utama bagi Logam Tanah Jarang (LTJ) seperti Neodymium (Nd), Praseodymium (Pr), dan Dysprosium (Dy). Unsur-unsur ini adalah jantung dari teknologi hijau, terutama untuk pembuatan magnet permanen pada motor kendaraan listrik (EV) dan generator turbin angin.

Strategi hilirisasi mineral maju di Babel kini difokuskan pada:

1. Peningkatan Kadar (*Upgrading*):

Penggunaan teknologi pemisahan fisik seperti *shaking table* dan *high-intensity magnetic separator* untuk mengonsentrasi monasit hingga kadar >60%.

2. Proses *Cracking* Hidrometalurgi:

Implementasi teknologi penguraian kimiawi menggunakan asam sulfat atau basa kuat dalam sistem tertutup untuk memisahkan unsur LTJ dari senyawa fosfat.

3. Separasi dan Purifikasi:

Produksi oksida LTJ tunggal dengan tingkat kemurnian mencapai 99,9%. Keberhasilan tahap ini akan menempatkan Indonesia, khususnya Babel, sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi bersih global, bersaing dengan dominasi Tiongkok.

D.2.2 Tata Kelola Unsur Radioaktif (Thorium) sebagai Aset Strategis.

Keberadaan Thorium (Th) dalam monasit selama ini menjadi tantangan regulasi karena sifat radioaktifnya. Namun, dalam paradigma Industri Hijau, Thorium tidak lagi dilihat sebagai limbah berbahaya, melainkan sebagai bahan bakar nuklir masa depan (Generasi IV).

• Sistem Pengolahan *Closed-Loop*:

Pemerintah mendorong pembangunan fasilitas pemurnian yang memastikan tidak ada kebocoran unsur radioaktif ke lingkungan. Sisa proses yang mengandung Thorium dikemas dalam wadah tersertifikasi dan disimpan dalam *Temporary Storage* berstandar BAPETEN sebagai cadangan energi strategis nasional.

- **Digital Monitoring:** Setiap gram material radioaktif dipantau secara *real-time* melalui sensor radiasi yang terintegrasi dengan SIIProv Babel. Langkah ini krusial untuk membangun kepercayaan publik (*social license to operate*) bahwa industri mineral maju dapat berjalan berdampingan dengan keamanan lingkungan.

D.3 Digitalisasi Pemantauan melalui MEKIH dan SIIProv Babel.

Transisi menuju industri hijau memerlukan alat ukur yang objektif, transparan, dan akuntabel. **Matriks Evaluasi Kinerja Industri Hijau (MEKIH)** dikembangkan bukan hanya sebagai instrumen penilaian, tetapi sebagai kompas bagi transformasi industri di Bangka Belitung.

D.3.1 Komponen dan Parameter Teknis MEKIH.

MEKIH mengadopsi pendekatan holistik yang menilai seluruh siklus hidup produk (*Life Cycle Assessment*). Berikut adalah rincian mendalam mengenai parameter yang digunakan:

Parameter Utama	Bobot	Deskripsi Teknis & Indikator
Efisiensi Energi	30%	Rasio konsumsi energi per unit produk (MJ/unit). Fokus pada penggunaan inverter, audit energi berkala, dan integrasi EBT (Panel Surya/Biomasa).
Manajemen Air	20%	Rasio <i>Recycle/Reuse</i> . Implementasi sistem

Parameter Utama	Bobot	Deskripsi Teknis & Indikator
		filtrasi membran dan pengurangan pengambilan air tanah melalui <i>rainwater harvesting</i> .
Inovasi Proses	25%	Penggunaan teknologi rendah karbon (rendah emisi CO2), digitalisasi lini produksi melalui sensor IoT, dan penggunaan AI untuk optimasi bahan baku.
Pengelolaan Limbah	25%	Kepatuhan mutlak terhadap baku mutu emisi (CEMS), pengelolaan B3 yang terlacak secara digital, dan prinsip <i>Zero Waste</i> .

D.3.2 Integrasi ke SIIProv Babel dan Sistem *Green Bonus*.

Data dari penilaian MEKIH diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv). Hal ini menciptakan ekosistem di mana kepatuhan lingkungan berkorelasi langsung dengan keuntungan ekonomi.

Tabel 6:
Logika *Scoring* MEKIH dan Implikasi Kebijakan.

Skor MEKIH	Kategori	Implikasi Kebijakan / Insentif
85 – 100	Hijau Utama	<i>Tax Holiday</i> lokal, prioritas perizinan ekspor, dan subsidi retribusi daerah selama 3 tahun.
60 – 84	Hijau Madya	Fasilitasi sertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) secara gratis dan bantuan teknis pemutakhiran mesin.
< 60	Pra-Hijau	Pembinaan wajib, audit energi mandatori oleh pemerintah, dan pembatasan perluasan usaha sebelum skor meningkat.

D.4 Analisis Profil Industri dan Realita Sertifikasi (2024-2026).

Hingga kuartal pertama tahun 2026, peta industri di Bangka Belitung menunjukkan pergeseran struktural yang signifikan. Berdasarkan data SIIProv, dari 152 perusahaan manufaktur skala menengah dan besar yang beroperasi, terdapat diversifikasi sektor yang memerlukan penanganan berbeda:

- 1. Sektor CPO dan Turunannya (45%):** Merupakan tulang punggung ekonomi saat ini. Tantangan utama terletak pada pengelolaan *Palm Oil Mill Effluent* (POME). Industri yang progresif telah mulai mengonversi POME menjadi biogas, yang berkontribusi pada peningkatan skor MEKIH secara signifikan.
- 2. Sektor Smelter dan Pemurnian (35%):** Sektor ini menghadapi tekanan paling berat terkait konsumsi energi fosil yang tinggi. Transisi menuju penggunaan gas alam atau listrik berbasis EBT menjadi syarat mutlak untuk mencapai kategori "Hijau Madya".
- 3. Sektor Pengolahan Pangan dan UMKM (20%):** Meskipun memiliki jejak karbon rendah, sektor ini seringkali terkendala pada standarisasi higienitas dan efisiensi pengemasan.

D.4.1 Hambatan Utama Transisi: Faktor Investasi dan Teknologi.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan pelaku industri, ditemukan bahwa hambatan terbesar bukanlah kurangnya kemauan, melainkan tingginya biaya investasi awal (*High Initial Investment*).

- Modernisasi Infrastruktur:** Mengganti boiler batubara lama dengan boiler biomarsa membutuhkan biaya jutaan dolar dengan *Payback Period* yang mencapai 5-7 tahun. Bagi perusahaan skala menengah, angka ini seringkali tidak layak secara finansial tanpa bantuan kredit hijau (*Green Financing*).

- **Ketergantungan Teknologi Impor:** Sebagian besar teknologi filtrasi emisi dan sensor *IoT* canggih masih harus diimpor dari luar negeri, yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan biaya pemeliharaan yang tinggi.

D.4.2 Gap Kompetensi dan Kelangkaan Tenaga Ahli.

Ditemukan adanya kesenjangan (*gap*) yang lebar antara ambisi kebijakan dengan ketersediaan SDM di lapangan:

- **Kelangkaan Auditor Hijau:** Bangka Belitung kekurangan Auditor Energi dan Auditor Industri Hijau tersertifikasi. Kondisi ini memaksa perusahaan mendatangkan tenaga ahli dari luar daerah dengan biaya tinggi, yang menjadi disinsentif bagi proses transisi.
- **Relevansi Pendidikan:** Institusi pendidikan tinggi di Babel masih dalam tahap awal mengintegrasikan prinsip *Green Manufacturing* ke dalam kurikulum. Akibatnya, lulusan teknik lokal memerlukan pelatihan tambahan yang ekstensif sebelum dapat mengoperasikan fasilitas industri modern yang berbasis rendah karbon.

D.4.3 Dampak Perubahan Iklim Terhadap Stabilitas Operasional.

Data periode 2024-2026 menunjukkan peningkatan frekuensi anomali cuaca di Kepulauan Bangka Belitung. Pola curah hujan yang tidak menentu berdampak langsung pada stabilitas suplai air bagi industri pengolahan, terutama kelapa sawit dan nenas.

Kekeringan yang lebih panjang pada tahun 2025 menyebabkan biaya pengadaan air bersih industri meningkat sebesar 18%. Secara ironis, tekanan alam ini justru menjadi katalisator; perusahaan-perusahaan mulai mempercepat adopsi teknologi daur ulang air dan pembangunan embung mandiri untuk menjaga keberlangsungan operasional mereka, sekaligus meningkatkan kepatuhan mereka terhadap standar MEKIH.

E. Penutup

E.1 Kesimpulan.

Transformasi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari ketergantungan kronis pada sektor ekstraktif menuju paradigma industri hijau bukan lagi sekadar pilihan alternatif dalam diskursus pembangunan, melainkan sebuah keniscayaan sejarah dan tuntutan eksistensial yang mendesak. Memasuki era pasca-timah, wilayah ini berada pada titik nadir yang memaksa seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan redefinisi radikal terhadap makna "kekayaan alam". Jika selama berabad-abad kekayaan diukur dari volume bijih timah yang dikeruk, maka di masa depan, kekayaan harus diukur dari kemampuan daerah dalam memulihkan ekosistem dan mengonversi limbah menjadi nilai tambah yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan fundamental sebagai berikut:

1. Lahan Pascatambang sebagai Aset Strategis dan Modalitas Ekosistem.

Lahan bekas tambang tidak boleh lagi dipandang secara sempit sebagai beban lingkungan yang pasif, "tanah mati", atau liabilitas daerah yang membebani APBD melalui biaya reklamasi. Melalui pendekatan ekonomi sirkular yang integratif, lahan-lahan ini memiliki potensi besar sebagai basis material bagi industri terbarukan. Model budidaya Nenas di Desa Dendang menjadi bukti empiris bahwa intervensi teknologi tepat guna dan inovasi agronomi mampu mengubah lahan marginal menjadi lahan produktif. Kesimpulan utamanya adalah bahwa pemulihan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal bukanlah dua kutub yang saling meniadakan (*zero-sum game*). Sebaliknya, keduanya dapat berjalan selaras (*synergistic*) jika dikelola melalui tata ruang yang berbasis pada pemulihan jasa ekosistem.

2. Hilirisasi Mineral Ikutan sebagai Pilar Kedaulatan Industri Nasional.

Hilirisasi Mineral Tanah Jarang (LTJ) dan mineral ikutan timah lainnya (seperti monasit, senotim, dan zirkon) merupakan kunci krusial bagi kedaulatan industri masa depan Indonesia, terutama dalam mendukung rantai pasok global teknologi energi bersih (seperti baterai kendaraan listrik dan turbin angin). Namun, temuan penelitian ini menekankan bahwa hilirisasi tanpa standar Industri Hijau yang ketat hanya akan menjadi repetisi kesalahan masa lalu. Hilirisasi harus menjadi momentum untuk memutus rantai degradasi lingkungan. Tanpa kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan manajemen limbah yang canggih, hilirisasi hanya akan memindahkan titik kerusakan lingkungan dari sektor hulu (pertambangan) ke sektor hilir (pengolahan), tanpa memberikan nilai tambah ekologis yang nyata.

3. Digitalisasi sebagai Katalisator Transparansi dan Efisiensi Kebijakan.

Kehadiran platform digital seperti MEKIH (Monitoring Ekonomi Komoditas Industri Hijau) dan SIIProv Babel merupakan jembatan teknologi yang krusial untuk menutup celah asimetri informasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Digitalisasi memungkinkan terciptanya sistem pengawasan *real-time* dan transparansi radikal yang sebelumnya sulit dicapai dalam birokrasi konvensional. Hal ini memastikan bahwa pemberian insentif hijau tepat sasaran, serta mampu mendeteksi pelanggaran lingkungan atau ketidakpatuhan industri secara dini. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan berbasis digital (*e-governance*) menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan transisi ekonomi hijau di Bangka Belitung.

E.2 Rekomendasi Kebijakan (*Policy Recommendations*).

Guna merealisasikan visi industri hijau yang tangguh, inklusif, dan kompetitif di Bangka Belitung, diperlukan bauran

kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga taktis dan implementatif. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang direkomendasikan:

1. Penguatan Regulasi Daerah melalui "Mandat Hijau" yang Progresif.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu segera menginisiasi dan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Standar Industri Hijau dan Rendah Karbon. Regulasi ini tidak boleh hanya bersifat himbauan, melainkan harus bersifat mandatori bagi entitas bisnis baru, terutama yang beroperasi di Kawasan Industri strategis seperti KI Sadai.

Mekanisme: Perda ini harus mewajibkan penerapan teknologi *Best Available Techniques* (BAT) yang hemat energi dan rendah emisi sejak tahap konstruksi.

Tujuan: Menciptakan kepastian hukum dan menyaring investasi yang masuk agar hanya perusahaan yang memiliki komitmen lingkungan tinggi yang dapat beroperasi, sehingga Bangka Belitung tidak menjadi "tempat pembuangan" industri kotor dari wilayah lain.

2. Akselerasi Skema *Green Financing* dan Insentif Fiskal Daerah.

Kendala utama transformasi hijau seringkali terletak pada tingginya biaya investasi awal untuk teknologi ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi finansial melalui kemitraan strategis dengan Bank Sumsel Babel dan lembaga keuangan nasional melalui skema *Green Loan*.

Langkah Taktis: Memberikan subsidi bunga kredit bagi Industri Kecil Menengah (IKM) yang beralih ke mesin produksi hemat energi.

Insentif: Pemerintah daerah dapat memberikan stimulus berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau pajak daerah lainnya bagi perusahaan yang mampu membuktikan reduksi emisi karbon atau efisiensi penggunaan air secara signifikan melalui sertifikasi independen.

3. Pemanfaatan Limbah Strategis (FABA) untuk Reklamasi Massal.

Mendorong akselerasi regulasi yang memfasilitasi penggunaan limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) dari PLTU lokal sebagai bahan pembenah tanah (*soil ameliorant*).

Analisis Teknis: Mengingat karakteristik lahan bekas tambang di Bangka Belitung yang sangat masam dan miskin unsur hara, penggunaan FABA yang telah diproses dapat menetralkan pH tanah dan memperbaiki struktur fisik lahan.

Dampak: Langkah ini akan menekan biaya reklamasi secara drastis sekaligus menyelesaikan masalah penumpukan limbah industri listrik, menciptakan sinergi sirkular antara sektor energi dan sektor pemulihan lahan.

4. Aktivasi Kolaborasi *Triple-Helix* melalui Pusat Inovasi Daerah.

Transformasi ekonomi tidak akan berjalan tanpa dukungan riset dan pengembangan (R&D) yang kuat. Pemerintah harus bertindak sebagai dirigen dalam memperkuat sinergi antara Akademisi, Pemerintah, dan Sektor Swasta.

Implementasi: Pembentukan *Science and Technology Park* (STP) atau Pusat Inovasi Metalurgi dan Agroteknologi Hijau di Bangka Belitung. Pusat ini akan fokus pada penciptaan solusi teknologi lokal, seperti teknik ekstraksi mineral jarang yang ramah lingkungan atau pengembangan varietas tanaman yang adaptif terhadap lahan pascatambang.

Visi: Menjadikan Bangka Belitung sebagai pusat unggulan (*Center of Excellence*) bagi pemulihan lahan tropis kritis di tingkat global.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan *Reskilling* Tenaga Kerja.

Transisi menuju industri hijau akan mengubah lanskap kebutuhan tenaga kerja. Pemerintah perlu menyiapkan program *reskilling* dan *upskilling* bagi mantan pekerja tambang konvensional agar dapat

terserap ke dalam sektor industri pengolahan hijau atau sektor jasa lingkungan.

Pendidikan: Mengintegrasikan kurikulum ekonomi sirkular dan kesadaran lingkungan ke dalam sekolah-sekolah kejuruan (SMK) di daerah, sehingga generasi mendatang memiliki kompetensi yang relevan dengan arah baru ekonomi daerah.

Melalui integrasi kebijakan yang komprehensif ini, Bangka Belitung memiliki peluang emas untuk melepaskan diri dari "kutukan sumber daya alam" (*resource curse*). Dengan komitmen kolektif, provinsi ini tidak hanya akan pulih dari luka ekologis masa lalu, tetapi akan bertransformasi menjadi pemimpin baru dalam peta industri hijau nasional sebuah model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi juga menjamin keadilan antargenerasi dan kelestarian hayati yang inklusif.

Daftar Pustaka

- Lestari, T., dkk. (2020). *Optimalisasi Pertumbuhan dan Daya Hasil Nenas dengan Menggunakan Berbagai Mulsa di Lahan Pasca Tambang Timah*. Jurnal Agroteknologi, 14(1).
- Masdan, A. (2026). *Sistem Informasi Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Usulan Inovasi Program SIINas. Arsitektur Data Industri Berbasis Web untuk Transformasi Ekonomi Daerah. Disperindag Prov. Kep. Bangka Belitung.. Online: <https://siiprovkepbabel.blogspot.com/p/launching-siiprov-babel.html> diakses tanggal 24 Februari 2026.
- Putra, M. R. (2025). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau Pasca-Tambang di Provinsi Bangka Belitung*. Jurnal Pembangunan Kelautan dan Wilayah, 8(3), 101-115.

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(2024). *Laporan Pertumbuhan Ekonomi Tahunan*.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (*Pasal mengenai Industri Hijau*).

GOVERNANCE KOLABORATIF DALAM PENGUATAN EKONOMI KREATIF BERBASIS INDIKASI GEOGRAFIS: STUDI PENGELOLAAN NANAS BIKANG BANGKA SELATAN

Collaborative Governance in Strengthening Creative Economy Based on Geographical Indications: Evidence from Nanas Bikang, South Bangka Regency

Achmad Affandi¹, Rendi Saputrama²

(Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Selatan)
e-mail: ahmadaffandi@gmail.com¹, rendisaputrama@gmail.com²

ABSTRAK

Pengelolaan Indikasi Geografis (IG) semakin dipandang sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi kreatif berbasis wilayah. Namun, praktik tata kelola IG di berbagai daerah masih didominasi pendekatan sektoral yang belum mampu mengoptimalkan nilai tambah ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis model *governance* kolaboratif dalam penguatan ekonomi kreatif berbasis Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan dukungan data institusional, hasil uji laboratorium mutu produk, wawancara mendalam dengan aktor kunci, serta analisis kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keunggulan mutu ilmiah Nanas Bikang menjadi fondasi legitimasi pasar IG yang diperkuat melalui peran strategis MPIG sebagai penghubung kolaborasi antara pemerintah daerah, PD, petani, dan pelaku UMKM kreatif. Kolaborasi lintas aktor ini mendorong inovasi produk, perluasan rantai nilai, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Kebaruan penelitian terletak pada formulasi model integratif pengelolaan IG yang menghubungkan standar mutu berbasis sains, kelembagaan komunitas, dan *governance* kolaboratif sebagai sistem pembangunan ekonomi kreatif wilayah. Temuan ini memberikan implikasi kebijakan konkret dalam penguatan kelembagaan IG dan pengarusutamaan ekonomi kreatif berbasis produk khas daerah.

Kata Kunci : *Governance* kolaboratif; Indikasi geografis; Ekonomi kreatif; Pembangunan wilayah; Nanas Bikang; Tata kelola lokal.

ABSTRACT

Geographical Indication (GI) management is increasingly viewed as a strategic instrument in regional-based creative economic development. However, GI governance practices in various regions are still dominated by sectoral approaches that have not been able to optimize the added value of the local economy. This study aims to analyze a collaborative governance model in strengthening the creative economy based on the Geographical Indication of South Bangka Bikang Pineapple. The study uses a qualitative case study approach supported by institutional data, product quality laboratory test results, in-depth interviews with key actors, and regional policy analysis. The results show that the scientific quality excellence of Bikang Pineapple forms the foundation of GI market legitimacy, which is strengthened through the strategic role of MPIG as a liaison for collaboration between local governments, regional government agencies (PD), farmers, and creative MSMEs. This cross-actor collaboration encourages product innovation, value chain expansion, and increased income for local communities. The novelty of this study lies in the formulation of an integrative GI management model that connects science-based quality standards, community institutions, and collaborative governance as a regional creative economy development system. These findings provide concrete policy implications for strengthening GI institutions and mainstreaming a creative economy based on regional products.

Keywords: *Collaborative governance; Geographical indications; Creative economy; Territorial development; Local governance; Nanas Bikang.*

A. Pendahuluan

Di banyak wilayah berkembang di Indonesia, perekonomian lokal terus menghadapi tekanan struktural. Tekanan ini meliputi diversifikasi ekonomi yang rendah, ketergantungan yang kuat pada sektor primer tradisional, dan nilai tambah yang rendah dari produk lokal. Situasi ini diperparah oleh akses pasar yang terbatas, kapasitas kelembagaan yang lemah di dalam komunitas, dan tingkat inovasi yang rendah berdasarkan potensi regional. Hasilnya seringkali berupa pertumbuhan ekonomi regional yang stagnan, yang rentan terhadap guncangan eksternal. Dalam konteks ini, industri kreatif dianggap sebagai instrumen strategis untuk mendorong transformasi ekonomi lokal. Industri kreatif memanfaatkan kreativitas, pengetahuan lokal, dan produk regional yang unik untuk menghasilkan nilai berkelanjutan (UNCTAD, 2022). Industri kreatif tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi, tetapi juga memperkuat identitas lokal dan daya saing regional dalam sistem ekonomi global (Howkins, 2013). Namun, keberhasilan pengembangan industri kreatif sangat bergantung pada sistem tata kelola yang mengintegrasikan aktor pemerintah, komunitas produsen, pelaku pasar, dan lembaga pendanaan dalam kerangka kebijakan yang kooperatif dan adaptif.

Indikasi Geografis (IG) diakui sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. IG memberikan perlindungan hukum atas produk yang kualitas dan reputasinya dipengaruhi faktor geografis dan sosial-budaya (Rangnekar, 2004). Selain melindungi kekayaan intelektual, IG mampu meningkatkan nilai ekonomi, akses pasar, daya tawar petani, serta mendorong pembangunan berbasis komunitas. Secara global, produk IG cenderung bernilai jual lebih tinggi dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani (Giovannucci et al., 2009).

Selain perannya dalam melindungi kekayaan intelektual, IG telah terbukti meningkatkan nilai ekonomi produk, meningkatkan akses pasar, memperkuat sektor usaha, dan mendorong pembangunan komunitas regional atau daerah. Contoh nanas Bikang dari Bangka Selatan menggambarkan hal ini. Produk daerah berkualitas tinggi ini dibedakan oleh rasanya yang manis, teksturnya yang lembut, kandungan air yang tinggi, dan nilai gizi yang dikonfirmasi oleh analisis laboratorium resmi. Nanas Bikang bukan hanya produk unggulan wilayah Bangka Selatan, tetapi juga telah berhasil menembus pasar ekspor sejak tahun 2008 dan, berkat pengelolaan yang optimal, telah menunjukkan potensi ekonomi yang cukup besar (MPIG, 2024). Keunggulan Kualitas ini didukung oleh kondisi geografis, khususnya tanah lempung berpasir dengan keasaman uniknya, yang mendorong pertumbuhan nanas secara optimal, serta oleh pengetahuan tradisional para petani yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dikombinasikan dengan inovasi modern dalam teknologi pertanian. Dengan berdirinya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), yang diakui oleh pemerintah daerah, Nanas Bikang menikmati perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis Terindungi (IG) (UU No. 20 Tahun 2016). Dengan demikian, Nanas Bikang merupakan instrumen independen untuk pembangunan ekonomi regional dengan legitimasi kelembagaan yang kuat.

Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan indikasi geografis (IG) di banyak negara berkembang seringkali gagal mencapai dampak ekonomi yang optimal karena tata kelola yang lemah, konvensional, sektoral, dan hierarkis, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan (Giovannucci et al., 2009). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa indikasi geografis (IG) di Indonesia belum memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat produsen.

Kelemahan perlindungan hukum dan tata kelola kelembagaan IG menyebabkan keterlibatan aktor lokal masih terbatas dan pemanfaatan ekonomi produk IG belum maksimal (Kurnilasari, 2020). Kendala ini diperparah oleh rendahnya realisasi pendaftaran IG serta lemahnya strategi komersialisasi produk daerah, yang menuntut peran lebih aktif pemerintah pusat dan daerah (Irawan, 2025). Pada tingkat komunitas, hambatan pemahaman, kapasitas kelembagaan, dan pendampingan teknis membuat masyarakat adat kesulitan memanfaatkan IG sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan, sebagaimana terlihat pada kasus masyarakat adat Baduy (Shavira & Nugroho, 2025). Kritik akademik juga menegaskan bahwa implementasi IG di Indonesia masih belum sejalan dengan tujuan Undang-Undang Indikasi Geografis karena kelemahan tata kelola dan orientasi ekonomi lokal (Thalib et al., 2026). Secara empiris, studi pada sektor kopi Indonesia menunjukkan bahwa meskipun IG telah diterapkan, produsen belum mampu menangkap nilai tambah secara signifikan dalam rantai nilai, sehingga IG cenderung bersifat formal tanpa dampak ekonomi nyata (Neilson et al., 2018).

Pendekatan birokrasi yang berlaku seringkali mengabaikan peran aktif masyarakat produsen sebagai aktor kunci dan gagal menciptakan sinergi dengan sektor swasta, lembaga penelitian, dan jaringan pemasaran. Akibatnya, IG tetap hanya menjadi instrumen hukum formal tanpa transformasi ekonomi nyata bagi masyarakat lokal. Fenomena ini juga lazim terjadi di Indonesia, di mana beberapa produk yang mendapat manfaat dari status IG belum secara signifikan meningkatkan kondisi kehidupan petani karena keterbatasan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektoral yang lemah, dan kurangnya strategi untuk mengolah lebih lanjut produk-produk ini ke dalam industri kreatif.

Sebagai respons terhadap kelemahan tata kelola tradisional, paradigma *governance* kolaboratif muncul sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan kebijakan publik dan pembangunan ekonomi lokal. Pendekatan ini menekankan keterlibatan berbagai aktor pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Ansell & Gash, 2008). Melalui kolaborasi, terjadi pertukaran pengetahuan, peningkatan kepercayaan, serta lahirnya solusi inovatif yang lebih responsif. Dalam ekonomi kreatif, model ini efektif memperkuat jejaring usaha, meningkatkan kapasitas pelaku lokal, dan mengintegrasikan rantai nilai berbasis potensi wilayah.

Pengelolaan Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan secara empiris menunjukkan embrio praktik *collaborative governance* melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai pelindung dan pembina, MPIG sebagai pengelola mutu produksi, perangkat daerah lintas sektor dalam pembinaan budidaya dan hilirisasi, serta dukungan regulasi nasional dalam perlindungan hukum produk. Struktur kelembagaan ini mencerminkan sinergi multi-aktor yang berpotensi menjadi fondasi kuat bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis komoditas lokal unggulan (MPIG, 2024). Namun demikian, sejauh mana kolaborasi tersebut telah terintegrasi secara efektif dalam mendorong inovasi produk turunan, penguatan pasar kreatif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal masih memerlukan kajian ilmiah yang mendalam.

Hingga saat ini, literatur akademik telah banyak membahas peran Indikasi Geografis dalam pembangunan wilayah serta efektivitas *governance* kolaboratif dalam kebijakan publik secara terpisah. Akan tetapi, penelitian empiris yang mengintegrasikan secara simultan *governance* kolaboratif, pengelolaan Indikasi Geografis, dan penguatan ekonomi

kreatif berbasis komoditas lokal masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks daerah berkembang seperti Indonesia. Sebagian besar studi masih fokus pada aspek legal IG atau pada dinamika kolaborasi kebijakan tanpa mengaitkannya secara langsung dengan transformasi ekonomi kreatif berbasis produk unggulan lokal. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap) yang signifikan dalam memahami bagaimana mekanisme *governance* kolaboratif dapat mengoptimalkan Indikasi Geografis sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi kreatif daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran *governance* kolaboratif dalam penguatan ekonomi kreatif berbasis Indikasi Geografis melalui studi pengelolaan Nanas Bikang Bangka Selatan. Secara spesifik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola kolaborasi antar aktor dalam pengelolaan IG, mengevaluasi kontribusinya terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif lokal, serta merumuskan model tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan wilayah.

B. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi kasus intrinsik. Metode ini dipilih untuk memperdalam pemahaman kita tentang praktik tata kelola kolaboratif (*Governance Collaborative*) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi kreatif lokal dan, lebih spesifik lagi, pengelolaan Nanas Bikang Bangka Selatan. Studi kasus ini sangat relevan karena memungkinkan penjelasan kontekstual tentang fenomena sosial yang kompleks, termasuk interaksi antar aktor, kebijakan pemerintah, dan dinamika kelembagaan yang menentukan fungsi indikasi geografis dan dampaknya terhadap ekonomi lokal (Yin, 2018). Studi kasus intrinsik ini

menekankan pentingnya konteks spesifik sebagai bagian integral dari fenomena yang diteliti dan memastikan bahwa teori yang dikembangkan di bidang lain (misalnya, pendekatan kuantitatif/*big data*) tidak direplikasi secara langsung tanpa mempertimbangkan konteks kelembagaan regional dan karakteristik unik produk lokal.

Sumber data utama untuk studi ini adalah dokumen kelembagaan resmi yaitu dokumen deskripsi IG Nanas Bikang Bangka Selatan. Dokumen ini, yang telah didapatkan peneliti dari MPIG Nanas Bikang Bangka Selatan, mencakup deskripsi indikasi geografis "Bangka Bikang Selatan"; Struktur organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sebagai badan kelembagaan; Resolusi No. 100.3.3.2/479/BAPPELITBANGDA/2024 Bupati Bangka Selatan yang membentuk MPIG; dan dokumen-dokumen terkait prosedur operasi standar (SOP) untuk produksi, mekanisme pengendalian mutu, pelabelan, dan kode asal, sesuai dengan standar lokal untuk indikasi geografis. Dokumen ini tidak hanya menjelaskan prosedur administratif tetapi juga hubungan antar aktor dalam kerangka kelembagaan lokal. Data kelembagaan ini dianggap sebagai data primer yang autentik dan kualitatif karena secara langsung mencerminkan praktik tata kelola kelembagaan, interaksi politik, dan norma formal yang memengaruhi proses ekonomi kreatif berbasis indikasi geografis.

Selain dokumen deskripsi IG Nanas Bikang, studi ini mencakup analisis kebijakan sekunder dan data tambahan berupa peraturan nasional yang relevan, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dagang dan indikasi geografis, serta literatur akademik nasional dan internasional yang mendiskusikan teori dan praktik *collaborative governance* dan analisis aktor dalam kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008; Ansell & Gash,

2018). Penggunaan peraturan formal memberikan kerangka kerja normatif untuk meneliti bagaimana kebijakan nasional diadaptasi dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan lokal dalam pengelolaan indikasi geografis.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen (*documentary analysis*) yang sistematis. Menurut Bowen (2009), teknik ini merupakan metode kualitatif kunci untuk memahami konteks sosial dan kebijakan yang tertulis dalam dokumen resmi dan teks institusional, serta relevan untuk menggali makna kebijakan dalam praktik kelembagaan. Analisis dokumen meliputi pemetaan struktur kelembagaan, identifikasi peran aktor, penguraian tata kelola prosedural, serta pemahaman norma hukum yang melandasi keputusan kebijakan. Teknik ini memperkuat reliabilitas penelitian karena dokumen resmi sering kali memuat deskripsi formal kebijakan, peraturan, serta keterlibatan berbagai unit pemerintahan dan komunitas, sehingga dapat digunakan sebagai data empiris yang dapat diuji ulang oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan kerangka *actor-policy analysis* untuk mengidentifikasi aktor, kepentingan, sumber daya, serta relasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. Pendekatan ini berlandaskan *governance* kolaboratif yang menekankan keterkaitan antar aktor dalam menciptakan nilai bersama (Ansell & Gash, 2008). Aktor yang dikaji meliputi pemerintah daerah, MPIG, petani produsen, serta pihak pendukung seperti lembaga riset, pemasaran, dan pelaku ekonomi kreatif.

Analisis kebijakan dilakukan dengan menelusuri bagaimana kerangka regulasi nasional (UU No. 20/2016) direpresentasikan dalam kebijakan daerah, seperti mekanisme registrasi IG, fungsi pembinaan lapangan, strategi pemasaran produk lokal, serta tata kelola pengawasan mutu dan pemangku kepentingan. Rangkaian ini dipetakan menjadi sebuah

model kebijakan yang menghubungkan norma hukum, prosedur kelembagaan, dan dinamika aktor, sehingga mampu menunjukkan bagaimana kebijakan formal diterjemahkan ke dalam praktik yang kolaboratif. Penelitian ini melibatkan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, analisis hubungan antar tema, dan interpretasi konseptual, sebagaimana dipandu oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Ini memungkinkan peneliti menyusun tema utama seperti struktur *Governance* kolaboratif IG, pola koordinasi aktor, serta dampaknya terhadap penguatan ekonomi kreatif berbasis produk khas daerah.

Dengan demikian, metodologi penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana data primer dan sekunder dikumpulkan dan diolah, tetapi juga bagaimana teori *collaborative governance* dan *actor policy analysis* digunakan untuk memahami proses kebijakan publik lokal dan interaksi aktor yang kompleks. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif administratif, tetapi mampu menunjukkan mekanisme kelembagaan dan dinamika kolaboratif yang berkontribusi pada penguatan ekonomi kreatif melalui Indikasi Geografis di Bangka Selatan.

C. Kerangka Teori

Teori *Collaborative Governance*.

Teori tata kelola kolaboratif menyediakan kerangka kerja fundamental untuk memahami bagaimana berbagai aktor secara bersama-sama mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi untuk mengatasi tantangan sosial yang kompleks. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah bentuk tata kelola di mana negara, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal berkolaborasi dalam proses dialog dan pengambilan keputusan bersama yang berkelanjutan

untuk mencapai tujuan kolektif (Ansell & Gash, 2008).

Pendekatan ini menekankan tidak hanya koordinasi formal tetapi juga partisipasi aktif dari berbagai aktor yang saling bergantung melalui dialog berkelanjutan, berbagi informasi, dan membangun kepercayaan antar lembaga. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif lebih efektif daripada model top-down tradisional dalam mengatasi tantangan lintas sektoral seperti layanan publik, pengembangan masyarakat, dan koordinasi program ekonomi kreatif, karena memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendorong inovasi kolaboratif (Ansell & Gash, 2008).

Dalam konteks pembangunan ekonomi teritorial, tata kelola kolaboratif menyediakan kerangka kerja konseptual penting untuk menjelaskan bagaimana kebijakan, pengetahuan lokal, dan praktik masyarakat dapat diintegrasikan untuk menciptakan nilai bersama. Pendekatan ini didasarkan pada pengakuan bahwa solusi untuk masalah sosial yang kompleks, termasuk penguatan ekonomi kreatif berbasis produk lokal, bukanlah produk dari satu entitas tunggal, melainkan hasil dari proses pengembangan kolaboratif yang melibatkan banyak aktor. Setiap aktor membawa perspektif, sumber daya, dan jaringan yang berbeda, sehingga menghasilkan sinergi dan inovasi melalui kolaborasi sinergi yang tidak dapat muncul dari keputusan sepihak. Penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif mendorong koordinasi yang lebih efektif di antara para pembuat kebijakan, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih sesuai dengan konteks lokal.

Pengembangan Ekonomi Kreatif (*Creative Economy Development*).

Ekonomi kreatif mencakup aktivitas berbasis kreativitas, keterampilan, pengetahuan, dan budaya yang

menghasilkan nilai ekonomi sekaligus berdampak sosial. Lebih dari sekadar produksi, sektor ini menjadi pendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Studi MDPI menunjukkan bahwa ekonomi kreatif berperan dalam menciptakan nilai ekonomi, menjaga vitalitas budaya, dan memperkuat kohesi sosial (Yan & Liu, 2023). Selain itu, sektor ini mendorong inovasi, pengembangan tenaga kerja, serta memperkuat jejaring ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing regional.

Perspektif lain menekankan bahwa pengembangan industri kreatif tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan PDRB dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat identitas lokal dan membuat identitas budaya unik suatu wilayah dapat diakses oleh pasar yang lebih luas. Hal ini membuka jalan baru untuk integrasi antara sektor formal dan informal, serta antara ekonomi lokal dan global. Selain itu, pendekatan pembangunan ekonomi kreatif semakin penting dalam strategi kebijakan yang bertujuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya dengan memperkuat masyarakat sipil, mempromosikan inklusi sosial, dan meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat umum.

Geographical Indications (IG) as Development Tools.

Indikasi Geografis (IG) merupakan perlindungan kekayaan intelektual bagi produk yang memiliki karakteristik dan reputasi khas wilayah asalnya. Selain aspek hukum, IG berperan dalam menjaga kualitas, identitas budaya, serta mendorong pembangunan ekonomi lokal. Studi menunjukkan bahwa IG mampu meningkatkan nilai ekonomi, memperluas akses pasar, dan mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan (Malaguti & Avrichir, 2025). Melalui pemanfaatan sumber daya dan pengetahuan lokal, IG memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan kepercayaan pasar, serta daya saing produk di tingkat global.

Dampaknya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan produsen, meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan dan dukungan kebijakan (Cei et al., 2018; Yu & Liu, 2023).

Dalam strategi pembangunan regional, indikasi geografis merupakan barang publik. Indikasi geografis membantu melindungi reputasi produk lokal dari penyalahgunaan, melestarikan warisan budaya, dan menciptakan peluang diversifikasi ekonomi. Akibatnya, kebijakan indikasi geografis seringkali dipandang bukan hanya sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai alat untuk pengembangan ekonomi kreatif, yang mampu memperkuat jaringan produksi, distribusi, dan pemasaran untuk produk regional.

Kerangka Konseptual Integratif.

Berdasarkan literatur di atas, dapat dirumuskan kerangka penelitian konseptual yang menghubungkan:

1. Tata kelola kolaboratif, sebagai paradigma manajemen publik yang memungkinkan koordinasi berbagai aktor;
2. Pengembangan industri kreatif, puncak dari strategi pembangunan yang berbasis pada kreativitas dan identitas lokal;
3. Indikasi Geografis (IG), sebagai alat kebijakan yang menghubungkan kualitas produk lokal dengan strategi pengembangan industri kreatif.

Kerangka ini memandang IG bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai mekanisme kebijakan yang memperkuat jaringan aktor, mendorong kolaborasi lintas sektor, dan menghasilkan nilai ekonomi melalui barang-barang yang diproduksi di wilayah tersebut. Dalam kerangka ini, tata kelola kolaboratif memastikan hubungan antara kebijakan IG dan hasil bagi industri kreatif: kebijakan IG harus diimplementasikan melalui proses kolaboratif untuk memastikan manfaat

yang berkelanjutan dan inklusif bagi industri kreatif.

D. Hasil dan Pembahasan

Karakterisasi Nanas Bikang Bangka Selatan Berdasarkan Analisis Laboratorium dan Mutu Produk.

Karakterisasi kuantitatif terhadap Nanas Bikang Bangka Selatan menunjukkan bahwa komoditas ini memiliki keunggulan fisikokimia yang signifikan sebagai produk Indikasi Geografis berbasis kualitas wilayah. Pengujian laboratorium yang dilakukan oleh PT. Sucofindo terhadap dua tingkat kematangan matang fisiologis dan matang kuning mengungkapkan profil nutrisi, keamanan pangan, serta dinamika pematangan buah yang menjadi dasar ilmiah diferensiasi produk lokal unggulan. Secara konseptual, temuan ini memperkuat teori bahwa kualitas produk berbasis *terroir* menjadi modal utama keberhasilan Indikasi Geografis dalam mendorong nilai ekonomi kreatif (Belletti et al., 2020).

Secara morfologis, nanas Bikang dicirikan oleh buah yang relatif besar, rata-rata sekitar 1,4–1,5 kg, dengan daging buah yang tebal dan mahkota yang agak pipih, yang memudahkan pengolahan pasca panen. Karakteristik ini menunjukkan adaptasi yang kuat terhadap tanah berpasir yang kaya nutrisi dan mineral di Bangka selatan dan iklim tropis yang lembap, yang mempercepat akumulasi air dan gula alami dalam jaringan buah. Nuraini (2021) menemukan bahwa varietas nanas lokal yang ditanam di tanah ringan menghasilkan buah dengan tekstur lebih lembut dan kandungan nutrisi lebih stabil, sehingga meningkatkan kualitas organoleptiknya. Hasil analisis laboratorium pada nanas Bikang dari Bangka selatan disajikan di bawah ini:

Tabel 1.
Hasil Uji Laboratorium Fisikokimia Nanas
Bikang Bangka Selatan.

Parameter	Satuan	Matang Fisiologis	Matang Kuning
Vitamin C	mg/kg	91,02	98,58
Gula total	%	11,34	13,70
Total asam	mL NaOH/ 100 g	4,89	5,62
pH	–	4,41	3,86
Karbohidrat	%	16,78	15,56
Kadar air	%	81,66	82,95
Protein	%	0,73	0,59
Lemak	%	0,07	0,06
Serat kasar	%	0,39	0,62
Residu pestisida	–	Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi

Sumber: Laboratorium PT Sucofindo Pangkalpinang, Dokumen Deskripsi IG Nanas Bikang Bangka Selatan, 2024.

Hasil kuantitatif ini menunjukkan bahwa kandungan vitamin C nanas Bikang secara signifikan lebih tinggi daripada nanas tropis komersial, yang umumnya berkisar antara 40 dan 70 mg/kg (Silva et al., 2022). Peningkatan kandungan vitamin C antara kematangan fisiologis dan pematangan kuning mencerminkan biosintesis asam askorbat yang optimal selama pematangan. Secara fisiologis, proses ini diatur oleh enzim L-galactono-1,4-lactone dehydrogenase, yang aktivitasnya meningkat selama fase klimakterik buah (Kader, 2002). Hasil ini menegaskan bahwa nanas Bikang memiliki nilai fungsional yang tinggi sebagai buah yang meningkatkan kesehatan, yang bervariasi tergantung pada wilayah geografis.

Selanjutnya, kandungan gula total meningkat secara signifikan seiring pematangan, dari 11,34% menjadi 13,70%, sementara kandungan karbohidrat kompleks menurun. Konversi ini sesuai

dengan hidrolisis pati menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa, seperti yang dijelaskan oleh Nascimento et al. (2006) dalam studi mereka tentang dinamika pematangan nanas. Kombinasi kandungan gula yang tinggi dan keasaman total yang relatif tinggi memberikan buah tersebut profil rasa manis dan segar yang khas, yang sangat dihargai oleh konsumen. Bagi industri kreatif, atribut rasa premium ini merupakan elemen kunci dari strategi branding untuk produk Indikasi Geografis Terlindungi (IG).

Peningkatan keasaman buah diterjemahkan menjadi peningkatan keasaman total dan penurunan pH menjadi 3,86 untuk buah kuning yang matang. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesegaran rasa, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas mikrobiologis alami buah dan memperpanjang umur simpannya tanpa penambahan pengawet sintetis (Herlinawati et al., 2022). Dalam praktiknya, ini memfasilitasi distribusi produk segar di pasar regional dan nasional, sehingga mendukung keberlanjutan sektor hortikultura dalam industri kreatif.

Kandungan air yang tinggi, hampir 83%, menunjukkan struktur jaringan yang, berkat degradasi protopektin menjadi pektin larut selama pematangan, mampu menahan air secara optimal. Proses ini membuat daging buah menjadi halus dan meningkatkan sensasi kesegaran saat dikonsumsi (Wills et al., 2007). Tekstur lembut ini membedakan nanas Bikang dari beberapa varietas yang dibudidayakan secara industri, yang seringkali lebih berserat.

Dari perspektif keamanan pangan, tidak ditemukan residu pestisida berbahaya dalam sampel. Hal ini menunjukkan penggunaan metode budidaya yang relatif ramah lingkungan dan kepatuhan terhadap standar internasional untuk nutrisi sehat (FAO, 2021). Dalam konteks indikasi geografis saat ini, aspek keamanan ini memperkuat reputasi produk dan membuka

jalan bagi pasar kelas atas yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.

Mendukung pengamatan ini, morfologi visual nanas Bikang dari Bangka Selatan menggambarkan karakteristik buah ini sebagai produk dengan indikasi geografis. Gambar 1 menyajikan visualisasi morfologi nanas Bikang dari Bangka Selatan.



Gambar 1. Foto Nanas Bikang Dengan Ciri Fisik..

Sumber: Dokumen Deskripsi IG Nanas Bikang Bangka Selatan, 2024.

Secara visual, buah ini memiliki bentuk silindris runcing, ukuran yang relatif besar, dan kulit yang berubah warna dari hijau menjadi kuning cerah, menunjukkan akumulasi pigmen karotenoid alami selama pematangan. Mata buah yang semi-datar dan padat menunjukkan kepadatan jaringan, yang berkontribusi pada ketebalan dan kelembutan daging buah. Warna kuning cerah dan seragam pada daging buah menunjukkan kandungan gula dan air yang tinggi, sesuai dengan hasil analisis kimia laboratorium. Visualisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi morfologis, tetapi juga sebagai bukti keterkaitan antara karakter fisik buah dan faktor lingkungan geografis Bangka Selatan, yang dalam teori *terroir-based quality* menjadi fondasi pembentukan keunggulan produk Indikasi Geografis (Belletti et al., 2020).

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada integrasi langsung data laboratorium kuantitatif ke dalam studi indikasi geografis dan ekonomi kreatif, yang hingga saat ini sebagian besar bersifat normatif atau

deskriptif. Studi ini menunjukkan bahwa kualitas produk yang telah divalidasi secara ilmiah, termasuk kandungan vitamin C yang tinggi, profil rasa yang seimbang, dan keamanan pangan, memberikan landasan yang kuat untuk tata kelola bersama yang sukses dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis indikasi geografis. Kualitas yang terukur ini kemudian menjadi "potensi pengembangan regional" yang dapat diterapkan pada produk indikasi geografis lainnya di Indonesia.

Peran MPIG, Pemerintah Daerah, Petani, dan PD dalam Pengelolaan IG Nanas Bikang.

Pengelolaan Indikasi Geografis (IG) Nanas Bikang Bangka Selatan melibatkan jaringan aktor *multi-level* yang berperan strategis dalam proses tata kelola produk unggulan berbasis wilayah. Pada level komunitas, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) tampil sebagai aktor inti dalam koordinasi teknis dan operasional implementasi IG. MPIG tidak hanya berfungsi sebagai pemegang dokumen deskripsi IG, tetapi juga sebagai wadah kolektif produsen yang bertanggung jawab atas pemantauan mutu, pelaksanaan standar produksi, pengorganisasian distribusi, serta pengembangan produk berdasarkan SOP yang telah ditetapkan dalam dokumen IG. Keterlibatan MPIG dalam forum koordinasi lintas pihak termasuk pemerintah daerah dan dinas teknis mewujudkan proses *collaborative governance* yang memungkinkan diskusi bersama dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas produk dan nilai tambahnya, sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa keterlibatan komunitas lokal dalam tata kelola berbasis wilayah meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan IG (Ansell & Gash, 2008).

Di sisi lain, peran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bangka Selatan terlihat melalui dukungan regulatif, sumber daya, dan fasilitasi kelembagaan dalam bingkai otonomi daerah. Dengan dikeluarkannya

Keputusan Bupati tentang pembentukan MPIG sebagai badan yang sah secara hukum, Pemda berkontribusi besar dalam menyediakan landasan kelembagaan formal yang memungkinkan MPIG melaksanakan tugasnya secara legal dan berkesinambungan. Langkah ini konsisten dengan temuan penelitian Ganindha & Sukarmi (2023) yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong potensi produk pertanian menjadi IG melalui pembinaan, penyediaan regulasi lokal, dan integrasi dengan program pembangunan daerah yang lebih luas. Secara konseptual, keterlibatan Pemda memperlihatkan dimensi *institutional design* dalam model *collaborative governance*, yakni pembentukan kerangka kelembagaan dan kebijakan yang memfasilitasi partisipasi berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan bersama.

Aktor lain yang tidak kalah penting adalah petani produsen Nanas Bikang yang berfungsi sebagai ujung tombak implementasi mutu dan praktik produksi lapangan. Partisipasi petani dalam Rencana Pengelolaan Indikasi Geografis (IG) menyoroti pergeseran paradigma dari pendekatan tradisional dari atas ke bawah menjadi pendekatan yang lebih inklusif, di mana suara dan pengetahuan lokal dianggap sebagai sumber daya penting untuk mengelola indikasi geografis (Khodim, 2024). Keterlibatan petani mencakup implementasi prosedur operasional standar untuk budidaya, jaminan kualitas pasca panen, dan adaptasi teknik produksi berdasarkan hasil laboratorium. Hal ini memastikan bahwa kualitas produk bukan sekadar klaim administratif, tetapi hasil nyata dari praktik pertanian berkualitas tinggi. Pendekatan ini konsisten dengan penelitian tentang tata kelola partisipatif, yang menunjukkan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan lokal meningkatkan koherensi dan implementasi kebijakan di lapangan (Emerson et al., 2012).

Peran Perangkat Daerah termasuk lintas sektor termasuk Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, serta Bappedalitbangda Kabupaten Bangka Selatan, menunjukkan kolaborasi interdisipliner yang penting untuk memperkuat tata kelola indikasi geografis. Dinas Pertanian menyediakan pembinaan teknis budidaya dan pengembangan varietas; Dinas Koperasi & UMKM membuka akses pembiayaan dan pelatihan pemasaran; sementara Bappedalitbangda bertindak sebagai koordinator forum kebijakan dan integrator program pembangunan. Sinergi ini menunjukkan praktik koordinasi multi-aktor yang intensif dan multifungsi, sebagaimana didukung oleh literatur *collaborative governance* yang menggarisbawahi pentingnya dialog berkelanjutan, berbagi sumber daya, serta kepemimpinan fasilitatif dalam menghadapi tantangan bersama (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Tabel 2.

Peran Aktor dalam Pengelolaan IG Nanas Bikang.

Aktor	Peran Utama	Contoh Aktivitas
MPIG	Koordinator teknis dan operasional IG	Penyusunan SOP, pengawasan kualitas, distribusi produk
Pemerintah Daerah	Fasilitator kebijakan dan regulasi	Keputusan Bupati, dukungan kelembagaan, pembiayaan program
Petani	Implementasi mutu dan produksi	Penerapan SOP budidaya, pengontrol mutu lapangan
PD Lintas Sektor	Pendukung teknis dan pemasaran	Pembinaan teknis, pelatihan UMKM, akses pasar

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan dokumen deskripsi IG dan wawancara lapangan, 2026.

Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan indikasi geografis Nanas Bikang Bangka Selatan melampaui sekadar koordinasi administratif. Kolaborasi ini menciptakan sistem kelembagaan adaptif di mana pemangku kepentingan lokal (petani) berpartisipasi tidak hanya dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan teknis dan strategis. Hal ini memperkaya literatur yang ada tentang indikasi geografis, yang umumnya berfokus pada aspek hukum dan komersial, dengan memberikan bukti empiris tentang kontribusi konkret model koperasi dalam meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk, sekaligus melibatkan pemangku kepentingan lokal.

Model Kolaborasi *Governance* dalam Pengelolaan Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan.

Model kolaborasi *governance* dalam pengelolaan Indikasi Geografis (IG) Nanas Bikang Bangka Selatan memperlihatkan integrasi sistematis antara aktor komunitas, pemerintah daerah, dan perangkat birokrasi sektoral yang beroperasi dalam struktur kelembagaan formal MPIG sebagai pusat koordinasi. Berdasarkan dokumen deskripsi IG dan mekanisme operasional yang telah ditetapkan, MPIG tidak hanya berfungsi sebagai pemegang hak pengelolaan administratif IG, tetapi berkembang menjadi *collaborative hub* yang memfasilitasi interaksi lintas aktor dalam penjaminan mutu, pengembangan produksi, dan perluasan nilai ekonomi kreatif. Pola ini mencerminkan pergeseran dari tata kelola sektoral terfragmentasi menuju model *networked governance* yang adaptif, sebagaimana ditegaskan oleh Emerson et al. (2012) bahwa keberhasilan kolaborasi publik ditentukan oleh kemampuan lembaga inti dalam mengintegrasikan kepentingan, sumber daya, dan kapasitas berbagai pemangku kepentingan.

Secara operasional, kolaborasi terwujud melalui mekanisme koordinasi rutin yang melibatkan MPIG, Pemerintah Daerah, dan PD teknis dalam forum perencanaan mutu produk, penyelarasan kebijakan dukungan, serta evaluasi implementasi standar IG. Pemerintah daerah memberikan legitimasi formal melalui regulasi dan alokasi anggaran pembinaan, sementara PD sektoral berperan sebagai penyedia keahlian teknis, akses pasar, dan dukungan inovasi produk. Petani sebagai produsen inti terintegrasi langsung dalam pengambilan keputusan teknis budidaya dan pascapanen, sehingga menciptakan *feedback loop* yang mempercepat adaptasi standar mutu berbasis kondisi lapangan. Integrasi vertikal-horisontal ini memperkuat apa yang oleh Ansell dan Gash (2008) disebut sebagai *shared decision-making arena*, yakni ruang dialog kolaboratif yang mendorong konsensus dan komitmen jangka panjang.

Keunikan (*novelty*) utama model ini terletak pada pemanfaatan data ilmiah mutu produk termasuk hasil uji laboratorium kualitas Nanas Bikang sebagai dasar pengambilan keputusan kolaboratif. Tidak seperti banyak praktik IG yang berhenti pada legalitas perlindungan merek wilayah, *governance* Nanas Bikang mengintegrasikan bukti ilmiah sebagai instrumen legitimasi kualitas dan strategi pengembangan nilai tambah. Pendekatan berbasis sains ini memperluas kerangka IG dari perlindungan simbolik menuju *evidence-based territorial governance*, yang masih jarang dibahas dalam literatur Indikasi Geografis di negara berkembang (Giordano et al., 2021).

Selain itu, model kolaboratif ini menciptakan mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang relatif inklusif, di mana peningkatan nilai jual produk langsung dirasakan petani melalui harga premium berbasis kualitas terjamin, sementara pemerintah daerah memperoleh *multiplier*

effect ekonomi lokal melalui tumbuhnya UMKM olahan nanas dan sektor pariwisata agro. Dinamika ini selaras dengan temuan Belletti et al. (2020) yang menunjukkan bahwa IG yang dikelola secara kolaboratif mampu memperkuat pembangunan wilayah jika didukung oleh struktur *governance* partisipatif dan kapasitas kelembagaan lokal.

Tabel 2.
Struktur dan Fungsi Kolaborasi
Governance IG Nanas Bikang.

Level Aktor	Lembaga	Fungsi Utama	Output Kolaboratif
Komunitas	MPIG	Koordinasi mutu, SOP produksi, distribusi	Produk standar IG
Pemerintah Daerah	Bupati & Sekda	Regulasi, legitimasi kelembagaan	Kebijakan pendukung
PD Teknis	Pertanian, UMKM, Litbang	Pembinaan, inovasi, pemasaran	Nilai tambah produk
Produsen	Petani	Implementasi standar lapangan	Mutu konsisten

Sumber: Analisis kelembagaan IG Nanas Bikang Bangka Selatan, 2026.

Struktur dan fungsi kolaborasi *governance* Indikasi Geografis (IG) Nanas Bikang menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi antara komunitas (MPIG), pemerintah daerah, perangkat daerah teknis, dan produsen (petani). Setiap aktor memiliki fungsi spesifik mulai dari koordinasi mutu dan penyusunan SOP, regulasi dan legitimasi kelembagaan, pembinaan serta inovasi, hingga implementasi standar di tingkat lapangan, yang secara kolektif menghasilkan produk standar IG, kebijakan pendukung, nilai tambah produk, dan mutu yang konsisten. Keterpaduan fungsi ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan IG tidak hanya bergantung pada satu aktor, melainkan pada sinergi sistemik antar lembaga yang terstruktur, sebagaimana divisualisasikan lebih lanjut

dalam model kolaborasi pada Gambar 2.



Gambar 2. Model Kolaborasi Pengelolaan IG Nanas Bikang Bangka Selatan.

Sumber: Analisis lapangan dan dokumen IG Nanas Bikang Bangka Selatan, 2026.

Analisis di atas menunjukkan manifestasi nyata dari **model collaborative governance** yang menurut Ansell & Gash (2008) menekankan interdependensi sumber daya, dialog berkelanjutan, dan struktur kelembagaan inklusif dalam konteks pengelolaan produk berbasis Indikasi Geografis. Kelembagaan MPIG yang memfasilitasi partisipasi petani dalam mekanisme pengambilan keputusan teknis serta dukungan lintas OPD menunjukkan bahwa *governance* IG tidak hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tentang pembangunan kapasitas lokal.

Selain itu, peran Pemda yang memberikan legitimasi formal melalui keputusan dan dukungan program mengintegrasikan IG ke dalam sistem pembangunan daerah memberi contoh nyata bagaimana kebijakan nasional diadaptasi secara efektif pada tingkat daerah, sebagaimana dikemukakan dalam studi Giordano et al. (2021) yang menunjukkan bahwa adaptasi kebijakan nasional melalui institusi lokal memperkuat implementasi kebijakan berbasis komoditas khas wilayah.

Selanjutnya Model kolaborasi *governance* Nanas Bikang menunjukkan konvergensi antara teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008),

network governance, dan pendekatan pembangunan wilayah berbasis kualitas produk lokal. Tidak hanya memenuhi unsur dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama, model ini menambahkan dimensi baru berupa pemanfaatan data mutu ilmiah sebagai alat koordinasi kebijakan dan legitimasi pasar. Hal ini memperkaya kerangka konseptual Emerson et al. (2012) dengan memasukkan *scientific quality governance* sebagai variabel kunci dalam pengelolaan IG *modern*.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis berupa model governance IG berbasis bukti ilmiah yang dapat direplikasi pada komoditas lokal lain di Indonesia dan negara berkembang, khususnya dalam konteks penguatan ekonomi kreatif berbasis sumber daya wilayah.

Dampak Ekonomi Kreatif dari Pengelolaan Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan.

Pengelolaan Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum atas identitas produk lokal, tetapi berkembang menjadi pengungkit utama transformasi ekonomi kreatif wilayah berbasis komoditas unggulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan standar IG melalui koordinasi MPIG dan dukungan pemerintah daerah, terjadi peningkatan kualitas produk yang berimplikasi langsung terhadap daya saing pasar, diversifikasi produk olahan, serta pembentukan rantai nilai ekonomi kreatif baru di tingkat lokal. Fenomena ini sejalan dengan pendekatan *value-based territorial development* yang menempatkan kualitas khas wilayah sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi kreatif (Belletti et al., 2020).

Secara empiris, peningkatan mutu terstandarisasi Nanas Bikang membuka peluang inovasi produk turunan seperti selai nanas premium, kue selai nanas, sirup fermentasi, dodol nanas, hingga minuman

fungsional berbasis vitamin C tinggi. Pelaku UMKM lokal yang sebelumnya hanya menjual buah segar kini mulai bertransformasi menjadi produsen olahan bernilai tambah tinggi. Menurut Florida et al. (2021), ekonomi kreatif berbasis produk lokal berkualitas mampu menciptakan *local creative clusters* yang memperkuat pendapatan masyarakat sekaligus ketahanan ekonomi wilayah pedesaan. Dalam konteks Bangka Selatan, IG menjadi katalis lahirnya klaster ekonomi kreatif hortikultura yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Selain peningkatan nilai tambah produk, pengelolaan IG juga berdampak pada stabilisasi harga dan peningkatan posisi tawar petani. Produk yang telah tersertifikasi mutu IG memperoleh kepercayaan pasar yang lebih tinggi sehingga mampu dipasarkan dengan harga premium dibandingkan nanas non-IG. Kondisi ini mengurangi volatilitas harga musiman yang selama ini merugikan petani kecil. Literatur menunjukkan bahwa IG yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan pendapatan produsen hingga 20–50% melalui diferensiasi kualitas dan reputasi produk (Barjolle et al., 2017). Dengan demikian, IG Nanas Bikang berperan sebagai instrumen redistribusi nilai ekonomi yang lebih adil dalam rantai pasok pertanian.

Dari perspektif pembangunan wilayah, penguatan ekonomi kreatif berbasis IG menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan, meliputi peningkatan lapangan kerja sektor pengolahan pangan, pengemasan kreatif, logistik lokal, serta pengembangan wisata agro-edukatif. Beberapa kelompok tani dan UMKM mulai mengembangkan paket wisata kebun nanas dan workshop olahan nanas sebagai bagian dari strategi branding wilayah. Hal ini memperluas fungsi IG dari sekadar produk komersial menjadi aset ekonomi kreatif berbasis pengalaman atau *experience-based economy* (Richards, 2020).



Gambar 3. Alur Dampak Ekonomi Kreatif Berbasis IG Nanas Bikang Bangka Selatan.

Sumber: Analisis lapangan dan dokumen IG Nanas Bikang Bangka Selatan, 2026.

Gambar 3 menggambarkan secara sistematis mekanisme transformasi kualitas produk berbasis Indikasi Geografis menjadi pengungkit ekonomi kreatif wilayah melalui serangkaian tahapan yang saling terhubung. Proses dimulai dari penerapan standar mutu IG yang menghasilkan konsistensi kualitas Nanas Bikang, yang kemudian meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk lokal. Kepercayaan ini berfungsi sebagai modal reputasi yang memungkinkan terbentuknya harga premium serta penguatan branding wilayah, menjadikan Nanas Bikang tidak lagi diposisikan sebagai komoditas generik, tetapi sebagai produk khas bernilai tinggi. Dampak lanjutan dari reputasi kualitas tersebut adalah munculnya inovasi produk olahan kreatif yang dikembangkan oleh UMKM lokal, mulai dari pangan olahan hingga produk berbasis nilai fungsional. Pertumbuhan UMKM ini selanjutnya memperluas lapangan kerja dan menciptakan efek pengganda ekonomi, yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Secara konseptual, alur ini menegaskan bahwa Indikasi Geografis berfungsi sebagai katalis integratif antara peningkatan mutu produk, inovasi kreatif, dan pembangunan ekonomi wilayah, selaras dengan teori pembangunan berbasis aset lokal (*place-based development*) dan ekonomi kreatif berbasis kualitas produk.

Kebaruan utama terletak pada pembuktian empiris bahwa Indikasi Geografis tidak hanya meningkatkan nilai jual komoditas primer, tetapi secara sistemik memicu terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif wilayah berbasis inovasi produk dan pengalaman wisata agro. Berbeda dari studi IG sebelumnya yang umumnya berfokus pada perlindungan hukum atau peningkatan ekspor, penelitian ini menunjukkan bahwa IG berfungsi sebagai platform *governance* yang mengorkestrasi inovasi lokal lintas sektor. Dengan kata lain, IG diposisikan sebagai mesin penggerak ekonomi kreatif daerah, bukan sekadar label kualitas.

Temuan ini memperluas kerangka teoritis ekonomi kreatif dengan memasukkan Indikasi Geografis sebagai instrumen pembangunan kreatif berbasis kualitas produk lokal terukur sebuah pendekatan yang masih relatif jarang dieksplorasi dalam literatur internasional, khususnya di konteks negara berkembang.

Implikasi Kebijakan Penguatan Indikasi Geografis Nanas Bikang dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Wilayah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan tidak dapat diposisikan semata sebagai instrumen perlindungan hukum produk lokal, tetapi harus dipahami sebagai perangkat kebijakan pembangunan wilayah berbasis kualitas dan kolaborasi kelembagaan. Integrasi antara standar mutu ilmiah, kelembagaan MPIG, serta dukungan pemerintah daerah membentuk ekosistem kebijakan yang mampu menggerakkan ekonomi kreatif secara sistemik. Kondisi ini sejalan dengan paradigma *place-based policy* yang menekankan pemanfaatan aset lokal spesifik sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Rodríguez-Pose, 2018). Dengan demikian, kebijakan IG seharusnya tidak berdiri terpisah dari agenda pembangunan daerah, tetapi

diurusutamakan dalam perencanaan ekonomi, industri kreatif, dan pemberdayaan masyarakat.

Implikasi kebijakan pertama terletak pada perlunya penguatan kelembagaan MPIG sebagai pusat koordinasi tata kelola mutu dan inovasi produk. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa MPIG yang didukung secara administratif dan finansial mampu berfungsi sebagai *policy broker* antara petani, OPD, dan pelaku UMKM. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merumuskan regulasi turunan yang menjamin keberlanjutan operasional MPIG, termasuk skema pendanaan rutin, pelatihan manajemen mutu, serta integrasi MPIG dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Literatur governance menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan kolaboratif sangat bergantung pada kapasitas institusi penghubung (*bridging institutions*) yang memfasilitasi interaksi aktor lintas sektor (Emerson et al., 2012).

Implikasi kedua berkaitan dengan orientasi kebijakan pertanian dari sekadar peningkatan produksi menuju penguatan kualitas berbasis standar ilmiah. Temuan laboratorium menunjukkan bahwa keunggulan mutu Nanas Bikang merupakan fondasi utama daya saing ekonomi kreatif wilayah. Oleh sebab itu, kebijakan sektor pertanian perlu mengadopsi pendekatan *quality-driven development*, di mana intervensi pemerintah difokuskan pada peningkatan mutu terukur, sertifikasi berkelanjutan, serta transfer teknologi pascapanen. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan IG modern di Uni Eropa yang menempatkan kualitas sebagai instrumen utama pembangunan rural (Barjolle et al., 2017).

Implikasi ketiga menyangkut integrasi IG dalam kebijakan ekonomi kreatif dan UMKM daerah. Penelitian ini membuktikan bahwa IG mampu memicu inovasi produk, pembentukan klaster UMKM olahan, serta pengembangan pariwisata agro kreatif. Oleh karena itu,

kebijakan industri kreatif daerah perlu menjadikan IG sebagai basis pengembangan produk unggulan, termasuk dukungan desain kemasan, pemasaran digital, akses pembiayaan, dan penguatan merek wilayah. Richards (2020) menekankan bahwa keberhasilan ekonomi kreatif lokal sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengorkestrasi aset budaya dan produk khas wilayah menjadi pengalaman ekonomi bernilai tinggi.

Implikasi kebijakan keempat adalah perlunya membangun sistem monitoring mutu dan dampak ekonomi berbasis data yang berkelanjutan. Integrasi hasil uji laboratorium dalam pengambilan keputusan governance IG Nanas Bikang menunjukkan potensi besar penerapan *evidence-based policy*. Pemerintah daerah bersama MPIG perlu mengembangkan sistem pengumpulan data mutu, harga pasar, pendapatan petani, serta kinerja UMKM secara periodik untuk memastikan kebijakan adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan. Praktik ini sejalan dengan rekomendasi OECD (2021) yang menekankan pentingnya *data-driven governance* dalam pembangunan wilayah *modern*.

Tabel 3.

Implikasi Kebijakan Strategis Pengelolaan IG Nanas Bikang.

Bidang Kebijaksanaan	Fokus Utama	Instrumen Kebijakan	Dampak Diharapkan
Kelembagaan	Penguatan MPIG	Regulasi daerah, pendanaan rutin	Tata kelola berkelanjutan
Pertanian	Mutu berbasis sains	Standar budidaya & pascapanen	Produk premium
Ekonomi kreatif	Inovasi UMKM	Pelatihan, branding, pembiayaan	Nilai tambah tinggi
Data & evaluasi	<i>Evidence-based policy</i>	Sistem monitoring	Kebijakan adaptif

Sumber: Sintesis hasil penelitian, 2026.

Implikasi kebijakan strategis pengelolaan IG Nanas Bikang menunjukkan keterkaitan yang sistematis antara penguatan kelembagaan, peningkatan mutu berbasis sains, inovasi ekonomi kreatif, serta pemanfaatan data dan evaluasi berbasis bukti. Setiap bidang kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terintegrasi dalam membentuk tata kelola yang berkelanjutan dan adaptif. Regulasi daerah dan penguatan MPIG menjadi fondasi kelembagaan, yang selanjutnya diperkuat dengan standarisasi budidaya dan pascapanen untuk menghasilkan produk premium. Di sisi lain, inovasi UMKM melalui pelatihan branding dan pembiayaan mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi, sementara sistem monitoring berbasis *evidence* memastikan kebijakan tetap responsif terhadap dinamika lapangan. Keterpaduan ini kemudian divisualisasikan dalam kerangka implikasi kebijakan berbasis kolaborasi yang menegaskan alur transformasi dari standar ilmiah hingga tercapainya pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Kerangka Implikasi Kebijakan Pengelolaan IG Berbasis Kolaborasi.

Sumber: Analisis lapangan dan dokumen IG Nanas Bikang Bangka Selatan, 2026.

Gambar 4 menggambarkan kerangka implikasi kebijakan pengelolaan Indikasi Geografis (IG) Nanas Bikang Bangka Selatan yang disusun secara linier-progresif berbasis kolaborasi multi-aktor. Tahapan awal dimulai dari penetapan standar mutu

ilmiah sebagai fondasi utama untuk menjamin konsistensi kualitas produk berbasis karakteristik geografis, yang sejalan dengan prinsip *quality assurance* dalam pengelolaan IG *modern*. Standarisasi ini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan pasar, memperkuat reputasi produk, serta mencegah degradasi mutu yang kerap terjadi pada komoditas lokal tanpa pengawasan kolektif.

Tahap berikutnya menekankan penguatan kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sebagai aktor inti tata kelola. MPIG berperan sebagai koordinator produksi, pengawas mutu, sekaligus mediator antara petani, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Penguatan ini mencerminkan pendekatan *collaborative governance* yang menempatkan komunitas produsen sebagai pusat pengambilan keputusan berbasis kepentingan bersama, sehingga mampu menciptakan keberlanjutan kelembagaan dan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

Selanjutnya, kerangka menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara Perangkat Daerah (PD) dan UMKM sebagai motor penggerak hilirisasi ekonomi kreatif. Sinergi ini memungkinkan integrasi kebijakan pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri kreatif dalam satu ekosistem pembangunan berbasis IG. Kolaborasi tersebut mempercepat transfer teknologi pengolahan, pengemasan inovatif, sertifikasi produk, serta perluasan akses pasar regional dan nasional.

Tahapan inovasi produk kreatif menjadi jembatan strategis antara sektor primer dan ekonomi bernilai tambah tinggi. Inovasi ini meliputi diversifikasi olahan nanas seperti makanan fungsional, produk kuliner khas daerah, hingga produk souvenir agroindustri berbasis identitas lokal. Transformasi ini menegaskan bahwa IG tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum komoditas mentah,

tetapi juga sebagai katalis pengembangan ekonomi kreatif wilayah.

Dampak lanjutan dari rangkaian kebijakan kolaboratif tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan pendapatan petani, terbukanya lapangan kerja baru di sektor pengolahan dan pemasaran, serta meningkatnya kontribusi UMKM lokal terhadap PDRB daerah menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan berbasis IG. Pada akhirnya, seluruh proses bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan berbasis sumber daya lokal unggulan.

Secara konseptual, kerangka ini menghadirkan *novelty* berupa integrasi sistematis antara standarisasi ilmiah produk, penguatan kelembagaan komunitas, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi ekonomi kreatif dalam satu model kebijakan IG berbasis *governance* kolaboratif. Model ini melampaui pendekatan konvensional yang umumnya berhenti pada aspek legalitas IG semata, dengan menunjukkan jalur transformasi nyata menuju pembangunan ekonomi wilayah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Formulasi model kebijakan IG berbasis kualitas ilmiah dan *governance* kolaboratif sebagai instrumen pembangunan ekonomi kreatif wilayah. Berbeda dari pendekatan konvensional yang menempatkan IG hanya sebagai proteksi hukum dan promosi produk, penelitian ini menunjukkan bahwa IG dapat dioperasionalkan sebagai sistem kebijakan terintegrasi yang menghubungkan mutu produk, kelembagaan komunitas, inovasi kreatif, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi praktis berupa blueprint kebijakan daerah berbasis IG yang dapat direplikasi pada komoditas lokal lain di Indonesia, sekaligus kontribusi teoretis

dalam memperluas diskursus *governance* kolaboratif dan ekonomi kreatif berbasis kualitas wilayah.

E. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Indikasi Geografis (IG) Nanas Bikang Bangka Selatan berfungsi tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hukum produk lokal, tetapi sebagai mekanisme strategis pembangunan ekonomi kreatif berbasis wilayah melalui *governance* kolaboratif. Keunggulan mutu produk yang terverifikasi secara ilmiah menjadi fondasi legitimasi pasar dan reputasi IG, yang kemudian diorkestrasi oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sebagai aktor penghubung antara petani, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM. Kolaborasi lintas aktor ini mampu mengatasi fragmentasi tata kelola sektoral, mendorong inovasi produk kreatif berbasis komoditas lokal, memperluas rantai nilai ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transformasi Nanas Bikang dari komoditas primer menjadi basis ekonomi kreatif wilayah menegaskan bahwa IG dapat dioperasionalkan sebagai instrumen pembangunan inklusif yang berorientasi pada kualitas, identitas lokal, dan daya saing daerah.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada formulasi model integratif pengelolaan IG yang menghubungkan standar mutu ilmiah, kelembagaan komunitas, dan mekanisme *governance* kolaboratif sebagai satu sistem pembangunan ekonomi kreatif wilayah. Model ini memperluas kerangka teoritis *collaborative governance* dengan memasukkan dimensi kualitas produk sebagai variabel kunci keberhasilan kolaborasi pembangunan berbasis wilayah, sekaligus memberikan implikasi kebijakan konkret bagi pemerintah daerah dalam penguatan MPIG, integrasi IG dalam strategi ekonomi kreatif, serta pengembangan kebijakan berbasis data.

Keterbatasan studi kasus tunggal membuka peluang penelitian lanjutan secara komparatif dan longitudinal guna menguji keberlanjutan dampak ekonomi IG serta replikabilitas model tata kelola yang dikembangkan.

F. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan atas dukungan kebijakan dan fasilitasi data dalam pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Nanas Bikang Bangka Selatan, para petani produsen, serta pelaku UMKM kreatif yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan informasi empiris yang sangat berharga selama proses pengumpulan data lapangan. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait, khususnya dinas teknis dan Bappedalitbangda Kabupaten Bangka Selatan, atas pendampingan teknis, akses dokumen institusional, serta dukungan koordinatif dalam pengembangan Indikasi Geografis Nanas Bikang. Kontribusi laboratorium pengujian mutu produk dalam penyediaan data ilmiah kualitas buah juga sangat diapresiasi sebagai bagian penting dalam penguatan analisis penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Barjolle, D., Sylvander, B., & Thévenod-Mottet, E. (2017). Public policies for geographical indications and rural development. *World Development*, 98, 189–203. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.013>
- Belletti, G., Marescotti, A., & Touzard, J. M. (2020). Geographical indications, public goods, and sustainable development. *World Development*, 98, 45–57. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.009>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Cei, L., Defrancesco, E., & Stefani, G. (2018). From geographical indications to rural development: A review of the economic effects of European Union policy. *Sustainability*, 10(10), 3745. <https://doi.org/10.3390/su10103745>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Florida, R., Adler, P., & Mellander, C. (2021). The creative economy revisited. *Regional Studies*, 55(4), 636–648. <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1629669>
- Food and Agriculture Organization. (2021). *Food safety and pesticide residue control in horticulture*. FAO.
- Giordano, B., et al. (2021). Territorial governance and geographical indications. *Regional Studies*, 55(8), 1305–1318. <https://doi.org/10.1080/00343404.2020.1854714>

- Giovannucci, D., Josling, T., Kerr, W., O'Connor, B., & Yeung, M. T. (2009). *Guide to geographical indications: Linking products and their origins*. International Trade Centre.
- Howkins, J. (2013). *The creative economy: How people make money from ideas*. Penguin Books.
- Irawan, C. (2017). Pendaftaran indikasi geografis sebagai instrumen perlindungan hukum dan peningkatan daya saing produk daerah di Indonesia. Proceeding SENDI_U. Retrieved from <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/5065>
- Kader, A. A. (2002). *Postharvest technology of horticultural crops*. University of California Press.
- Kurnilasari, D. T. (2020). Geographical indications in trade commodities for promoting sustainable economic development in Indonesia. *Lentera Hukum*, 7(3), 279–300. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v7i3.19474>
- Malaguti, J. M. A., & Avrichir, I. (2025). Geographical indications and their impacts on sustainable development: A literature review. *SDGs Studies Review*, 6, e029. <https://doi.org/10.37497/sdgs.v6istudies.29>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nascimento, J. R. O., et al. (2006). Starch degradation and sugar accumulation in pineapple fruit during ripening. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 54(3), 930–935. <https://doi.org/10.1021/jf052132x>
- Neilson, J., Wright, J., & Aklmawati, L. (2018). Geographical indications and value capture in the Indonesia coffee sector. *Journal of Rural Studies*, 59, 35–48. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.01.003>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Data-driven public sector and regional development*. OECD Publishing.
- Rangnekar, D. (2004). *The socio-economics of geographical indications*. UNCTAD–ICTSD.
- Richards, G. (2020). Creative tourism and local development. *Tourism Management Perspectives*, 34, 100634. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100634>
- Rodríguez-Pose, A. (2018). The revenge of the places that don't matter. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 11(1), 189–209. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024>
- Shavira, J. E., & Nugroho, A. A. (2021). Perlindungan hukum indikasi geografis terhadap produk masyarakat adat di Indonesia (studi kasus masyarakat adat Baduy). *Jurnal Education and Development*, 9(1), 111–118. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2305>
- Silva, E. P., et al. (2022). Vitamin C as a quality indicator in tropical fruits. *Food Chemistry*, 373, 131412. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.131412>
- Thalib, A. R. R., Hamzah, R., & Thalib, N. A. (2025). Shortcomings of geographical indication in Indonesia: A critical appraisal. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 52(5), Article 6. <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.52.5.6>

UNCTAD. (2022). *Creative economy outlook 2022: The creative economy in the post-COVID world*. United Nations.

Yan, W. J., & Liu, S. T. (2023). Creative economy and sustainable development: Shaping flexible cultural governance models. *Sustainability*, 15(5), 4353. <https://doi.org/10.3390/su15054353>

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.

Yu, W., & Liu, S.-T. (2023). Do geographical indication products promote the growth of the agricultural economy? An empirical study based on meta-analysis. *Economies*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/economies11020045>.

DINAMIKA VARIABEL SOSIODEMOGRAFI DAN FENOMENA NEET DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: PENDEKATAN REGRESI LOGISTIK BINER

The Dynamics of Sociodemographic Variables and the NEET Phenomenon in the Bangka Belitung Islands: A Binary Logistic Regression Approach

Fadilatul Hilmiyah¹, Diantika Ardila Shanti²

(Politeknik Keuangan Negara STAN)

e-mail: 4121220135_dila@pknstan.ac.id

ABSTRAK

Indonesia saat ini berada pada era bonus demografi yang diproyeksikan sebagai katalisator utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kendati demikian, fenomena ketenagakerjaan di kalangan generasi muda tetap menjadi tantangan pelik, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indikator *Not in Education, Employment, or Training* (NEET) merupakan salah satu parameter penting dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk memotret kerentanan penduduk usia 15–24 tahun terhadap keterbatasan akses aktivitas ekonomi dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan yang memengaruhi status NEET generasi muda di wilayah tersebut. Dengan menggunakan data sekunder Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024, analisis dilakukan melalui pendekatan model regresi logistik biner. Temuan empiris mengonfirmasi bahwa variabel jenis kelamin, status pernikahan, dan kondisi disabilitas memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap status NEET ($p\text{-value} < 0,05$). Sebaliknya, tingkat pendidikan tinggi, klasifikasi wilayah tempat tinggal, dan faktor usia tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam model ini. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, terutama melalui program peningkatan kapasitas SDM, pencegahan pernikahan dini, serta perluasan akses kerja bagi perempuan dan penyandang disabilitas.

Kata Kunci: NEET, Generasi Muda, Regresi Logistik Biner, Bangka Belitung, Ketenagakerjaan.

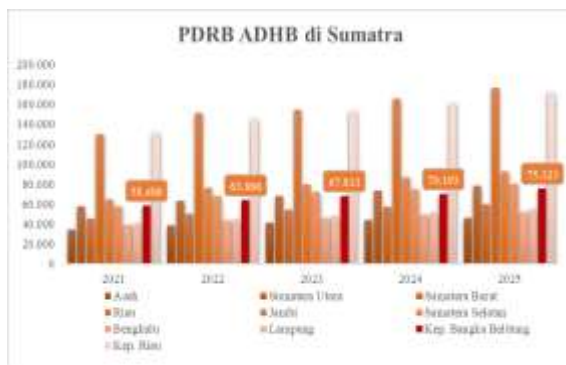
ABSTRACT

Indonesia is currently in a demographic bonus era, which is projected to be the main catalyst in realizing the vision of Indonesia Emas 2045. However, the phenomenon of youth unemployment remains a complex challenge, especially in the Bangka Belitung Islands Province. The *Not in Education, Employment, or Training* (NEET) indicator is one of the important parameters in the *Sustainable Development Goals* (SDGs) to capture the vulnerability of people aged 15–24 years to limited access to economic and educational activities. This study aims to analyze the determining factors that influence the NEET status of young people in the region. Using secondary data from the August 2024 National Labor Force Survey (Sakernas), the analysis was conducted using a binary logistic regression model approach. Empirical findings confirm that the variables of gender, marital status, and disability status have a statistically significant effect on NEET status ($p\text{-value} < 0.05$). Conversely, higher education levels, residential area classification, and age factors did not show a significant influence in this model. The results of this study are expected to serve as a basis for stakeholders in formulating inclusive employment policies, particularly through programs to increase human resource capacity, prevent early marriage, and expand job access for women and people with disabilities.

Keywords: NEET, Young Generation, Binary Logistic Regression, Bangka Belitung, Employment.

A. Pendahuluan

Indonesia tengah memasuki fase penting pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, yaitu visi nasional untuk menjadi negara maju pada satu abad kemerdekaan. Salah satu modal utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif (Bappenas, 2019). Kondisi ini memberikan peluang besar bagi peningkatan produktivitas ekonomi apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai.



Gambar 1. PDRB ADHB Pulau Sumatra
Sumber: BPS (2026).

Sejalan dengan hal tersebut, perekonomian Indonesia juga menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan pertumbuhan sekitar 5% dalam beberapa tahun terakhir (BPS, 2026). Sebagai bagian dari wilayah Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dalam mendukung pembangunan nasional. Pada tahun 2025, perekonomian Bangka Belitung tercatat tumbuh 4,09 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp116,81 triliun (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025).

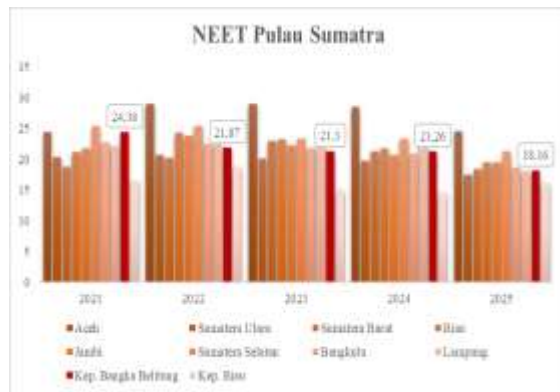


Gambar 2. TPAK Bangka Belitung
Sumber: BPS Kep. Bangka Belitung (2026).

Namun demikian, potensi ekonomi tersebut tidak selalu sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan yang stabil. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, minimnya diversifikasi sektor ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan yang belum optimal, serta dampak pandemi COVID-19 (Syaputra et al. 2025). Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di provinsi ini juga menunjukkan kecenderungan stagnan pada kisaran sekitar 69%, yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia kerja belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan partisipasi dalam pasar tenaga kerja (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025). Selain itu, data ketenagakerjaan juga menunjukkan bahwa TPT pada kelompok pendidikan menengah kejuruan, diploma, dan sarjana relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok pendidikan di bawahnya, yang mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025).

Kondisi keterlibatan pemuda dalam aktivitas produktif juga dapat dilihat melalui indikator *Not in Employment, Education, or Training* (NEET). Fenomena ini menjadi perhatian penting karena Indonesia tercatat sebagai negara dengan persentase NEET tertinggi di antara negara-

negara ASEAN (Sari, Sukamdi, & Rofi, 2022). Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan pemuda dalam proses transisi dari pendidikan menuju pasar kerja.



Gambar 3. NEET di Pulau Sumatra

Sumber: BPS (2026).

Fenomena NEET juga menjadi relevan untuk dikaji di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan struktur penduduk tahun 2026, jumlah penduduk usia 15–24 tahun di provinsi ini mencapai lebih dari 250 ribu jiwa, yang menunjukkan bahwa proporsi pemuda dalam struktur penduduk daerah ini cukup besar (BPS, 2026). Struktur tersebut mencerminkan piramida penduduk yang bersifat ekspansioner, sehingga kelompok usia muda berpotensi menjadi sumber tenaga kerja produktif di masa depan. Namun demikian, besarnya jumlah penduduk usia muda juga dapat menjadi tantangan apabila tidak diiringi dengan keterlibatan yang optimal dalam pendidikan, pelatihan, maupun kegiatan ekonomi.

Secara teoritis maupun empiris, status NEET pada pemuda dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiodemografis, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, kondisi disabilitas, serta karakteristik wilayah tempat tinggal. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi akses individu terhadap pendidikan, pelatihan, serta kesempatan kerja yang pada akhirnya menentukan kemungkinan seseorang berada dalam kondisi NEET (Hidayat et al., 2026).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji determinan NEET dari perspektif sosiodemografis. Penelitian Hidayat et al. (2026) menunjukkan bahwa faktor seperti jenis kelamin, usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan karakteristik rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan pemuda menjadi NEET di Indonesia. Penelitian Hardiani et al. (2023) di Provinsi Jambi juga menemukan bahwa gender, pendidikan, status perkawinan, dan pendapatan orang tua memengaruhi status NEET pemuda. Temuan serupa juga diperoleh oleh Herdiana et al. (2024) di Provinsi Gorontalo yang menunjukkan bahwa umur, jenis kelamin, status disabilitas, pendidikan, serta karakteristik rumah tangga berperan dalam menentukan kemungkinan seseorang berada dalam kondisi NEET.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian mengenai determinan NEET di Indonesia masih dilakukan pada tingkat nasional atau di beberapa provinsi tertentu, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi spesifik pada setiap daerah. Padahal, karakteristik sosiodemografis dan dinamika pasar tenaga kerja dapat berbeda antarwilayah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor sosiodemografis terhadap status *Not in Employment, Education, or Training* (NEET) pada generasi muda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan statistik inferensia dengan model regresi logistik biner untuk mengidentifikasi determinan status NEET pada generasi muda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 yang diterbitkan oleh BPS. Sejalan dengan *World Youth Report* oleh PBB, cakupan umur yang digunakan dalam konsep NEET

adalah individu berusia 15-24 tahun (Citra, 2022).

Penerapan konsep NEET dalam penelitian ini mengacu pada definisi operasional BPS yaitu, *Not in Education* mencakup mereka yang belum pernah atau sudah tidak bersekolah lagi pada jenjang formal maupun nonformal (BPS, 2026). Definisi *Not in Employment* merujuk pada individu yang tidak melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh penghasilan minimal satu jam per minggu, tidak berwirausaha, bukan pekerja keluarga, serta tidak sedang sementara tidak bekerja. Sementara itu, *Not in Training* didefinisikan sebagai individu yang pada saat pencacahan tidak sedang mengikuti pelatihan, kursus, atau training.

Model Penelitian.

Model regresi logistik biner yang digunakan mengikuti bentuk umum menurut Hosmer & Lemeshow (1989). Model penelitian diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 Gend + \beta_2 Mar + \beta_3 Dist + \beta_4 Ter_edu + \beta_5 Resid + \beta_6 Age \quad (1)$$

Lebih lanjut, variabel operasional penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.
Variabel Penelitian.

Variabel	Tipe Data	Kategori
Variabel Dependen		
Status <i>Not in Employment, Education, or Training</i> (NEET)	Kategorikal	1:NEET 0:Bukan NEET
Variabel Independen		
Jenis Kelamin (Gender)	Kategorikal	1: Perempuan 0: Laki-laki

Perkawinan (Marital)	Kategorikal	1:Menikah 0:Belum pernah menikah
Status Disabilitas (Distability)	Kategorikal	1:Disabilitas 0:Non disabilitas
Edukasi Tersier (Tertiary education)	Kategorikal	1:Diploma/S1 ke atas 0:Diploma/S1 ke bawah
Tempat Tinggal (Residence)	Kategorikal	1:Desa 0:Kota
Umur (Age)	Numerik	

Sumber: Diolah Penulis (2026).

Odd Ratio.

Odds ratio digunakan untuk menginterpretasikan koefisien regresi logistik guna memahami besarnya pengaruh variabel independen secara nyata (Hosmer & Lemeshow, 1989). Nilai ini diperoleh dengan membandingkan nilai *odds* dari suatu kategori variabel terhadap kategori referensinya. Sebagai contoh, jika terdapat kategori 0 dan 1, ketika 0 adalah referensi, maka nilai *odds ratio* untuk kategori 1 didapatkan dari hasil berikut:

$$\varphi = \frac{p(X_j = 1) - (1 - p(X_j = 1))}{p(X_j = 0) - (1 - p(X_j = 0))} = \text{Exp}(\beta_j) \quad (2)$$

Hasil dari $\text{Exp}(\beta_j)$ merupakan nilai *odds ratio* untuk setiap variabel independen. Selain itu, menurut Hosmer & Lemeshow (1989), tahapan pengujian dalam regresi logistik adalah sebagai berikut:

1. Overall Fit Test.

Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah seluruh variabel independen di dalam model secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Hosmer & Lemeshow, 1989). Instrumen yang digunakan adalah Statistik Uji G atau *Likelihood Ratio Test*, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$G = -2\ln\left(\frac{L0}{L1}\right) \quad (3)$$

Dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$, keputusan tolak H_0 diambil jika nilai signifikansi ($p\text{-value}$) $< \alpha$. Kondisi ini mengindikasikan minimal terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Partial Test.

Berbeda dengan uji simultan, pengujian parsial dilakukan untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing variabel bebas secara individu terhadap model. Uji yang digunakan adalah Uji Wald, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$W = \left(\frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}\right)^2 \quad (4)$$

Dengan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$, kriteria pengambilan keputusan tolak H_0 diambil jika nilai signifikansi ($p\text{-value}$) $< \alpha$. Artinya, terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Model Compatibility Test.

Uji kesesuaian model (*Goodness of Fit*) dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana model yang telah dibentuk mampu merepresentasikan data observasi secara akurat (Hosmer & Lemeshow, 1989). Dalam analisis regresi logistik, statistik uji yang umum diterapkan adalah uji Hosmer-Lemeshow, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$C = \sum_{i=0}^g \frac{(O_i - N_i\pi_i)^2}{N_i\pi_i(1 - \pi_i)} \quad (5)$$

C. Kerangka Teori

Kajian mengenai ketenagakerjaan berangkat dari pemahaman mengenai struktur penduduk dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umumnya dibedakan menjadi penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja kemudian terbagi menjadi dua kelompok, yaitu

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja mencakup individu yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan dalam periode rujukan. Dalam konsep ketenagakerjaan, seseorang dikategorikan bekerja apabila melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam periode rujukan, termasuk individu yang sementara tidak bekerja. Sementara itu, pengangguran merujuk pada penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau siap bekerja dalam waktu dekat (Ningrum, 2023).

Permasalahan ketenagakerjaan pada kelompok usia muda memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan kelompok usia kerja lainnya. Pengangguran pemuda seringkali berkaitan dengan berbagai isu seperti transisi dari sekolah ke pekerjaan, pekerjaan informal, mobilitas tenaga kerja, segmentasi pasar kerja, serta ketidakadilan dalam pemberian upah (Vasile, 2011). Tingkat pengangguran pemuda umumnya relatif lebih tinggi karena kelompok ini memiliki pengalaman kerja yang terbatas serta sering kali bekerja dalam kontrak jangka pendek. Dalam kondisi perlambatan ekonomi, kelompok pemuda juga menjadi kelompok yang paling rentan kehilangan pekerjaan atau tidak kembali direkrut oleh perusahaan (Martin, 2009).

Salah satu pendekatan penting dalam menjelaskan keterlibatan pemuda dalam pasar kerja adalah melalui peran pendidikan dan keterampilan. Pendidikan formal maupun pelatihan merupakan sarana utama bagi individu untuk memperoleh modal manusia (*human capital*) yang dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja. Modal manusia yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kemampuan dan produktivitas individu sehingga memperbesar peluang memperoleh pekerjaan maupun meningkatkan tingkat

pendapatan (Borjas, 2016). Dengan demikian, tingkat pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan peluang kerja serta kualitas pekerjaan yang diperoleh individu. Dalam perspektif siklus kehidupan, usia muda merupakan periode yang ditandai dengan eksplorasi, perubahan, serta transisi dalam pendidikan dan pekerjaan (Uthayakumar et al., 2010).

United Nations mendefinisikan usia muda sebagai individu yang berada pada rentang usia 15 hingga 24 tahun, yaitu fase transisi dari masa remaja menuju masa dewasa yang memiliki implikasi penting terhadap pencapaian sosial dan ekonomi di masa depan (Hogan & Astone, 1986). Pada fase ini, individu biasanya mengalami peralihan dari pendidikan menuju dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Bäckman & Nilsson, 2016). Kegagalan dalam mempertahankan keterlibatan dalam pendidikan maupun pasar tenaga kerja pada fase ini dapat menghambat akumulasi modal manusia dan modal sosial yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan yang stabil (Hammer, 2007).



Gambar 4. Konsep Ketenagakerjaan
Sumber: Sakernas 2024.

Dalam konteks tersebut, konsep *Not in Employment, Education, or Training* (NEET) digunakan untuk menggambarkan kelompok pemuda yang tidak terlibat dalam pekerjaan, pendidikan, maupun pelatihan. Istilah NEET pertama kali diperkenalkan

di Inggris pada akhir 1980-an untuk mengidentifikasi kelompok pemuda yang berada di luar kegiatan produktif (Coles et al., 2002). Eurofound mendefinisikan NEET sebagai individu berusia 15 - 24 tahun yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan (Eurofound, 2012). Konsep ini banyak digunakan dalam analisis pasar tenaga kerja pemuda karena mampu menggambarkan kondisi pemuda secara lebih luas, termasuk mereka yang berada di luar angkatan kerja maupun yang sedang menganggur.

Lebih lanjut, indikator NEET sering digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan pemuda dalam pasar tenaga kerja serta sebagai ukuran marginalisasi dalam pembangunan ekonomi. Kovrova dan Lyon (2013) menyatakan bahwa NEET dapat digunakan untuk menganalisis berbagai permasalahan dalam pasar tenaga kerja pemuda. Tingginya proporsi pemuda yang berada dalam kondisi NEET seringkali berkaitan dengan terbatasnya kesempatan kerja serta tingginya persaingan di pasar tenaga kerja, terutama ketika pemuda harus bersaing dengan pekerja yang lebih berpengalaman (Balan, 2015). Oleh karena itu, konsep NEET menjadi penting dalam memahami dinamika transisi pemuda dari pendidikan menuju dunia kerja serta dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif.

D. Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif.

Berdasarkan pengolahan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024, pemuda berstatus NEET (*Not in Employment, Education, or Training*) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kecenderungan profil demografi dan sosial ekonomi yang spesifik.

Tabel 2.

Karakteristik NEET di Bangka Belitung.

Variabel	Kategori Variabel	Freq.	Persen
Gender	Perempuan	198	60.37
	Laki-laki	130	39.63
Marital	Pernah menikah	88	26.83
	Belum pernah	249	73.17
Disability	Disabilitas	8	2.44
	Bukan Disabilitas	320	97.56
Tertiary education	Diploma/Sarjana ke atas	12	3.66
	Diploma/Sarjana ke bawah	316	96.34
Residance	Desa	170	51.83
	Kota	158	48.17
Age	15-19	140	42.68
	20-24	188	57.32

Sumber: Sakernas (Diolah).

Ditinjau dari aspek gender, kelompok pemuda NEET di wilayah ini didominasi oleh perempuan, yakni mencapai 60,37% (198 orang) dibandingkan laki-laki yang sebesar 39,63% (130 orang). Jika dilihat dari struktur usianya, fenomena NEET lebih banyak ditemukan pada kelompok umur yang lebih matang, yaitu usia 20-24 tahun dengan persentase 57,32% (188 orang). Sementara itu, kelompok usia 15-19 tahun memberikan kontribusi sebesar 42,68% (140 orang).

Pada variabel status perkawinan, mayoritas pemuda NEET merupakan individu yang belum pernah menikah dengan persentase 73,17% (249 orang), sedangkan yang berstatus pernah menikah tercatat sebesar 26,83% (88 orang). Terkait kondisi fisik, hampir seluruh pemuda NEET adalah individu tanpa disabilitas, yaitu sebesar 97,56% (320 orang). Kelompok penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori NEET hanya mencakup proporsi sangat kecil sebesar 2,44% (8 orang).

Karakteristik latar belakang pendidikan menunjukkan pemusatan yang sangat kuat pada tingkat pendidikan menengah ke bawah. Sebanyak 96,34% (316 orang) pemuda NEET hanya menamatkan

pendidikan diploma/sarjana ke bawah. Sebaliknya, hanya 3,66% (12 orang) yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau diploma/sarjana ke atas yang berstatus NEET. Terakhir, berdasarkan sebaran wilayah, pemuda NEET sedikit lebih banyak terkonsentrasi di pedesaan dengan persentase 51,83% (158 orang) dibandingkan wilayah perkotaan yang sebesar 48,17% (170 orang).

Determinasi Karakteristik Generasi Muda Berpeluang menjadi NEET di Kep. Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji G) pada Tabel 3, model regresi logistik ini dinyatakan fit atau layak digunakan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Prob > Chi2 sebesar 0,000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, variabel independen dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Meskipun demikian, nilai Pseudo R2 sebesar 0,0397 menunjukkan bahwa kombinasi variabel independen tersebut hanya mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 3,97%, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Tabel 3.

Hasil Regresi Logistik.

Variabel	Coefficients	Sig.	Odd Ratio
Gender	0.60349***	0.000	1.828496
Marital	0.71625***	0.000	2.046754
Disability	1.4695**	0.013	4.347071
Tertiary education	-0.36070	0.309	0.697185
Residance	-0.02665	0.845	0.973696
Age	0.00409	0.882	1.004107
Constanta	-1.4190***	0.009	0.241954
Obs			1,131
Pseudo R2			0.0397
LR2			54.09
Prob>Chi2			0.000
Classification Table			71%

Information: Standard errors in parentheses

*** significant at the level of 1%

** significant at the level of 5%

* significant at the level of 10%

Sumber: Sakernas 2024 (Diolah).

Dilihat dari uji parsial (Uji Wald), variabel Gender, Marital, dan *Disability* terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status NEET karena memiliki nilai *p-value* di bawah α . Sebaliknya, variabel *Tertiary Education*, *Residance*, dan *Age* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik ($\alpha > 0,05$). Dengan demikian, model regresi logistik dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = -1.4190 + 0.6035 \text{ Gend} \\ + 0.7162 \text{ Mar} + 1.4695 \text{ Dist} \\ - 0.361 \text{ Ter}_{edu} + -0.0267 \text{ Resid} \\ + 0.004 \text{ Age}$$

Variabel *Disability* memiliki kecenderungan paling tinggi dengan nilai *Odd Ratio* sebesar 4,347, yang berarti penyandang disabilitas memiliki peluang 4,347 kali lebih besar untuk menjadi NEET dibandingkan non-disabilitas. Di sisi lain, variabel *Tertiary Education* menunjukan *Odd Ratio* terendah dengan nilai 0,698. Artinya, generasi muda yang mengenyam pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana ke atas), memiliki tendensi lebih kecil menjadi NEET dibandingkan pemuda yang tidak berpendidikan tinggi. Secara keseluruhan, model ini memiliki tingkat ketepatan klasifikasi yang cukup baik. Terbukti dari nilai *Classification Table* menunjukkan angka 71%. Hal ini berarti model mampu memprediksi atau mengklasifikasikan observasi dengan tepat sebesar 71% berdasarkan variabel-variabel yang diuji. dalamnya termasuk analisa dan interpretasi.

Variabel Gender.

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan perbedaan peluang pemuda dalam mengakses pendidikan maupun pasar tenaga kerja. Dalam penelitian ini, perempuan memiliki kecenderungan lebih besar untuk berada dalam kondisi NEET dibandingkan laki-laki. Kondisi ini dapat terjadi karena perempuan sering menghadapi hambatan sosial maupun struktural yang memengaruhi

partisipasi mereka dalam pendidikan dan pekerjaan. Dalam banyak kasus, perempuan lebih rentan keluar dari sistem pendidikan maupun pasar kerja karena tanggung jawab domestik, pernikahan pada usia muda, serta norma sosial yang masih memposisikan perempuan lebih banyak dalam peran rumah tangga.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki risiko lebih tinggi untuk berada dalam kondisi NEET. Sari, Sukamdi, dan Rofi (2022) menemukan bahwa kelompok pemuda NEET di Indonesia didominasi oleh perempuan, terutama pada kelompok yang tidak bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan. Penelitian Amini dan Aditina (2024) juga menunjukkan bahwa gender merupakan determinan penting dalam menjelaskan kondisi NEET, di mana perempuan memiliki probabilitas lebih tinggi untuk berada di luar pendidikan dan pasar kerja dibandingkan laki-laki. Selain itu, Hardiani et al. (2023) menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan mengalami keterputusan dari pendidikan maupun pekerjaan karena faktor sosial ekonomi dan tanggung jawab keluarga.



Gambar 5. Komposisi Gender NEET
Sumber: Sakernas 2024.

Kondisi tersebut juga dapat dilihat dari karakteristik sosial dan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Data Dinas Pendidikan dalam Laporan Kependudukan (2024), menunjukkan bahwa tingkat melek huruf perempuan di provinsi ini sudah cukup tinggi, yaitu sekitar 97,25%, meskipun masih sedikit lebih rendah dibandingkan

laki-laki yang mencapai 99,12%. Selain itu, angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa partisipasi perempuan relatif baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, faktor sosial seperti praktik perkawinan usia muda masih dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan perempuan. Data kependudukan Bangka Belitung menunjukkan bahwa usia kawin pertama seringkali berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, di mana individu yang menikah pada usia muda cenderung memiliki keterbatasan alternatif kegiatan lain sehingga meninggalkan pendidikan lebih awal. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan perempuan untuk berada di luar pendidikan maupun pasar kerja dan pada akhirnya meningkatkan kemungkinan berada dalam kondisi NEET.

Variabel Pernikahan.

Status perkawinan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi keterlibatan pemuda dalam pendidikan maupun pasar tenaga kerja. Dalam penelitian ini, status menikah berkaitan dengan kecenderungan pemuda berada dalam kondisi NEET. Secara konseptual, pernikahan pada usia muda seringkali mengubah prioritas individu dari pendidikan atau pekerjaan menuju tanggung jawab rumah tangga. Perubahan peran sosial tersebut dapat mengurangi partisipasi pemuda dalam kegiatan pendidikan maupun pasar kerja, terutama ketika individu harus menyesuaikan diri dengan peran baru dalam keluarga.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa status perkawinan merupakan salah satu determinan penting dalam menjelaskan kondisi NEET pada pemuda. Penelitian Hardiani et al. (2023) menunjukkan bahwa pemuda yang telah menikah memiliki peluang lebih besar untuk berada dalam kondisi NEET dibandingkan pemuda yang belum menikah. Hasil serupa juga ditemukan oleh Hidayat et al. (2026) yang

menyatakan bahwa pernikahan pada usia muda dapat meningkatkan kemungkinan individu keluar dari pendidikan maupun pasar tenaga kerja karena meningkatnya tanggung jawab domestik. Selain itu, penelitian mengenai karakteristik pemuda NEET di Indonesia juga menunjukkan bahwa faktor keluarga dan kondisi sosial rumah tangga memiliki peran penting dalam menentukan keterlibatan pemuda dalam pendidikan maupun pekerjaan (Sari, Sukamdi, & Rofi, 2022).



Gambar 6. Tingkat Pendidikan Wanita Menikah Dini.

Sumber: Sari et al., (2017).

Dalam konteks Bangka Belitung, fenomena ini juga berkaitan dengan praktik pernikahan usia dini yang masih ditemukan di wilayah tersebut. Penelitian Sari et al. (2017) menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang menikah dini di Bangka Belitung memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, yaitu tidak sekolah hingga tamat sekolah dasar sekitar 36,7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini seringkali berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan dan berpotensi menghentikan proses pendidikan individu pada usia muda. Selain itu, laporan UNICEF (2016) juga mencatat bahwa sekitar 16% perempuan usia 20 - 24 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menikah sebelum usia 18 tahun.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia muda masih menjadi faktor sosial yang dapat memengaruhi transisi pemuda dari pendidikan menuju pasar kerja dan pada

akhirnya meningkatkan kerentanan terhadap kondisi NEET.

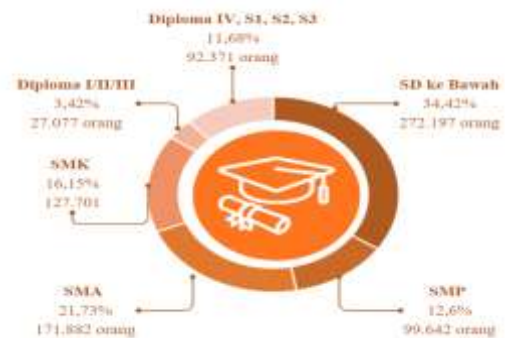
Variabel Pendidikan Tersier.

Secara teoritis, tingkat pendidikan yang lebih tinggi seharusnya meningkatkan peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan karena pendidikan merupakan bentuk investasi dalam modal manusia (human capital) yang meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu di pasar tenaga kerja (Borjas, 2016). Namun dalam konteks Bangka Belitung, hubungan tersebut tidak terlihat signifikan. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa keberadaan pendidikan tinggi belum sepenuhnya menjadi faktor yang mampu melindungi pemuda dari risiko berada dalam status NEET. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karakteristik pasar tenaga kerja daerah yang belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi secara optimal.

Kondisi tersebut juga tercermin pada indikator ketenagakerjaan menurut tingkat pendidikan di Bangka Belitung. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka justru lebih tinggi pada kelompok pendidikan menengah kejuruan dan diploma, yaitu sekitar 6,5 persen pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan kelompok pendidikan dasar (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2026). Temuan ini mengindikasikan adanya potensi skill mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja di daerah. Dalam situasi tersebut, lulusan pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya.

Selain itu, kondisi sistem pendidikan di daerah juga dapat memengaruhi kesiapan pemuda dalam memasuki pasar kerja. Berdasarkan laporan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2023), sektor

pendidikan di provinsi ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta relatif rendahnya partisipasi pada jenjang pendidikan menengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP di wilayah perkotaan mencapai 98,7 persen, sedangkan di wilayah perdesaan hanya sekitar 89,2 persen. Pada jenjang SMA/SMK, APK provinsi ini tercatat sebesar 78,5 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 82,1 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian pemuda di daerah masih menghadapi keterbatasan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.



Gambar 7. Tingkat Pendidikan Kep. Bangka Belitung.

Sumber: BPS Kep. Bangka Belitung (2026).

Tantangan juga terlihat pada sektor pendidikan tinggi di daerah. Universitas Bangka Belitung sebagai institusi pendidikan tinggi utama di provinsi ini masih menghadapi berbagai keterbatasan kapasitas akademik dan fasilitas pendidikan. Proporsi dosen bergelar doktor di universitas tersebut hanya sekitar 23 persen, lebih rendah dibandingkan standar nasional minimal 40 persen. Selain itu, rata-rata publikasi ilmiah per dosen per tahun masih berada pada kisaran 0,8 publikasi, di bawah standar nasional sekitar dua publikasi per tahun. Keterbatasan fasilitas akademik seperti rasio laboratorium terhadap program studi serta koleksi buku perpustakaan yang relatif terbatas juga berpotensi memengaruhi

kualitas pendidikan tinggi yang diterima oleh mahasiswa (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023).

Dengan demikian, tidak signifikannya variabel pendidikan tersier dalam penelitian ini dapat mencerminkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan saja belum cukup untuk menjamin keterlibatan pemuda dalam pendidikan lanjutan maupun pasar tenaga kerja. Selain faktor pendidikan, peluang kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja daerah, kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, serta dinamika ekonomi lokal juga memainkan peran penting dalam menentukan kemungkinan pemuda berada dalam kondisi NEET.

Variabel Disabilitas.

Status disabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi keterlibatan individu dalam pendidikan maupun pasar tenaga kerja. Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksinya dengan lingkungan dapat menghadapi hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan masyarakat (Belitung Satu Data, 2023). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemuda penyandang disabilitas memiliki kecenderungan yang jauh lebih tinggi untuk berada dalam kondisi NEET dibandingkan dengan pemuda tanpa disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas dapat mengurangi peluang mereka untuk terlibat dalam kegiatan produktif seperti pendidikan, pelatihan, maupun pekerjaan.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pasar kerja yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas. Dalam kerangka modal manusia (*human capital*), keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pengembangan keterampilan dapat mengurangi kemampuan individu untuk bersaing dalam

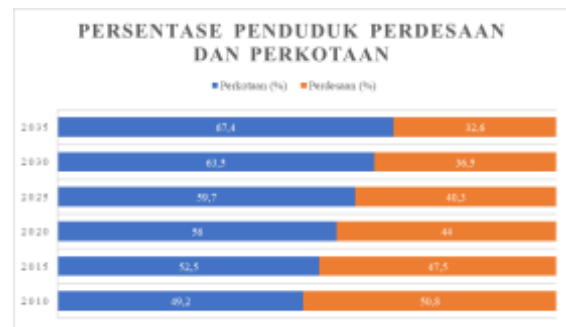
pasar tenaga kerja (Borjas, 2016). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penduduk dengan keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, maupun mental masih cukup banyak dijumpai pada kelompok usia muda di Bangka Belitung. Misalnya, pada kelompok usia 15 - 19 tahun terdapat 279 individu yang mengalami kesulitan mengurus diri sendiri, sementara pada kelompok usia 20 - 24 tahun tercatat sebanyak 193 individu dengan kondisi serupa (BPS, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian pemuda menghadapi hambatan sejak usia sekolah hingga memasuki usia kerja, sehingga dapat memengaruhi proses transisi dari pendidikan menuju pasar kerja dan meningkatkan risiko mereka berada dalam status NEET.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa status disabilitas merupakan salah satu determinan penting dalam menjelaskan kerentanan pemuda terhadap kondisi NEET. Hidayat et al. (2026) menemukan bahwa individu dengan disabilitas memiliki probabilitas lebih tinggi untuk berada dalam kondisi NEET karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Herdiana et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kecenderungan lebih besar untuk berada di luar pasar tenaga kerja maupun sistem pendidikan. Selain itu, studi mengenai karakteristik NEET di Indonesia juga menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan dan ekonomi menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kerentanan pemuda terhadap status NEET (Sari, Sukamdi, & Rofi, 2022). Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang lebih inklusif guna meningkatkan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Variabel Resident Perdesaan dan Perkotaan.

Variabel tempat tinggal (*residence*) dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan pemuda berada dalam status NEET. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbedaan wilayah tempat tinggal, baik di perkotaan maupun perdesaan, tidak secara langsung menentukan peluang pemuda untuk berada di luar pendidikan, pekerjaan, maupun pelatihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan kata lain, kerentanan pemuda terhadap kondisi NEET di wilayah ini relatif tidak berbeda secara signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, sehingga faktor lokasi tempat tinggal bukan menjadi determinan utama dalam menjelaskan fenomena NEET di daerah tersebut.

Secara teoritis, lokasi tempat tinggal sering dikaitkan dengan perbedaan akses terhadap pendidikan, pelatihan, serta peluang kerja. Wilayah perkotaan umumnya memiliki konsentrasi aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, infrastruktur yang lebih baik, serta akses yang lebih luas terhadap lembaga pendidikan maupun pasar tenaga kerja dibandingkan wilayah perdesaan (Borjas, 2016). Oleh karena itu, dalam banyak penelitian, pemuda yang tinggal di wilayah perdesaan cenderung memiliki risiko lebih besar untuk berada dalam kondisi NEET. Misalnya, penelitian Amini dan Aditina (2024) menunjukkan bahwa pemuda yang tinggal di wilayah perdesaan memiliki peluang lebih tinggi untuk berada dalam status NEET dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Temuan serupa juga diungkapkan dalam studi mengenai determinan NEET di Indonesia yang menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendidikan dan kesempatan kerja di wilayah perdesaan dapat meningkatkan kerentanan pemuda terhadap kondisi NEET (Hidayat et al., 2026).



Gambar 8. Persentase Penduduk Perdesaan dan Perkotaan Kep. Bangka Belitung.

Sumber: BPS (2020).

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan dengan beberapa penelitian tersebut. Tidak signifikannya variabel tempat tinggal dalam penelitian ini dapat mencerminkan karakteristik wilayah Bangka Belitung yang relatif kecil serta keterhubungan antarwilayah yang cukup baik. Kondisi ini memungkinkan mobilitas penduduk antarwilayah berlangsung lebih mudah sehingga pemuda yang tinggal di wilayah perdesaan masih memiliki akses terhadap pendidikan maupun peluang kerja yang berada di pusat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, perbedaan desa dan kota tidak menjadi faktor yang secara signifikan membedakan kemungkinan pemuda berada dalam kondisi NEET di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Variabel Usia.



Gambar 9. Piramida Penduduk Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Sumber: Siperindu (2026).

Variabel usia dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan pemuda berada dalam kondisi NEET. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam rentang usia pemuda, perbedaan umur tidak secara langsung menentukan apakah seseorang berada di luar pendidikan, pekerjaan, maupun pelatihan. Meskipun demikian, secara konseptual usia muda merupakan fase transisi yang kritis dari pendidikan menuju pasar kerja. Pada fase ini, individu menghadapi berbagai perubahan dalam pendidikan maupun pekerjaan sehingga lebih rentan mengalami keterputusan dari kedua sistem tersebut (Uthayakumar et al., 2010). Oleh karena itu, meskipun usia tidak signifikan dalam model penelitian ini, dinamika transisi pendidikan ke dunia kerja tetap menjadi aspek penting dalam memahami fenomena NEET pada pemuda.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa usia tidak selalu menjadi determinan utama dalam menjelaskan status NEET. Sari, Sukamdi, dan Rofi (2022) menemukan bahwa karakteristik NEET di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi seperti gender, pendidikan, dan kondisi rumah tangga dibandingkan dengan perbedaan usia dalam kelompok pemuda. Selain itu, penelitian mengenai determinan NEET di beberapa wilayah Indonesia juga menunjukkan bahwa faktor-faktor struktural seperti kesempatan kerja dan kondisi sosial ekonomi lebih berperan dibandingkan perbedaan umur dalam kelompok pemuda (Herdiana et al., 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa usia seringkali berperan sebagai variabel yang berkaitan dengan proses transisi, tetapi bukan faktor yang secara langsung menentukan status NEET.

Kondisi tersebut juga tercermin pada dinamika pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 27,31%

penduduk usia 16 - 18 tahun yang tidak bersekolah lagi, sedangkan pada kelompok usia 19–23 tahun persentasenya meningkat hingga 80,10% (BPS, Susenas 2024). Selain itu, struktur demografi daerah juga menunjukkan jumlah pemuda yang cukup besar, yaitu sekitar 124,2 ribu penduduk usia 15 - 19 tahun dan 126,7 ribu penduduk usia 20 - 24 tahun pada tahun 2026 (BPS, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda pada usia awal dewasa telah keluar dari sistem pendidikan formal dan memasuki fase transisi menuju pasar kerja. Apabila proses transisi tersebut tidak berjalan dengan optimal, maka pemuda berpotensi berada dalam kondisi NEET meskipun faktor usia itu sendiri tidak menjadi determinan utama dalam model penelitian ini.

Kesimpulan dan Saran.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pemuda berstatus *Not in Employment, Education, or Training* (NEET) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki pola sosiodemografis tertentu. Secara umum, pemuda NEET lebih banyak ditemukan pada kelompok perempuan, berstatus belum menikah, tidak memiliki disabilitas, berpendidikan di bawah diploma atau sarjana, serta sedikit lebih banyak tinggal di wilayah perdesaan. Dari sisi usia, sebagian besar pemuda NEET berada pada kelompok usia 20 - 24 tahun yang merupakan fase transisi dari pendidikan menuju dunia kerja.

Hasil analisis regresi logistik biner menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin, status perkawinan, dan status disabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan pemuda berada dalam kondisi NEET di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perempuan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk berada dalam kondisi NEET dibandingkan laki-laki. Selain itu, pemuda yang telah menikah juga memiliki peluang lebih besar

untuk berada dalam kondisi NEET dibandingkan dengan pemuda yang belum menikah. Penyandang disabilitas juga menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk berada dalam kondisi NEET dibandingkan dengan pemuda yang tidak memiliki disabilitas. Sementara itu, variabel pendidikan tinggi, tempat tinggal, dan usia tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model penelitian ini.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan karakteristik individu memiliki peran penting dalam menjelaskan fenomena NEET di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerentanan pemuda terhadap status NEET tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial seperti peran gender, tanggung jawab keluarga, serta keterbatasan akses yang dialami oleh kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih terarah untuk mengurangi proporsi pemuda yang berada dalam kondisi NEET. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan program pelatihan keterampilan dan peningkatan kesempatan kerja yang lebih inklusif bagi pemuda, khususnya bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Selain itu, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga perlu diarahkan pada kelompok pemuda yang berada pada fase transisi dari pendidikan menuju pasar kerja agar mereka dapat lebih siap dalam menghadapi dinamika pasar tenaga kerja.

Di sisi lain, upaya pencegahan perkawinan usia dini juga perlu diperkuat karena praktik tersebut dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan serta partisipasi pemuda dalam pasar tenaga kerja. Pemerintah daerah juga dapat memperkuat program pelatihan kewirausahaan, pendidikan vokasi, serta program

pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal agar pemuda memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan produktif.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan pendekatan analisis yang digunakan. Model regresi logistik biner yang diterapkan menganalisis variabel secara terpisah pada tingkat individu. Pendekatan ini belum sepenuhnya mampu menggambarkan karakteristik pemuda NEET secara lebih kompleks yang dapat terbentuk dari kombinasi berbagai faktor sosiodemografis secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan analisis yang lebih komprehensif, seperti model *multilevel*, sehingga dapat mengidentifikasi karakteristik pemuda NEET secara lebih spesifik melalui interaksi berbagai faktor yang memengaruhinya.

E. Penutup.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai karakteristik sosiodemografis pemuda yang berada dalam kondisi *Not in Employment, Education, or Training* (NEET) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu seperti jenis kelamin, status perkawinan, dan kondisi disabilitas memiliki peran penting dalam menjelaskan kerentanan pemuda terhadap status NEET. Temuan ini menegaskan bahwa upaya pengurangan proporsi pemuda NEET tidak hanya memerlukan perluasan kesempatan kerja, tetapi juga pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik sosial dan kondisi khusus kelompok pemuda. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan kebijakan pembangunan sumber daya manusia di daerah dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dalam mendukung partisipasi pemuda dalam pendidikan, pelatihan, maupun pasar tenaga kerja.

Daftar Pustaka.

- Amini, A. F., & Aditina, N. (2024). Youth not in employment, education or training (NEET): Evidence from National Labor Force Survey 2018. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 8(2), 159–182. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v8i2.159-182>
- Anggraini, C., & Taifur, W. D. (2020). Phenomenon and determinant characteristics of NEET (not in employment, education or training) youth in matrilineal province. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 7(4).
- Backman, O., & Nilsson, A. (2016). Long-term consequences of being not in employment, education or training as a young adult: Stability and change in three Swedish birth cohorts. *European Societies*, 18(2), 136–157.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024.
- BPS. (2020, September 17). *Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Hasil Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2015 - 2035*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTI3NiMx/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-hasil-proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2015---2035.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk domestik regional bruto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha 2020–2024*. <https://babel.bps.go.id/id/publication/2025/04/11/90f654cc382aef8ba465cf31/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-menurut-lapangan-usaha-2020-2024.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2026). *Berita resmi statistik*.
- Balan, M., Uzla, C. M., & Ene, C. M. (2012). Evolutions of unemployment among the young over the economic and financial downturn. *Annales Universitatis Apulensis: Series Oeconomica*, 14(1), 193.
- Bappenas. (2019). *Indonesia 2045 berdaulat, maju, adil, dan makmur*. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf
- Borjas, G. J. (2016). *Labor Economics*, Seventh Edition.
- Citra, H. (2022). Faktor-Faktor Penyumbang NEET di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 17-30.
- Coles, B., Hutton, S., Bradshaw, J., Craig, G., Godfrey, C., & Johnson, J. (2002). *Literature review of the costs of being “not in education, employment or training” at age 16–18*.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2025). *Profil kependudukan tahun 2024*. <https://dp3acskb.babelprov.go.id/sites/default/files/publikasi/PROFIL%20KEPENDUDUKAN%202024.pdf>
- Dwi, O., & Setyodhono, S. (2019). Analisis tenaga kerja muda tanpa kegiatan (not in education, employment or training–NEET) berdasarkan status perkawinan. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 14(1).

- Eurofound. (2012). *NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe*. European Union.
- Febryanna, S. (2022). Pola karakteristik NEET dan pengaruh pengetahuan pemuda tentang program kartu prakerja terhadap status NEET di masa pandemi COVID-19. *Seminar Nasional Official Statistics*, 1, 11–20. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1113>
- Hammer, T. (2007). Labour market integration of unemployed youth from a life course perspective: The case of Norway. *International Journal of Social Welfare*, 16(3), 249–257.
- Hardiani, H., Yulmardi, Y., & Maisyarah, N. D. (2023). Exploring the determinants of NEET youth in Jambi Province: A socioeconomic perspective. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 31–44. <https://doi.org/10.22437/ppd.v11i1.22074>
- Herdiana, A., Wijayanto, A. W., & Watekhi. (2024). Karakteristik sosiodemografi dan faktor penyebab generasi muda NEET di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.359>
- Hidayat, R., Dawood, T. C., & Abrar, M. (2026). Sociodemographic determinants of youth NEET in Indonesia. *Grimsa Journal of Business and Economics Studies*, 3(1), 57–71. <https://doi.org/10.61975/gjbes.v3i1.110>
- Hogan, D. P., & Astone, N. M. (1986). The transition to adulthood. *Annual Review of Sociology*, 12(1), 109–130.
- Hosmer, D. W., Jovanovic, B., & Lemeshow, S. (1989). Best subsets logistic regression. *Biometrics*, 1265–1270.
- Isbah, M. F. (2025). Understanding Young People not in Employment, Education or Training in Indonesia: Gendered Transition in the Changing Cultural Context. 10.1177/11033088251345645.
- Kovrova, I., & Lyon, S. (2013). *NEET youth dynamics in Indonesia and Brazil: A cohort analysis*. Understanding Children's Work (UCW) Working Paper Series.
- LPMP Universitas Bangka Belitung. (2024). *Indikator pendidikan Provinsi Bangka Belitung tahun 2024*. <https://lpmp.ubb.ac.id/artikel/Upaya-Peningkatan-Mutu-Pendidikan-di-Bangka-Belitung-dan-Universitas-Bangka-Belitung>
- Naraswati, N. P. G., & Jatmiko, Y. A. (2021). Individual and province-level determinants of unemployed NEET as young people's productivity indicator in Indonesia during 2020: A multilevel analysis approach. *The 1st International Conference on Data Science and Official Statistics*, 1, 782–795.
- Ningrum. (2023, October 4). Mengenal konsep dasar ketenagakerjaan BPS. <https://brebeskab.bps.go.id/id/news/2023/10/04/635/mengenal-konsep-dasar-ketenagakerjaan-bps.html>
- Quintini, G., & Martin, S. (2006). *Starting well or losing their way? The position of youth in the labour market in OECD countries*. OECD.
- Sari, D. N., & Ahmad, I. (2021). Analisis not in employment, education or training (NEET) pada usia muda di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(2). <https://doi.org/10.47198/naker.v16i2.95>
- Sari, N. R., Sukamdi, S., & Rofi, A. (2022). Distribusi dan karakteristik pemuda NEET di Indonesia (analisis data Sakernas 2018). *Majalah Geografi Indonesia*, 36(2), 103. <https://doi.org/10.22146/mgi.59391>
- Siperindu. (2026). *Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Retrieved from Siperindu Online: <https://siperindu.online/piramida/>
- Suryani, N. V., & Putri, A. K. (2020). Tren laju pertumbuhan penduduk dan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Holistic Journal of Management Research*, 1, 27–38.

- Syaputra, E., Vera, L. O., Syafitri, E., Rabsa, N., & Ningsih, R. A. (2025). Fluktuasi tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022–2024. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3, 330–335. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i5.4710>
- UNICEF. (2016). *Profil singkat provinsi: Kepulauan Bangka Belitung*. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2019-06/Bahasa%20Bangka%20Belitung%20lowres2.pdf>
- Uthayakumar, R., Schimmack, U., Hartung, P. J., & Rogers, J. R. (2010). Career decidedness as a predictor of subjective well-being. *Journal of Vocational Behavior*, 77(2), 196–204.
- Vasile, V., & Vasile, L. (2011). Youth on labour market: Features, particularities, pro-mobility factors for graduates. Elements of a balanced policy for labour migration. *Romanian Journal of Economics*, 32(1), 97–123.
- Yefita Febria, A., Ibrahim, A., & Kamarni, N. (2022). Faktor yang mempengaruhi NEET pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3).
- Zoraya, E., & Wulandari, M. D. (2020). Karakteristik kaum muda pada pasar tenaga kerja dan determinan NEET di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 4(2), 12. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i2.144>
-

MELAMPAUI KOMPETENSI TEKNIS: INTEGRASI *HIGH ORDER THINKING SKILLS* (HOTS) DAN *CULTURAL INTELLIGENCE* (CQ) UNTUK MENGATASI DEHUMANISASI PELAYANAN PUBLIK

Beyond Technical Competence: Integrating Higher Order Thinking Skills (HOTS) and Cultural Intelligence (CQ) to Overcome Public Service Dehumanization

Wulan Agustri Ayu
(MTsN 1 Kabupaten Malang)
e-mail: wulanagustriayu@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan kualifikasi akademik Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia ternyata menyisakan paradoks kinerja yang serius. Meskipun Indeks Profesionalitas ASN terus membaik, data Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024 justru mencatat lonjakan aduan masyarakat sebesar 28%, yang didominasi oleh maladministrasi berupa penundaan berlarut (*undue delay*). Fenomena ini mengindikasikan terjadinya dehumanisasi pelayanan publik, di mana birokrasi terjebak dalam rutinitas administratif yang kaku (*administrative trap*) sehingga kehilangan responsivitas dan empati terhadap masalah warga. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi model pengembangan kompetensi aparatur guna mengatasi kesenjangan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) deskriptif-kualitatif, tulisan ini membedah patologi birokrasi melalui perspektif teori disfungsi birokrasi dan andragogi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelatihan teknis semata tidak lagi memadai. Artikel ini menawarkan model pembelajaran andragogi hibrida yang mengintegrasikan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*/HOTS) untuk membangun nalar kritis dalam memecahkan masalah regulasi, serta kecerdasan budaya (*Cultural Intelligence*/CQ) untuk menanamkan nilai kearifan lokal dalam interaksi layanan. Sinergi antara ketajaman nalar dan kehalusan rasa ini diharapkan mampu mencetak ASN yang tidak hanya kompeten secara administratif, tetapi juga responsif, solutif, dan memanusiakan pelayanan.

Kata Kunci: Pengembangan Kompetensi ASN, Andragogi, *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), *Cultural Intelligence*, Dehumanisasi Pelayanan Publik.

ABSTRACT

The improvement of Civil Servants' (ASN) academic qualifications in Indonesia has revealed a serious performance paradox. Despite the increasing ASN Professionalism Index, data from the Ombudsman of the Republic of Indonesia in 2024 recorded a 28% surge in public complaints, dominated by maladministration in the form of undue delay. This phenomenon indicates the dehumanization of public services, where the bureaucracy is trapped in rigid administrative routines (administrative trap), thereby losing responsiveness and empathy towards citizens' problems. This article aims to reconstruct the apparatus competency development model to bridge this gap. Using a descriptive-qualitative library research method, this study dissects bureaucratic pathologies through the perspectives of bureaucratic dysfunction and andragogy theories. The analysis shows that technical training alone is no longer sufficient. This article proposes a hybrid andragogy learning model that integrates Higher Order Thinking Skills (HOTS) to build critical reasoning in solving regulatory problems, and Cultural Intelligence (CQ) to embed local wisdom values in service interactions. The synergy between critical reasoning and cultural empathy is expected to produce civil servants who are not only administratively competent but also responsive, solution-oriented, and able to humanize public services.

Keywords: ASN Competency Development, Andragogy, *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), *Cultural Intelligence*, Public Service Dehumanization.

A. Pendahuluan

Dalam lanskap administrasi publik global, diskursus mengenai reformasi birokrasi telah bergeser dari sekadar efisiensi prosedural menuju paradigma *Human Capital Management* (HCM). Tuntutan era *Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity* (VUCA) memaksa setiap organisasi pemerintah untuk memiliki SDM yang tidak hanya patuh pada aturan (*rule-based*), tetapi juga adaptif dan berkinerja tinggi atau *performance-based* (Schwab, 2016; World Economic Forum, 2020). Sejalan dengan visi "Indonesia Emas 2045", pemerintah secara agresif mendorong transformasi kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mencapai standar birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*). Upaya ini tercermin dari masifnya program pengembangan kompetensi dan digitalisasi layanan yang menjadi indikator utama kinerja instansi (KemenPANRB, 2023).

Secara statistik, profil kualifikasi ASN di Indonesia menunjukkan tren positif yang signifikan. Merujuk pada *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2024*, demografi birokrasi kini didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan tinggi, baik Sarjana maupun Pascasarjana (BKN, 2024). Peningkatan kualifikasi formal ini berkontribusi langsung pada kenaikan Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) di berbagai daerah, yang mayoritas kini berada dalam kategori "Baik" hingga "Sangat Baik". Secara umum, data ini mengonstruksi optimisme bahwa mesin birokrasi kita telah diawaki oleh kaum intelektual yang kompeten.

Namun, postur akademik yang mentereng tersebut seolah runtuh ketika dibenturkan dengan realitas empiris terkait kepuasan publik. Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024 menyingkap sebuah anomali atau paradoks kinerja yang meresahkan. Alih-alih menurun seiring dengan meningkatnya

level pendidikan ASN, jumlah aduan masyarakat justru mengalami lonjakan tajam. Ombudsman RI mencatat penerimaan 10.846 aduan sepanjang tahun 2024, meningkat sebesar 28% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 8.452 aduan (Ombudsman RI, 2025). Lonjakan drastis ini menjadi indikator keras (*hard evidence*) bahwa kompetensi formal belum terkonversi menjadi kualitas layanan yang dirasakan manfaatnya oleh publik.

Lebih lanjut, bedah data Ombudsman memperlihatkan fakta yang menohok bagi pemerintah daerah. Institusi Pemerintah Daerah (Pemda) menempati urutan pertama sebagai instansi terlapor dengan proporsi mencapai 45,88% (Ombudsman RI, 2025). Angka ini jauh melampaui aduan terhadap kementerian atau lembaga negara lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa titik lelah birokrasi (*bureaucratic fatigue*) justru terjadi di garda terdepan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehari-hari (Lipsky, 2010).

Analisis terhadap jenis maladministrasi memberikan gambaran diagnostik yang lebih dalam. Masalah utama yang dilaporkan bukanlah korupsi transaksional kasar, melainkan "Penundaan Berlarut" (*Undue Delay*) yang mendominasi sebesar 33,86%, disusul oleh "Tidak Memberikan Pelayanan" sebesar 30,31% (Ombudsman RI, 2025). Tingginya angka penundaan berlarut di tengah dominasi ASN berpendidikan tinggi adalah sebuah ironi. Fenomena ini mengkonfirmasi teori klasik tentang *Bureaucratic Dysfunction* atau disfungsi birokrasi, di mana kepatuhan kaku terhadap aturan (*rigid adherence to rules*) justru menghambat tujuan utama organisasi yaitu pelayanan publik (Merton, 1940).

Dalam perspektif sosiologi organisasi, fenomena ini dapat dijelaskan sebagai bentuk *Goal Displacement*. Aparatur pemerintah seringkali terjebak menjadikan prosedur administratif sebagai tujuan akhir,

melupakan bahwa prosedur hanyalah alat untuk melayani warga (Etzioni, 1964). Ketika dihadapkan pada masalah warga yang kompleks dan tidak tekstual, ASN yang terbiasa berpikir linier cenderung mengalami kelumpuhan keputusan (*decision paralysis*). Mereka memilih menunda atau menolak layanan demi "keamanan administratif" daripada mengambil diskresi yang solutif.

Kondisi ini diperparah oleh apa yang disebut George Ritzer sebagai *The McDonaldization of Society* yang merambah sektor publik. Birokrasi mengejar efisiensi, kalkulabilitas, dan prediktabilitas melalui sistem aplikasi digital, namun kehilangan elemen *irrationality of rationality*, di mana sistem yang terlalu rasional justru menjadi tidak manusiawi bagi penggunaanya (Ritzer, 2015). Warga masyarakat seringkali merasa berhadapan dengan tembok birokrasi yang dingin, kaku, dan tanpa empati. Inilah gejala dehumanisasi pelayanan publik, di mana warga tidak lagi dipandang sebagai subjek manusia yang bermartabat, melainkan objek data yang harus disesuaikan dengan kolom aplikasi (Haque, 2019).

Kegagalan responsivitas ini tidak dapat dilepaskan dari pola pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparatur yang masih konvensional. Selama ini, kurikulum pengembangan SDM aparatur masih terlalu berat pada aspek kognitif level rendah (*Low Order Thinking Skills*) dan pemahaman regulasi teknis. Mengacu pada Taksonomi Bloom revisi, pelatihan ASN seringkali berhenti pada level C1 (Mengingat aturan), C2 (Memahami prosedur), dan C3 (Menerapkan aplikasi) (Anderson & Krathwohl, 2001). Padahal, tantangan masalah publik membutuhkan kemampuan C4 (Menganalisis), C5 (Mengevaluasi), dan C6 (Mencipta solusi).

Absennya kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) dalam kurikulum andragogi

aparatur menyebabkan ASN miskin nalar kritis. Mereka menjadi pelaksana juknis yang handal, tetapi gagap ketika harus melakukan inovasi atau pemecahan masalah (*problem solving*) di luar skenario standar. Padahal, dalam teori Andragogi, pembelajar dewasa membutuhkan pendekatan yang berpusat pada masalah (*problem-centered*), bukan sekadar menghafal materi (*subject-centered*) (Knowles, 1984).

Selain defisit nalar kritis, birokrasi kita juga mengalami defisit kepekaan budaya. Digitalisasi dan standarisasi layanan nasional seringkali mencabut layanan publik dari akar sosiologis masyarakat setempat. Christopher Earley dan Soon Ang memperkenalkan konsep *Cultural Intelligence* (CQ) atau kecerdasan budaya sebagai kemampuan vital untuk berfungsi efektif dalam situasi yang beragam secara budaya (Earley & Ang, 2003). Sayangnya, aspek ini sering absen dalam pelatihan teknis ASN. Akibatnya, terjadi kesenjangan budaya (*cultural lag*) di mana petugas melayani warga desa dengan gaya komunikasi birokrat kota yang elitis, menciptakan jarak psikologis dan resistensi masyarakat (Ogburn, 1957; Dwiyanto, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah banyak membahas kinerja pelayanan publik, namun masih memiliki celah (*gap*) yang signifikan. Studi literatur dalam ranah administrasi publik di Indonesia, seperti karya Sedarmayanti (2017) dan Prasjo (2020), telah banyak menyoroti pentingnya manajemen SDM dan reformasi struktural. Namun, diskursus yang ada seringkali lebih berat pada aspek kedisiplinan (kinerja berbasis tunjangan) dan digitalisasi sistem (E-Gov). Kajian lain yang membahas budaya organisasi cenderung melihat budaya kerja internal (seperti disiplin waktu), dan belum banyak yang mengaitkan kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai basis etika pelayanan eksternal (sinambela, 2021). Masih terdapat

kelangkaan literatur (*gap*) yang secara spesifik menawarkan model integrasi antara kemampuan kognitif kritis (*HOTS*) dengan nilai kearifan lokal (*Cultural Intelligence*) sebagai satu kesatuan kompetensi pelayanan.

Disinilah letak kebaruan (*novelty*) dan urgensi dari artikel ini. Tulisan ini bermaksud mengisi kekosongan literatur tersebut dengan menawarkan sebuah pendekatan andragogi hibrida. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mencetak ASN yang "pintar" secara teknis, tetapi juga "bijak" secara kontekstual. Peningkatan kualitas SDM dan budaya daerah, sebagaimana menjadi fokus kajian ini, diyakini sebagai kunci untuk memutus mata rantai penundaan berlarut dan dehumanisasi layanan.

Melalui integrasi *High Order Thinking Skills* (*HOTS*), ASN dilatih untuk memiliki fleksibilitas kognitif dalam membedah masalah. Sementara melalui internalisasi budaya daerah, ASN dibekali kompas moral untuk melayani dengan hati. Sinergi antara "Kepala" (Nalar Kritis) dan "Hati" (Budaya) inilah yang akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya andal dan terpercaya, tetapi juga humanis dan responsif.

Oleh karena itu, artikel ini akan membedah secara mendalam bagaimana strategi penguatan kompetensi aparatur yang melampaui standar administratif. Fokus pembahasan akan diarahkan pada rekonstruksi model pembelajaran bagi ASN secara umum, agar mampu menjawab tantangan lonjakan aduan masyarakat dan mewujudkan birokrasi yang benar-benar hadir sebagai solusi, bukan sebagai masalah baru bagi warga negara.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini dipilih untuk

membedah fenomena kesenjangan kinerja pelayanan publik melalui sintesis data sekunder dan kajian teoritis yang mendalam. Sumber data utama diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, yakni Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024 dan Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2024 (BKN). Data-data statistik tersebut diposisikan sebagai data primer untuk memetakan kondisi faktual kinerja ASN.

Selain data statistik, artikel ini juga menggali literatur ilmiah berupa buku teks (*textbooks*) dan artikel jurnal bereputasi yang relevan dengan topik andragogi, manajemen sumber daya manusia sektor publik, dan sosiologi organisasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (1) Reduksi Data, dengan menyeleksi data statistik maladministrasi yang relevan; (2) Penyajian Data, dengan menyandingkan paradoks antara kualifikasi akademik ASN dan keluhan publik; serta (3) Penarikan Kesimpulan, dengan merekonstruksi model pembelajaran berbasis *High Order Thinking Skills* (*HOTS*) dan *Cultural Intelligence* (*CQ*) sebagai solusi alternatif.

C. Kerangka Teori

Berikut adalah versi naskah **Kajian Teori** yang telah dipangkas secara presisi menjadi sekitar **1.500 kata**.

Saya telah mempertahankan **gaya bahasa akademis, struktur argumen**, dan memastikan **seluruh sitasi** tetap ada pada tempatnya sesuai permintaan.

Untuk menganalisis fenomena stagnasi kualitas pelayanan publik di tengah peningkatan kualifikasi aparatur, artikel ini menggunakan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan sosiologi organisasi, pendidikan orang dewasa, psikologi kognitif, dan manajemen lintas budaya. Berikut adalah elaborasi mendalam dari empat pilar teoretis utama yang digunakan.

1. Teori Disfungsi Birokrasi (*Bureaucratic Dysfunction*).

Konsep birokrasi diperkenalkan oleh Max Weber sebagai tipe ideal (*ideal type*) organisasi rasional yang paling efisien karena didasarkan pada hierarki, aturan tertulis, spesialisasi, dan impersonalitas (Weber, 1947; Blau & Meyer, 1987). Dalam pandangan Weberian, rasionalitas formal adalah kunci untuk menjamin kepastian layanan (Ritzer, 2019). Namun, Weber menyadari potensi "sangkar besi" (*iron cage*) di mana sistem aturan justru menindas kreativitas (Weber, 1947).

Kritik tajam datang dari Robert K. Merton melalui konsep disfungsi birokrasi (*bureaucratic dysfunction*), di mana penekanan berlebih pada reliabilitas aturan memicu konsekuensi yang tidak diharapkan (*unintended consequences*) (Merton, 1940; Merton, 1957). Fenomena sentralnya adalah pergeseran tujuan (*goal displacement*), di mana kepatuhan prosedur berubah menjadi tujuan akhir (Etzioni, 1964). Akibatnya, muncul perilaku ritualisme birokrasi (*bureaucratic ritualism*), yaitu kepatuhan buta terhadap aturan yang menghambat pelayanan (Blau & Meyer, 1987). Sikap ini bermanifestasi sebagai kekakuan (*rigidity*) yang menjelaskan dominasi aduan "penundaan berlarut" di Indonesia, karena pegawai takut mengambil keputusan di luar teks prosedur (Lipsky, 2010; Dwiyanto, 2021).

Lebih lanjut, impersonalitas bermutasi menjadi ketidakpedulian (*indifference*) (Ritzer, 2019). Hubungan birokrat-warga menjadi transaksional tanpa ruang empati (Hummel, 2007). Birokrat memandang warga sebagai nomor antrean, menciptakan jarak psikologis yang berujung pada delegitimasi institusi (Lipsky, 2010; Prasajo, 2020).

Analisis level operasional diperdalam oleh Michael Lipsky melalui teori *Street-Level Bureaucracy*. Birokrat tingkat bawah adalah pembuat kebijakan de facto (*de facto policymakers*) (Lipsky, 2010). Namun,

akibat tekanan tinggi dan keterbatasan sumber daya, mereka mengembangkan mekanisme pertahanan diri berupa rutinisasi dan penyederhanaan masalah (*simplification*) (Evans, 2010). Konsekuensinya adalah praktik *creaming* atau memilih kasus mudah dan mengabaikan kasus rumit (Tummers et al., 2015). Perilaku ini menunjukkan kegagalan orientasi pelayanan (*service orientation failure*), menjadikan birokrasi mesin yang melayani dirinya sendiri (*self-serving*) (Denhardt & Denhardt, 2007; Dwiyanto, 2021).

George Ritzer menambahkan dimensi kritik melalui *The McDonaldization of Society* yang merambah sektor publik dengan empat dimensi irasionalitas: efisiensi, kalkulabilitas, prediktabilitas, dan kontrol teknologi (Ritzer, 2019). Pengejaran efisiensi sering mengorbankan kualitas interaksi manusia (Smart, 1999). Dimensi kalkulabilitas menekankan kuantitas laporan di atas dampak sosial, mendorong budaya "asal bapak senang" (Sedarmayanti, 2017; Prasajo, 2020). Sementara kontrol teknologi menjadikan manusia budak algoritma; saat sistem gangguan, pelayanan terhenti tanpa opsi manual (Schwab, 2016; Ombudsman RI, 2025).

Secara akumulatif, teori-teori ini memberikan kerangka diagnostik bahwa masalah kinerja ASN adalah masalah struktural dan kultural yang mengakar (Dwiyanto, 2021; Prasajo, 2020). Sistem berbasis ketidakpercayaan (*distrust*) melahirkan pegawai pasif, sehingga reformasi harus menyentuh paradigma berpikir aparatur (Merton, 1957; Sedarmayanti, 2017).

2. Teori Andragogi (*Adult Learning Theory*).

Pendekatan pedagogi dinilai tidak lagi relevan bagi ASN (Knowles, 1984). Malcolm Knowles mendefinisikan andragogi sebagai seni membantu orang dewasa belajar, dengan premis bahwa orang

dewasa memiliki kebutuhan belajar fundamental yang berbeda dari anak-anak (Knowles et al., 2005; Merriam & Caffarella, 1999). Knowles mengidentifikasi enam asumsi pokok landasan diklat aparatur.

Pertama, konsep diri (*the need to know*). Orang dewasa perlu mengetahui alasan mempelajari sesuatu. Jika fasilitator gagal menjelaskan relevansi materi dengan tugas ("*the why*"), motivasi belajar ASN akan rendah (Knowles et al., 2005; Noe, 2017; Wlodkowski, 2008). *Kedua*, kemandirian konsep diri (*self-concept*). Metode instruktif satu arah sering memicu resistensi karena ASN merasa kapasitas intelektualnya tidak dihargai (Rogers, 1969; Knowles, 1984; Merriam, 2001).

Ketiga, peran pengalaman (*the role of experience*). Pengalaman adalah sumber belajar terkaya (Kolb, 1984). Pelatihan efektif harus memvalidasi pengalaman kerja ASN sebagai basis refleksi, bukan menganggap peserta gelas kosong (Jarvis, 2004). *Keempat*, kesiapan belajar (*readiness to learn*). ASN siap belajar saat menghadapi tantangan nyata pekerjaan, sehingga kurikulum harus sinkron dengan kebutuhan organisasi (Havighurst, 1972; Knowles et al., 2005; Noe, 2017).

Kelima, orientasi belajar (*orientation to learning*). Orang dewasa berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-centered*), bukan penguasaan materi (*subject-centered*) (Mezirow, 1991). Implikasinya, *Problem-Based Learning* (PBL) lebih efektif daripada ceramah teoretis (Knowles, 1984; Barrows, 1996). *Keenam*, motivasi (*motivation*). Motivator terkuat berasal dari faktor internal seperti kepuasan kerja dan harga diri, yang menjamin keberlanjutan hasil belajar (Wlodkowski, 2008; Knowles et al., 2005; Merriam & Caffarella, 1999).

Penerapan andragogi menuntut pergeseran peran widyaiswara menjadi fasilitator yang menciptakan iklim demokratis, di mana kesalahan adalah

peluang belajar (Brookfield, 1986; Rogers, 1969; Marsick & Watkins, 1990). Namun, budaya birokrasi feodal menjadi tantangan karena mematikan diskusi kritis (Prasojo, 2020; Sedarmayanti, 2017). Maka, andragogi adalah intervensi budaya untuk mendemokratisasi proses berpikir (Mezirow, 2000). Kesimpulannya, peningkatan kualitas SDM memerlukan proses dialogis yang menghargai otonomi ASN (Knowles, 1984; Merriam, 2001).

3. Taksonomi Berpikir Tingkat Tinggi (*High Order Thinking Skills/HOTS*).

Kompleksitas era VUCA menuntut kompetensi kognitif melampaui dasar (Schwab, 2016). Kerangka analisis menggunakan Taksonomi Bloom revisi Anderson & Krathwohl (2001) yang memetakan kognisi dari tingkat rendah (*LOTS*) ke tinggi (*HOTS*) (Krathwohl, 2002).

Level *LOTS* mencakup: Mengingat (*C1*), setara menghafal SOP; Memahami (*C2*), mengkonstruksi makna; dan Menerapkan (*C3*), menggunakan prosedur (Anderson & Krathwohl, 2001; Sedarmayanti, 2017; Mayer, 2002). Mayoritas pelatihan ASN masih berfokus pada domain ini, mencetak pegawai pasif (Prasojo, 2020). Padahal, masalah publik yang *ill-structured* membutuhkan *HOTS*, dimulai dari Menganalisis (*C4*) (Simon, 1973).

Kemampuan Menganalisis (*C4*) memungkinkan diagnosis akar masalah struktural, bukan sekadar gejala, untuk mencegah inefisiensi kebijakan (Anderson & Krathwohl, 2001; Brookhart, 2010; Dwiyanto, 2021; Dunn, 2015). Level Mengevaluasi (*C5*) mencakup penilaian kritis (*judgments*) terhadap efektivitas layanan, kunci perbaikan berkelanjutan (Krathwohl, 2002; Sedarmayanti, 2017; Deming, 1986). Puncaknya, Mencipta (*C6*), adalah kemampuan merancang solusi baru (inovasi) untuk mengatasi kebuntuan birokrasi (Anderson & Krathwohl, 2001;

Mulgan, 2007; Prasajo, 2020).

HOTS didukung teori *Transfer of Learning* dan *Critical Thinking*. Kemampuan ini vital bagi rotasi jabatan dinamis dan pengambilan keputusan (*decision making*) yang objektif, bebas bias emosional (Perkins & Salomon, 1992; BKN, 2024; Sternberg, 1997; Ennis, 1985; Simon, 1976; Kahneman, 2011). Integrasi HOTS relevan dengan *Agile Governance*, mencetak SDM *fast learner* yang mampu bertahan dalam turbulensi global (Mergel et al., 2018; Toffler, 1970; Schwab, 2016). Singkatnya, HOTS mentransformasi ASN dari "tukang stempel" menjadi "arsitek solusi" (Anderson & Krathwohl, 2001).

4. Teori Kecerdasan Budaya (*Cultural Intelligence*).

Kompetensi teknis tidak cukup menjamin layanan prima dalam masyarakat plural (Dwiyanto, 2021). Diperlukan *Cultural Intelligence* (CQ), kemampuan berfungsi efektif dalam keragaman budaya (Earley & Ang, 2003; Ang & Van Dyne, 2008). CQ melengkapi IQ dan EQ dengan fokus interaksi lintas budaya (Livermore, 2011).

CQ terdiri dari empat dimensi (Earley & Ang, 2003). *Pertama*, CQ Metakognitif: kesadaran mental terhadap bias budaya sendiri dan orang lain (Ang et al., 2007; Thomas et al., 2008; Earley & Mosakowski, 2004). *Kedua*, CQ Kognitif: pengetahuan norma dan kearifan lokal (*local wisdom*) seperti *siri' na pacce* atau *pela gandong* sebagai basis layanan (Ang & Van Dyne, 2008; Hofstede, 2001; Rahman, 2016). Tanpa ini, kebijakan rentan ditolak warga (Sinambela, 2021).

Ketiga, CQ Motivasional: minat intrinsik dan *self-efficacy* berinteraksi lintas budaya, mencegah *burnout* dalam pelayanan majemuk (Bandura, 1997; Livermore, 2011; Grandey, 2003). *Keempat*, CQ Perilaku: fleksibilitas tindakan verbal/non-verbal, mewujudkan dalam sikap *nguwongke* (memanusiakan)

yang empatik (Ang et al., 2007; Gudykunst, 2004; Magnis-Suseno, 1984; Ritzer, 2019).

Relevansi CQ menguat seiring desentralisasi. ASN harus menjadi jembatan (*bridge-builder*) antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal untuk mencegah konflik (Prasajo, 2020; Dwiyanto, 2021; Varshney, 2002). Pemimpin dengan CQ tinggi lebih mampu membangun kepercayaan (*trust*) (Rockstuhl et al., 2011). Selain itu, CQ mengontrol bias etnosentrisme, memastikan kebijakan inklusif melalui *empathic perspective taking* (Triandis, 1994; Fredrickson, 2010; Denhardt & Denhardt, 2007). Pengembangan CQ berbeda dari pelatihan sensitivitas tradisional karena berbasis adaptasi dinamis, sejalan dengan visi birokrasi lincah dan berkelas dunia (Livermore, 2011; Earley & Peterson, 2004; KemenPANRB, 2021; BKN, 2024; Ang & Van Dyne, 2008).

D. Hasil dan Pembahasan

1. Anatomi "Jebakan Administratif": Disfungsi Birokrasi di Era Digital.

Data statistik yang disajikan oleh BKN dan Ombudsman RI pada bagian pendahuluan menyajikan sebuah realitas asimetris yang menuntut penjelasan teoritis mendalam (Ombudsman RI, 2025). Anomali di mana peningkatan kualitas pendidikan ASN tidak berbanding lurus dengan kepuasan publik ini dapat dijelaskan melalui perspektif sosiologi organisasi sebagai bentuk disfungsi birokrasi (Merton, 1940). Dalam teori struktur birokrasi, tekanan yang berlebihan pada aturan dan prosedur formal seringkali menyebabkan pegawai kehilangan orientasi pada tujuan substantif organisasi, yakni pelayanan publik (Merton, 1940). Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai *bureaucratic ritualism*, di mana kepatuhan pada aturan menjadi sebuah ritual suci yang lebih penting daripada hasil kerja itu sendiri (Etzioni, 1964).

Bagi seorang ASN di daerah, definisi "bekerja" seringkali mengalami penyempitan makna menjadi sekadar "menggugurkan kewajiban administratif" (Dwiyanto, 2021). Aktivitas kerja didominasi oleh pengisian log harian, korespondensi internal, dan pemenuhan dokumen pendukung yang bersifat klerikal (Sedarmayanti, 2017). Ketika orientasi kerja bergeser dari "melayani warga" menjadi "memenuhi dokumen", maka terjadilah konsekuensi logis berupa penundaan layanan yang tercermin dalam data statistik Ombudsman (Ombudsman RI, 2025). Penundaan berlarut (*undue delay*) ini bukan semata akibat kemalasan individu, melainkan manifestasi dari ketakutan struktural terhadap risiko kesalahan administrasi (Prasojo, 2020).

Fenomena ini menciptakan kondisi yang dapat diistilahkan sebagai "Jebakan Administratif" (*The Administrative Trap*) dalam manajemen SDM sektor publik (Lipsky, 2010). Michael Lipsky, dalam teorinya tentang *Street-Level Bureaucracy*, menjelaskan bahwa birokrat tingkat bawah seringkali mengembangkan mekanisme pertahanan diri dengan cara merutinkan pelayanan secara kaku untuk mengatasi tekanan pekerjaan (Lipsky, 2010). Akibatnya, ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (S2) sekalipun, ketika masuk ke dalam ekosistem yang *rigid*, perlahan mengalami degradasi otonomi intelektual (Dwiyanto, 2021). Kompetensi akademik menjadi tumpul karena jarang digunakan untuk memecahkan masalah (*problem solving*), melainkan hanya untuk menjustifikasi prosedur (*procedure justification*) (Anderson & Krathwohl, 2001).

Lebih jauh, tingginya angka "Penyimpangan Prosedur" dan "Tidak Memberikan Pelayanan" dalam laporan Ombudsman mengindikasikan adanya krisis akuntabilitas moral dalam tubuh birokrasi (Ombudsman RI, 2025). Dalam paradigma Weberian klasik, birokrat

memang didesain untuk bersikap *impersonal* atau tidak melibatkan perasaan pribadi dalam melayani (Merton, 1940). Namun, di era digital yang menuntut kecepatan, impersonalitas tersebut bermutasi menjadi sikap ketidakpedulian (*indifference*) terhadap kesulitan warga (Ritzer, 2019). Warga yang datang dengan masalah kompleks seringkali ditolak hanya karena kasusnya tidak sesuai dengan menu pilihan pada aplikasi layanan digital (Prasojo, 2020).

Kondisi inilah yang disebut George Ritzer sebagai dehumanisasi pelayanan publik melalui proses rasionalisasi yang berlebihan (Ritzer, 2019). Penerapan teknologi informasi (IT) tanpa filosofi kemanusiaan menjadikan sistem layanan sebagai alat eksklusi sosial (Schwab, 2016). Seorang warga lansia yang gagap teknologi, misalnya, berpotensi kehilangan hak akses layanan dasar karena sistem mengharuskan pendaftaran daring tanpa opsi manual (Ombudsman RI, 2025). Dalam konteks ini, negara hadir sebagai mesin yang efisien namun kehilangan wajah kemanusiaannya (Dwiyanto, 2021).

Sistem evaluasi kinerja (SKP) yang berlaku saat ini pun turut melanggengkan perilaku administratif tersebut karena indikatornya yang cenderung kuantitatif (BKN, 2024). Pegawai dinilai berkinerja "Baik" atau "Sangat Baik" berdasarkan kelengkapan laporan kegiatan, bukan berdasarkan dampak solusi yang diberikan kepada masyarakat (Sedarmayanti, 2017). Hal ini memicu terjadinya *Cultural Lag* atau kesenjangan budaya, di mana alat kerja birokrasi sudah modern (digital), namun pola pikir pegawainya masih terjebak pada budaya feodal-administratif (Ogburn, 1957). ASN merasa posisinya adalah sebagai pejabat yang memiliki otoritas, bukan sebagai fasilitator yang melayani kebutuhan publik (Prasojo, 2020).

Kritik Ritzer tentang *McDonaldization of Society* sangat relevan untuk membedah fenomena ini, di mana birokrasi mengejar

efisiensi, kalkulabilitas, dan prediktabilitas layaknya restoran cepat saji (Ritzer, 2019). Padahal, masalah kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan di masyarakat memiliki dinamika yang cair dan tidak selalu dapat diseragamkan (Lipsky, 2010). Ketika ASN memaksakan standar yang kaku pada situasi sosial yang dinamis, benturan (*clash*) antara petugas dan warga menjadi tak terelakkan, yang berujung pada lonjakan aduan (Ombudsman RI, 2025).

Kegagalan responsivitas ini menegaskan bahwa tingginya gelar akademik ASN tidak serta merta menjamin tingginya literasi pelayanan publik (Dwiyanto, 2021). Pendidikan formal di perguruan tinggi seringkali bersifat teoritis-konseptual, sementara dunia birokrasi membutuhkan kecerdasan praktis atau *tacit knowledge* (Knowles, 1984). Terdapat jurang pemisah (*gap*) antara kompetensi yang dipelajari di bangku kuliah dengan realitas tantangan di loket pelayanan (Sedarmayanti, 2017). Model pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparatur yang ada saat ini belum efektif menjembatani kesenjangan tersebut karena masih didominasi metode ceramah klasikal (KemenPANRB, 2021).

Oleh karena itu, menyalahkan individu ASN semata atas buruknya layanan adalah simplifikasi masalah yang mengabaikan faktor ekosistem (Prasojo, 2020). ASN adalah produk dari sistem pengembangan SDM yang masih memuja kepatuhan (*compliance*) di atas kreativitas (*creativity*) (Schwab, 2016). Selama paradigma administrasi masih menjadi panglima, maka setinggi apapun pendidikan ASN, layanan publik akan tetap berjalan lambat (Merton, 1940). Diperlukan intervensi mendasar melampaui standar kompetensi teknis sebagaimana diatur dalam regulasi kepegawaian (KemenPANRB, 2021).

2. Defisit Nalar Kritis: Urgensi *High Order Thinking Skills* (HOTS) dalam Birokrasi.

Mengapa kemampuan berpikir tingkat tinggi (*High Order Thinking Skills*/HOTS) menjadi kebutuhan mendesak bagi ASN? Selama ini, konsep HOTS lebih banyak diasosiasikan dengan domain pendidikan formal di sekolah (Anderson & Krathwohl, 2001). Padahal, birokrasi pemerintahan adalah laboratorium masalah sosial yang kompleks dan penuh ketidakpastian (VUCA) yang menuntut kecakapan berpikir tingkat lanjut (Schwab, 2016). Mengacu pada Taksonomi Bloom revisi, mayoritas rutinitas pekerjaan ASN saat ini masih terpaku pada level kognitif rendah, yakni C1 (Mengingat), C2 (Memahami), dan C3 (Menerapkan) (Anderson & Krathwohl, 2001).

Pekerjaan pada level C1 hingga C3 menempatkan ASN hanya sebagai operator teknis yang menjalankan instruksi sesuai petunjuk pelaksanaan (Sedarmayanti, 2017). Namun, data maladministrasi "Penundaan Berlarut" menjadi bukti empiris kegagalan ASN untuk naik ke level kognitif yang lebih tinggi, yaitu C4 (Menganalisis), C5 (Mengevaluasi), dan C6 (Mencipta) (Ombudsman RI, 2025). Ketika prosedur standar mengalami kebuntuan, ASN dengan nalar kritis rendah akan berhenti bekerja, sedangkan ASN dengan kemampuan HOTS akan melakukan analisis situasional untuk mencari alternatif solusi (Anderson & Krathwohl, 2001).

Absennya nalar kritis menyebabkan birokrasi kehilangan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika lapangan (Dwiyanto, 2021). Dalam banyak kasus di daerah, ASN enggan mengambil diskresi karena ketidakmampuan melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) secara mandiri (Lipsky, 2010). Ketidakmampuan membedakan antara prinsip substansial yang wajib dijaga dengan prosedur teknis yang dapat disesuaikan seringkali berakibat

fatal bagi kualitas layanan (Merton, 1940). Akibatnya, birokrasi bekerja seperti mesin otomatis yang tidak toleran terhadap variasi masalah warga (Ritzer, 2019).

World Economic Forum dalam laporannya tentang *The Future of Jobs* secara konsisten menempatkan *Critical Thinking* dan *Complex Problem Solving* sebagai kompetensi inti yang paling dibutuhkan organisasi masa depan (Schwab, 2016). Pemerintah sebagai organisasi publik terbesar tidak dapat mengisolasi diri dari tuntutan global tersebut (Prasojo, 2020). Kurikulum pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar CPNS harus direkonstruksi dari yang semula berbasis hafalan aturan menjadi berbasis pemecahan masalah (*problem-based learning*) (Knowles, 1984).

Penerapan HOTS dalam birokrasi akan mengubah respons pemerintah dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif-analitis (Dwiyanto, 2021). Saat ini, penanganan pengaduan seringkali dilakukan secara parsial dan defensif, yang merupakan ciri cara berpikir tingkat rendah (Ombudsman RI, 2025). Dengan bekal HOTS, ASN dituntut untuk membedah akar masalah (*root cause analysis*), mengevaluasi kegagalan sistem, dan merancang (Mencipta/C6) inovasi kebijakan agar masalah serupa tidak berulang di masa depan (Anderson & Krathwohl, 2001).

Selain itu, penguasaan HOTS merupakan strategi pertahanan SDM aparatur menghadapi disrupsi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) (Schwab, 2016). Pekerjaan administratif yang bersifat repetitif dan algoritmik (level C1-C3) diprediksi akan segera tergantikan oleh otomatisasi mesin (Prasojo, 2020). Jika ASN tidak meningkatkan kapasitas kognitifnya ke level analisis dan evaluasi, mereka berisiko menjadi beban organisasi atau *deadwood* (BKN, 2024). Hanya aparatur yang mampu berpikir kritis yang dapat bekerja berdampingan dengan

teknologi secara produktif (Schwab, 2016).

Namun, kecerdasan kognitif semata memiliki risiko menjadi alat manipulasi jika tidak dilandasi oleh etika (Etzioni, 1964). Seseorang yang cerdas secara intelektual namun nihil nilai moral dapat menggunakan pengetahuannya untuk mengeksploitasi celah aturan demi kepentingan pribadi (Dwiyanto, 2021). Oleh karena itu, HOTS tidak dapat berdiri sendiri sebagai pilar tunggal kompetensi ASN (KemenPANRB, 2021). Ia membutuhkan variabel penyeimbang yang menjaga agar logika birokrasi tetap membumi dan manusiawi, yakni integritas budaya (Earley & Ang, 2003).

3. *Cultural Intelligence (CQ): Jembatan Empati dalam Pelayanan.*

Di tengah gelombang modernisasi, birokrasi seringkali alpa bahwa objek layanan mereka adalah manusia yang terikat pada konteks budaya tertentu (Earley & Ang, 2003). *Cultural Intelligence (CQ)* atau kecerdasan budaya didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk berfungsi dan berinteraksi secara efektif dalam situasi yang beragam secara budaya (Earley & Ang, 2003). Dalam konteks pelayanan publik di Indonesia yang multikultural, absennya CQ pada diri ASN seringkali menjadi pemicu kesalahpahaman dan ketidakpuasan masyarakat (Dwiyanto, 2021).

Data tingginya aduan terhadap Pemerintah Daerah menunjukkan adanya jurang komunikasi antara birokrat dan warga lokal (Ombudsman RI, 2025). Banyak ASN muda yang baru direkrut memiliki kompetensi teknis tinggi namun membawa budaya kerja "urban" yang serba cepat dan *to the point*, yang seringkali dianggap kurang santun oleh masyarakat pedesaan yang mengutamakan harmoni (sinambela, 2021). Ketidakpekaan ini menciptakan resistensi psikologis, di mana warga merasa asing dengan aparat pemerintahnya sendiri (Lipsky, 2010).

Integrasi nilai kearifan lokal (*local wisdom*) ke dalam perilaku kerja ASN bukan berarti kemunduran menuju tradisionalisme, melainkan strategi humanisasi layanan (Dwiyanto, 2021). Nilai-nilai seperti *gotong royong*, *tepa selira* (tenggang rasa), atau filosofi lokal lainnya mengandung etika pelayanan universal yang seringkali absen dalam SOP formal (Earley & Ang, 2003). Ketika ASN menerapkan nilai budaya lokal, mereka tidak hanya menjalankan tugas negara, tetapi juga melakukan pendekatan kultural yang memenangkan hati publik (*winning hearts and minds*) (Prasojo, 2020).

Kecerdasan budaya mencakup dimensi metakognitif, kognitif, motivasional, dan perilaku yang memungkinkan ASN membaca kode-kode sosial tersirat (Earley & Ang, 2003). ASN yang memiliki CQ tinggi mampu mendeteksi kapan harus bersikap formal sesuai regulasi dan kapan harus menggunakan pendekatan persuasif-kultural untuk menyelesaikan sengketa warga (Lipsky, 2010). Fleksibilitas perilaku inilah yang menjadi kunci terwujudnya pelayanan yang responsif dan inklusif (Ritzer, 2019).

Tanpa *Cultural Intelligence*, digitalisasi layanan berpotensi menjadi agen dehumanisasi yang semakin menjauhkan negara dari rakyatnya (Schwab, 2016). Teknologi bersifat netral nilai, namun cara teknologi tersebut dihantarkan kepada publik sangat bergantung pada kepekaan budaya penggunaannya (Prasojo, 2020). Oleh karena itu, penguatan budaya daerah dalam pengembangan kompetensi ASN adalah langkah strategis untuk mengembalikan "roh" pelayanan yang sempat hilang akibat mekanisasi birokrasi (Dwiyanto, 2021).

4. Model Pembelajaran Hibrida: Sinergi Nalar dan Rasa.

Menjawab tantangan kompleksitas masalah publik tersebut, diperlukan rekonstruksi model pembelajaran ASN

yang mengintegrasikan HOTS dan CQ dalam satu kesatuan kurikulum andragogi (Knowles, 1984). Model pembelajaran hibrida ini menolak dikotomi antara pengembangan kompetensi teknis (*hard skill*) dan kompetensi sosial-kultural (*soft skill*) (Sedarmayanti, 2017). Sebaliknya, kedua elemen ini harus diajarkan secara simultan sebagai kompetensi holistik yang tak terpisahkan (KemenPANRB, 2021).

Dalam praksisnya, integrasi ini dapat diwujudkan melalui metode *Contextual Problem-Based Learning* (Anderson & Krathwohl, 2001). Peserta diklat tidak lagi hanya disuguhi materi regulasi kering, melainkan dihadapkan pada studi kasus nyata yang mengandung dilema etika dan budaya (Knowles, 1984). ASN dilatih untuk menggunakan nalar kritisnya (HOTS) guna membedah aspek hukum dan prosedur, sekaligus menggunakan kecerdasan budayanya (CQ) untuk merumuskan pendekatan komunikasi yang empatik kepada warga terdampak (Earley & Ang, 2003).

Sinergi antara nalar (HOTS) dan rasa (CQ) akan melahirkan profil ASN yang adaptif dan bijaksana (*wise bureaucracy*) (Prasojo, 2020). Nalar kritis berfungsi sebagai rem untuk mencegah inefisiensi dan kesalahan prosedur, sementara kecerdasan budaya berfungsi sebagai gas untuk mendorong inovasi layanan yang humanis (Dwiyanto, 2021). Keseimbangan inilah yang akan mencegah terjadinya maladministrasi berupa penundaan berlarut maupun penyimpangan prosedur (Ombudsman RI, 2025).

Model ini juga sejalan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa (*Andragogy*) yang menekankan pada relevansi dan pengalaman (Knowles, 1984). Dengan mengangkat isu-isu lokal dan budaya setempat sebagai materi pembelajaran, ASN akan merasa materi pelatihan lebih relevan dengan ekosistem kerjanya sehari-hari (sinambela, 2021). Hal ini akan meningkatkan motivasi intrinsik ASN

untuk belajar dan memperbaiki kinerja, dibandingkan dengan metode indoktrinasi aturan yang bersifat pasif (Sedarmayanti, 2017).

Implementasi model ini menuntut transformasi peran widyaiswara dan lembaga diklat (BPSDM/BKPSDMD) dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator pembelajaran (KemenPANRB, 2021). Fasilitator harus mampu merangsang daya kritis peserta melalui pertanyaan sokratik, sekaligus menjadi *role model* dalam demonstrasi perilaku yang berbudaya (Anderson & Krathwohl, 2001). Hanya dengan cara inilah, transformasi *mindset* ASN dapat terjadi secara substansial (Prasojo, 2020).

5. Strategi Implementasi: Dari Wacana Menjadi Aksi.

Untuk menerjemahkan konsep teoretis di atas menjadi kebijakan operasional, diperlukan langkah strategis yang sistematis oleh instansi pembina kepegawaian (BKN, 2024). Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap kurikulum pelatihan dasar dan kepemimpinan dengan memberikan bobot lebih besar pada simulasi pemecahan masalah (HOTS) dan studi lapangan sosio-kultural (KemenPANRB, 2021). Pelatihan tidak boleh lagi dilaksanakan di ruang tertutup ("menara gading"), tetapi harus mewajibkan peserta terjun langsung (*immersion*) ke kantong-kantong masyarakat untuk mengasah empati (Lipsky, 2010).

Kedua, indikator evaluasi pasca-diklat harus digeser dari pengukuran kepuasan peserta (Level 1 Kirkpatrick) menuju pengukuran dampak perilaku dan hasil (Level 3 & 4 Kirkpatrick) (Sedarmayanti, 2017). Keberhasilan diklat tidak diukur dari seberapa hafal peserta terhadap pasal undang-undang, melainkan dari kemampuan mereka menawarkan solusi inovatif atas masalah riil di unit kerjanya (Anderson & Krathwohl, 2001).

BKPSDMD harus berani menerapkan uji kompetensi berbasis kasus untuk mengukur level HOTS pegawai secara berkala (Prasojo, 2020).

Ketiga, penguatan budaya organisasi berbasis kearifan lokal harus dilembagakan melalui regulasi internal instansi (Dwiyanto, 2021). Budaya kerja "BerAKHLAK" yang dicanangkan nasional harus diterjemahkan ke dalam kode perilaku spesifik yang mengadopsi nilai luhur budaya daerah setempat (sinambela, 2021). Hal ini akan memberikan pijakan identitas yang kuat bagi ASN di daerah, sehingga mereka memiliki kebanggaan dan komitmen moral dalam melayani warganya (Earley & Ang, 2003).

Keempat, pemanfaatan teknologi pembelajaran digital (*E-Learning/LMS*) harus dioptimalkan untuk menunjang pembelajaran mandiri terkait pengetahuan teknis (C1-C3), sehingga waktu tatap muka dapat dimaksimalkan untuk diskusi tingkat tinggi (C4-C6) dan internalisasi nilai (Schwab, 2016). Strategi *blended learning* ini memungkinkan efisiensi waktu tanpa mengorbankan kedalaman materi analisis dan pembentukan karakter (KemenPANRB, 2021).

Akhirnya, komitmen pimpinan daerah (Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah) menjadi variabel penentu keberhasilan transformasi ini (Prasojo, 2020). Tanpa keteladanan (*tone from the top*) yang menunjukkan sikap kritis-solutif dan humanis-berbudaya, segala bentuk pelatihan akan berakhir sia-sia (Dwiyanto, 2021). Pimpinan harus memberikan ruang aman (*psychological safety*) bagi bawahan untuk berinovasi dan mengambil diskresi terukur demi kepentingan publik, sebagai wujud nyata dari birokrasi yang responsif, andal, dan terpercaya (Ombudsman RI, 2025).

6. Rekonstruksi Model Andragogi: Integrasi Nalar Kritis dan Kecerdasan Budaya.

Menjawab tantangan stagnasi kinerja pelayanan publik yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan sebuah terobosan metodologis dalam pengembangan kompetensi aparatur (Prasojo, 2020). Model pelatihan konvensional yang bersifat parsial, di mana kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural diajarkan secara terpisah—terbukti gagal membentuk karakter ASN yang utuh (Sedarmayanti, 2017). Artikel ini mengusulkan sebuah model pembelajaran andragogi hibrida yang mengintegrasikan *High Order Thinking Skills* (HOTS) dan *Cultural Intelligence* (CQ) ke dalam satu kesatuan proses kognitif dan afektif (Anderson & Krathwohl, 2001; Earley & Ang, 2003).

Dalam model rekonstruksi ini, proses pembelajaran tidak lagi dimulai dengan paparan regulasi (*rule-based*), melainkan dimulai dengan paparan masalah kontekstual (*problem-based*) yang diambil dari realitas pengaduan masyarakat (Knowles, 1984). ASN dihadapkan pada studi kasus nyata, misalnya kasus sengketa lahan atau penolakan imunisasi karena alasan adat, yang menuntut penyelesaian multidimensi (Ombudsman RI, 2025). Pada tahap ini, kemampuan HOTS level Menganalisis (C4) diaktifkan untuk membedah akar masalah regulasi, sementara CQ dimensi Metakognitif diaktifkan untuk menyadari adanya bias budaya dalam persepsi masalah tersebut (Earley & Ang, 2003).

Sinergi antara HOTS dan CQ terlihat jelas pada tahap evaluasi alternatif solusi (Anderson & Krathwohl, 2001). Jika ASN hanya menggunakan nalar kritis (HOTS) tanpa sensitivitas budaya, mereka mungkin akan memilih solusi yang paling efisien secara hukum namun resisten secara sosial, seperti penggusuran paksa yang legal (Lipsky, 2010). Sebaliknya, jika hanya mengandalkan empati budaya (CQ) tanpa

nalar kritis, mereka berisiko melanggar prinsip akuntabilitas negara demi menyenangkan warga (Merton, 1940). Model hibrida menuntut ASN untuk melakukan *dialektika berpikir*: mencari solusi yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan (Analisis C4), namun secara sosial dapat diterima (*socially acceptable*) melalui pendekatan budaya yang tepat (CQ Perilaku) (Dwiyanto, 2021).

Implementasi model ini menuntut pergeseran paradigma dari *Teacher-Centered Learning* menuju *Participant-Centered Learning* sesuai prinsip andragogi (Knowles et al., 2005). Widyaiswara atau fasilitator tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya sumber kebenaran, melainkan sebagai provokator intelektual yang merangsang daya kritis peserta (Brookfield, 1986). Metode ceramah satu arah yang pasif harus didekonstruksi dan digantikan dengan metode simulasi peran (*role-play*), debat kebijakan, dan *immersion* (terjun lapangan) ke kantong-kantong budaya masyarakat (Kolb, 1984).

Lebih jauh, integrasi nilai kearifan lokal (*local wisdom*) ke dalam kurikulum bukan sekadar tempelan ornamen, melainkan menjadi basis etika pelayanan (sinambela, 2021). Nilai-nilai seperti *musyawarah mufakat* (demokrasi deliberatif lokal) atau *gotong royong* (kolaborasi sosial) harus dioperasionalisasikan menjadi indikator perilaku kerja (Rahman, 2016). Misalnya, dalam menangani komplain warga yang marah, ASN dilatih untuk tidak merespons dengan pasal-pasal kaku, melainkan menggunakan pendekatan persuasif kultural yang memanusiakan, yang dalam terminologi CQ disebut sebagai adaptasi perilaku verbal dan non-verbal (Ang et al., 2007).

Penggunaan HOTS level Mencipta (C6) dalam model ini diarahkan untuk melahirkan inovasi pelayanan yang adaptif (Anderson & Krathwohl, 2001). Inovasi tidak selalu berarti menciptakan aplikasi

digital baru, tetapi bisa berupa penciptaan mekanisme layanan jemput bola yang menghormati tradisi lokal, atau penyederhanaan prosedur bagi kelompok rentan (Ritzer, 2019). Dengan demikian, ASN didorong untuk menjadi "Intrapreneur Birokrasi" yang mampu melihat peluang perbaikan di tengah keterbatasan aturan (Denhardt & Denhardt, 2007).

Secara teoritis, model integrasi ini mengisi celah (*gap*) yang ditinggalkan oleh pendekatan teknokratis murni (Prasojo, 2020). Ia mengakui bahwa administrasi publik bukan bekerja di ruang hampa nilai, melainkan bekerja di tengah *setting* sosial yang hidup dan dinamis (Lipsky, 2010). Dengan memadukan ketajaman nalar (Otak) dan kehalusan rasa (Hati), birokrasi dapat melepaskan diri dari jebakan dehumanisasi dan kembali pada khittahnya sebagai pelayan publik yang sesungguhnya (Dwiyanto, 2021).

7. Transformasi Ekosistem Diklat: Strategi Implementasi di Pemerintah Daerah.

Gagasan konseptual mengenai integrasi HOTS dan CQ tidak akan berdampak signifikan tanpa diikuti strategi implementasi yang sistematis dalam ekosistem pemerintahan daerah (BKN, 2024). Pemerintah Daerah, sebagai instansi yang paling banyak menerima aduan publik, harus menjadi lokomotif perubahan ini (Ombudsman RI, 2025). Strategi pertama yang harus dilakukan adalah *redesain kurikulum* Pelatihan Dasar (Latsar) dan Pelatihan Kepemimpinan (Latpim) yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) (KemenPANRB, 2021). Materi pelatihan harus dikurangi porsi hafalan regulasinya dan diperbanyak porsi bedah kasus (*case method*) yang memaksa peserta menggunakan nalar kritisnya (Noe, 2017).

Strategi kedua menysasar pada transformasi metode evaluasi pasca-diklat (Kirkpatrick, 1994). Selama ini,

keberhasilan diklat seringkali hanya diukur pada Level 1 (Reaksi/Kepuasan Peserta) dan Level 2 (Pembelajaran/Nilai Ujian Tulis) dari model evaluasi Kirkpatrick (Sedarmayanti, 2017). BKPSDMD harus berani melangkah ke evaluasi Level 3 (Perilaku) dan Level 4 (Hasil) (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). Artinya, alumni diklat harus dipantau apakah mereka benar-benar menerapkan nalar kritis dan pendekatan budaya dalam melayani warga setelah kembali ke kantornya, dan apakah perilaku tersebut berkorelasi dengan penurunan angka komplain di unit kerjanya (Prasojo, 2020).

Strategi ketiga adalah pelebagaan *Community of Practice* (CoP) atau komunitas pembelajar di lingkungan instansi (Wenger, 1998). Pembelajaran orang dewasa tidak berhenti saat diklat selesai; ia harus berlanjut dalam interaksi sosial di tempat kerja (Knowles, 1984). Pemda perlu memfasilitasi forum-forum diskusi lintas dinas di mana ASN dapat berbagi pengalaman (*tacit knowledge*) tentang cara menangani masalah warga yang kompleks (Nonaka & Takeuchi, 1995). Dalam forum inilah, transfer pengetahuan tentang kearifan lokal dan strategi pemecahan masalah (HOTS) terjadi secara alamiah dan berkelanjutan (sinambela, 2021).

Strategi keempat berkaitan dengan sistem insentif dan manajemen kinerja (BKN, 2024). Indikator Kinerja Individu (IKI) dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) harus direvisi untuk mengakomodasi indikator responsivitas dan inovasi (KemenPANRB, 2021). ASN yang mampu menyelesaikan sengketa warga melalui pendekatan budaya yang elegan harus mendapatkan poin kinerja setara atau lebih tinggi dibandingkan ASN yang hanya rajin mengisi presensi (Dwiyanto, 2021). Tanpa penyelarasan sistem insentif, motivasi ASN untuk menerapkan HOTS dan CQ akan luntur tergerus rutinitas administratif yang pragmatis (Wlodkowski, 2008).

Strategi kelima adalah optimalisasi peran teknologi pembelajaran (*Learning Management System/LMS*) untuk efisiensi kognitif (Schwab, 2016). Pengetahuan dasar tentang regulasi dan teori (Level C1-C2) sebaiknya dipindahkan ke platform e-learning yang dapat diakses mandiri oleh ASN kapan saja (Mergel et al., 2018). Hal ini akan membebaskan waktu tatap muka di kelas untuk digunakan sepenuhnya bagi aktivitas diskusi tingkat tinggi (HOTS) dan simulasi budaya (CQ) (Anderson & Krathwohl, 2001). *Blended learning* menjadi solusi rasional di tengah keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi daerah (Noe, 2017).

Terakhir, namun paling krusial, adalah komitmen kepemimpinan daerah (*political will*) (Prasojo, 2020). Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah harus memberikan contoh keteladanan (*role model*) dalam mempraktikkan kepemimpinan yang kritis dan berbudaya (Earley & Ang, 2003). Pimpinan harus menciptakan ruang aman psikologis (*psychological safety*) bagi bawahan untuk berani berbeda pendapat dan mengambil inisiatif diskresi demi kepentingan publik, sepanjang tidak melanggar hukum pidana (Edmondson, 1999). Tanpa dukungan politik yang kuat, ASN yang kritis dan inovatif justru seringkali dianggap sebagai ancaman bagi *status quo* birokrasi (Merton, 1957).

Dengan menerapkan strategi komprehensif ini, transformasi birokrasi tidak lagi menjadi jargon kosong, melainkan sebuah gerakan sistematis yang terukur (Dwiyanto, 2021). Peningkatan kualitas SDM aparatur yang responsif, andal, dan terpercaya pada akhirnya akan bermuara pada pulihnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi negara, yang merupakan modal sosial terpenting bagi pembangunan nasional (Fukuyama, 1995).

E. Penutup

Berdasarkan analisis data dan kajian teoretis yang telah dipaparkan, artikel ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualifikasi formal Aparatur Sipil Negara (ASN) belum mampu menjawab tantangan kualitas pelayanan publik secara substansial. Paradoks antara tingginya Indeks Profesionalitas ASN dengan lonjakan aduan maladministrasi, khususnya penundaan berlarut yang mencapai 33,86%, menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengembangan kompetensi aparatur (Ombudsman RI, 2025; BKN, 2024). Kegagalan ini bersumber dari "jebakan administratif" dan disfungsi birokrasi, di mana ASN terjebak dalam rutinitas prosedural yang kaku (*rule-based*) sehingga kehilangan fleksibilitas nalar dan kepekaan empati (Merton, 1940; Lipsky, 2010).

Model pengembangan SDM yang selama ini diterapkan terbukti masih bersifat parsial dan didominasi oleh transfer pengetahuan teknis level kognitif rendah (C1-C3), yang gagal membentuk karakter aparatur yang responsif (Prasojo, 2020). Oleh karena itu, rekonstruksi model pembelajaran andragogi yang mengintegrasikan *High Order Thinking Skills* (HOTS) dan *Cultural Intelligence* (CQ) merupakan sebuah imperatif atau keharusan mendesak (Anderson & Krathwohl, 2001; Earley & Ang, 2003). Sinergi antara ketajaman analisis masalah (HOTS) dan kecerdasan adaptasi budaya (CQ) adalah kunci untuk mentransformasi birokrasi dari mesin administratif yang dingin menjadi pelayan publik yang humanis dan solutif (Dwiyanto, 2021).

Sebagai tindak lanjut operasional dari kesimpulan di atas, artikel ini merekomendasikan langkah-langkah strategis bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan BKPSDM di instansi pembina kompetensi di daerah. Langkah fundamental yang harus diambil adalah

melakukan redesain kurikulum diklat dengan mengubah proporsi materi pelatihan dari dominasi ceramah regulasi menjadi dominasi metode pemecahan masalah (*Problem-Based Learning*). Kurikulum tersebut harus mewajibkan penggunaan studi kasus riil dari data pengaduan masyarakat untuk melatih daya nalar kritis (HOTS) peserta (Knowles, 1984). Transformasi kurikulum ini harus diikuti dengan pergeseran paradigma evaluasi dampak pasca-diklat, bergerak dari sekadar mengukur kepuasan peserta (Level 1 Kirkpatrick) menuju pengukuran perubahan perilaku kerja (Level 3 Kirkpatrick). Dalam skema ini, alumni diklat dievaluasi berdasarkan kemampuannya memberikan solusi inovatif atas masalah warga di unit kerjanya (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). Selain aspek kognitif, aspek kultural juga perlu diperkuat melalui pelembagaan kearifan lokal, yakni dengan mewajibkan penyisipan materi muatan budaya daerah dalam setiap jenis pelatihan teknis maupun kepemimpinan untuk membangun *Cultural Intelligence* dan mencegah alienasi birokrasi dari masyarakatnya (sinambela, 2021).

Agar rekomendasi teknis tersebut dapat berjalan efektif, diperlukan dukungan kebijakan di tingkat makro manajemen SDM. Hal ini mendesak dilakukannya revisi sistem manajemen kinerja melalui penyesuaian terhadap indikator Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), di mana poin kinerja tidak boleh lagi hanya berbasis kuantitas laporan, tetapi harus memberikan bobot tinggi pada indikator inovasi layanan dan penyelesaian masalah (*discretionary effort*) (Sedarmayanti, 2017). Kebijakan insentif kinerja ini harus diperkuat dengan payung hukum perlindungan diskresi, di mana Pemerintah Daerah perlu menerbitkan regulasi yang memberikan jaminan keamanan administratif bagi ASN yang mengambil langkah diskresi inovatif demi kepentingan publik, sepanjang tidak melanggar hukum pidana, guna mengatasi

ketakutan birokrat dalam bertindak (Prasojo, 2020).

Daftar Pustaka

- Anderson, L. W., dan Krathwohl, D. R. 2001. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman. New York.
- Ang, S., dan Van Dyne, L. 2008. *Handbook of Cultural Intelligence: Theory, Measurement, and Applications*. M.E. Sharpe. Armonk, NY.
- Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C., dan Chandrasekar, N. A. 2007. Cultural Intelligence: Its Measurement and Effects on Cultural Judgment and Decision Making, Cultural Adaptation and Task Performance. *Management and Organization Review*. 3(3): 335-371.
- Badan Kepegawaian Negara. 2024. *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2024*. Pusat Data dan Informasi Kepegawaian BKN. Jakarta.
- Bandura, A. 1997. *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. W.H. Freeman. New York.
- Blau, P. M., dan Meyer, M. W. 1987. *Bureaucracy in Modern Society* (3rd Ed.). Random House. New York.
- Brookfield, S. D. 1986. *Understanding and Facilitating Adult Learning: A Comprehensive Analysis of Principles and Effective Practices*. Jossey-Bass. San Francisco.
- Dwiyanto, A. 2021. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Earley, P. C., dan Ang, S. 2003. *Cultural Intelligence: Individual Interactions Across Cultures*. Stanford University Press. Stanford.

- Earley, P. C., dan Mosakowski, E. 2004. Cultural Intelligence. *Harvard Business Review*. 82(10): 139-146.
- Etzioni, A. 1964. *Modern Organizations*. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, NJ.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2017. *Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara*. KemenPANRB. Jakarta.
- Kirkpatrick, D. L., dan Kirkpatrick, J. D. 2016. *Evaluating Training Programs: The Four Levels* (4th Ed.). Berrett-Koehler Publishers. San Francisco.
- Knowles, M. S. 1984. *Andragogy in Action: Applying Modern Principles of Adult Learning*. Jossey-Bass. San Francisco.
- Knowles, M. S., Holton, E. F., dan Swanson, R. A. 2005. *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development* (6th Ed.). Elsevier. Burlington, MA.
- Kolb, D. A. 1984. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, NJ.
- Lipsky, M. 2010. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services* (30th Anniversary Ed.). Russell Sage Foundation. New York.
- Livermore, D. 2011. *The Cultural Intelligence Difference: Master the One Skill You Can't Do Without in Today's Global Economy*. AMACOM. New York.
- Mergel, I., Gong, Y., dan Bertot, J. 2018. Agile government: Systematic literature review and future research. *Government Information Quarterly*. 35(2): 291-298.
- Merton, R. K. 1940. Bureaucratic Structure and Personality. *Social Forces*. 18(4): 560-568.
- Merton, R. K. 1957. *Social Theory and Social Structure*. Free Press. Glencoe, IL.
- Noe, R. A. 2017. *Employee Training and Development* (7th Ed.). McGraw-Hill Education. New York.
- Ombudsman Republik Indonesia. 2025. Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI Meningkat: Didominasi Penundaan Berlarut. <https://ombudsman.go.id/pers/r/jumlah-laporan-masyarakat-ke-ombudsman-ri-meningkat>. diakses tanggal 22 Januari 2025.
- Prasojo, E. 2020. *Memimpin Reformasi Birokrasi: Kompleksitas dan Dinamika Perubahan Birokrasi Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Rahman, N. 2016. *Kearifan Lokal Siri' na Pacce dalam Budaya Bugis Makassar*. Deepublish. Yogyakarta.
- Ritzer, G. 2019. *The McDonaldization of Society: Into the Digital Age* (9th Ed.). SAGE Publications. Thousand Oaks.
- Schwab, K. 2016. *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum. Geneva.
- Sedarmayanti. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama. Bandung.
- Sinambela, L. P. 2021. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Weber, M. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. (T. Parsons, Trans.). Free Press. New York.

Wibowo. 2021. *Manajemen Kinerja* (Edisi Kelima). Rajawali Pers. Jakarta.

Wlodkowski, R. J. 2008. *Enhancing Adult Motivation to Learn: A Comprehensive Guide for Teaching All Adults* (3rd Ed.). Jossey-Bass. San Francisco.

INTEGRASI NILAI BUDAYA LOKAL DALAM TRANSFORMASI DIGITAL: STRATEGI PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DI ERA SOCIETY 5.0

Integration of Local Cultural Values in Digital Transformation: A Strategy for Developing Superior Human Resources in the Era of Society 5.0)

Dony Kandiawan

(ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka)

e-mail: donni.kandiawan@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam transisi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sektor ekstraktif menuju ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis integrasi nilai budaya lokal sebagai strategi penguatan SDM unggul di era Society 5.0 dengan menggunakan perspektif Modal Budaya Pierre Bourdieu. Metode yang digunakan adalah *sequential explanatory mixed-methods* melalui analisis data sekunder Indeks Pembangunan Manusia (IPM) periode 2022–2025 serta analisis tematik terhadap kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan IPM Bangka Belitung mencapai 75,26 pada tahun 2025 dengan pertumbuhan 0,95%. Filosofi *Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong* berperan sebagai *embodied cultural capital* yang memperkuat etos kolaboratif dan inklusivitas digital. Namun, disparitas antara Kota Pangkalpinang (80,40) dan Bangka Selatan (68,86) menunjukkan perlunya institusionalisasi modal budaya melalui pendidikan vokasi berbasis potensi daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi literasi digital dan autentisitas budaya lokal menjadi kunci resiliensi SDM dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Kata Kunci: Kualitas SDM, Budaya Lokal, Indeks Pembangunan Manusia, Bangka Belitung, Society 5.0, Modal Budaya.

ABSTRACT

Improving human resource (HR) quality is a key determinant in the economic transition of the Bangka Belitung Islands Province from an extractive-based economy to a sustainable one. This study analyzes the integration of local cultural values as a strategy to strengthen superior human resources in the era of Society 5.0 using Pierre Bourdieu's Cultural Capital framework. A sequential explanatory mixed-methods design was employed, combining secondary data analysis of the Human Development Index (HDI) for 2022–2025 with thematic analysis of local wisdom. The findings show that Bangka Belitung's HDI reached 75.26 in 2025, reflecting 0.95% growth. The philosophy of Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong functions as embodied cultural capital that reinforces collaborative work ethics and digital inclusivity. However, disparities between Pangkalpinang City (80.40) and South Bangka (68.86) highlight the need to institutionalize cultural capital through region-based vocational education. The study concludes that synergy between digital literacy and cultural authenticity is essential for HR resilience amid economic dynamics.

Keywords: Human Resource Quality, Local Culture, Human Development Index, Bangka Belitung, Society 5.0, Cultural Capital.

A. Pendahuluan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tengah berada dalam fase transisi ekonomi dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berbasis pengetahuan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi determinan utama dalam proses transformasi ini. Data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Babel mencapai 75,26 pada tahun 2025 dengan tren pertumbuhan positif. Namun demikian, capaian tersebut masih menyisakan disparitas signifikan antara wilayah urban seperti kota Pangkalpinang (80,40) dan wilayah rural seperti Bangka Selatan (68,86). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa distribusi modal manusia (*human capital*) belum merata, terutama dalam menghadapi disrupsi digital dan tuntutan Society 5.0.

Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana nilai budaya lokal yang kerap dipersepsikan sebagai tradisional dapat direposisi sebagai katalisator peningkatan kualitas SDM di era digital. Dalam konteks Babel, filosofi *Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong* yang merepresentasikan harmoni etnis Melayu dan Tionghoa merupakan fondasi sosial yang telah lama membentuk karakter masyarakat. Nilai tersebut mengandung semangat kolaborasi, toleransi, dan solidaritas yang relevan dengan kebutuhan kompetensi abad ke-21.

Penelitian ini menggunakan perspektif Pierre Bourdieu mengenai Modal Budaya (*Cultural Capital*). Bourdieu membedakan modal budaya dalam tiga bentuk: *embodied*, *objectified*, dan *institutionalized*. Filosofi lokal Babel dapat dipahami sebagai *embodied capital* yang tertanam dalam *habitus* masyarakat. Ketika dilembagakan melalui sistem pendidikan dan kebijakan publik, nilai tersebut berpotensi bertransformasi menjadi *institutionalized capital* yang memperkuat daya saing SDM. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan

integratif yang menghubungkan data kuantitatif IPM dengan analisis kualitatif modal budaya dalam kerangka transformasi digital. Fokus kajian diarahkan pada strategi pelebagaan kearifan lokal ke dalam ekosistem pendidikan dan industri digital di Bangka Belitung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan model sekuensial eksplanatori. Tahap pertama dilakukan analisis kuantitatif terhadap data runtun waktu IPM periode 2022–2025 untuk memetakan tren kualitas SDM di Bangka Belitung, termasuk disparitas antarwilayah. Data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik dan dianalisis secara deskriptif-komparatif.

Tahap kedua menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumentasi terhadap regulasi daerah, dokumen kebijakan, dan narasi filosofis lokal yang relevan dengan pembangunan SDM. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai budaya lokal memengaruhi pembentukan *habitus* masyarakat dan berkontribusi terhadap capaian pembangunan manusia.

Sintesis antara temuan kuantitatif dan kualitatif dilakukan dengan menggunakan kerangka teori Bourdieu guna merumuskan model integrasi budaya digital sebagai strategi penguatan SDM unggul. Pendekatan ini memungkinkan perumusan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berbasis angka statistik, tetapi juga berakar pada struktur sosial dan identitas budaya daerah.

C. Kerangka Teori

1. Teori Modal Budaya dan *Habitus*.

Pierre Bourdieu menegaskan bahwa keberhasilan individu tidak semata ditentukan oleh modal ekonomi, tetapi juga oleh modal budaya yang terinternalisasi dalam *habitus* (Bourdieu, 1977;

1984; 1986). Modal budaya *embodied* merujuk pada nilai, disposisi, dan pola pikir yang melekat pada individu; *objectified* terkait dengan simbol atau produk budaya; sementara *institutionalized* berbentuk legitimasi formal seperti sertifikasi pendidikan (Bourdieu, 1986). Dalam konteks pembangunan daerah, modal budaya berfungsi sebagai fondasi pembentukan karakter dan etos kerja kolektif. Di era Society 5.0, kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis, tetapi juga oleh kemampuan kolaborasi dan adaptasi sosial yang berakar pada *habitus* budaya.

2. Human Capital dan Cultural Capital di Era Society 5.0.

Teori *Human Capital* konvensional menekankan investasi pendidikan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi (Schwab, 2016; OECD, 2022). Namun, pendekatan ini sering mengabaikan dimensi sosial-budaya yang memengaruhi efektivitas pembelajaran dan inovasi. Dalam era Society 5.0, integrasi teknologi dan kemanusiaan menuntut kombinasi antara literasi digital dan kecakapan sosial. Oleh karena itu, *cultural capital* menjadi pelengkap sekaligus penguat *human capital* (Florida, 2014). Di Bangka Belitung, nilai *Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong* berfungsi sebagai perekat sosial yang mendorong kolaborasi lintas komunitas dan mempercepat adopsi teknologi secara inklusif (Ibrahim & Zulkarnain, 2020).

3. IPM dan Dimensi Budaya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kapabilitas dasar manusia dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Pendekatan kapabilitas menekankan bahwa pembangunan tidak sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan perluasan pilihan hidup manusia (Sen, 1999; UNDP, 2024). Literatur kontemporer menunjukkan bahwa identitas budaya yang kuat berkontribusi pada resiliensi sosial dan stabilitas pembangunan. Dalam konteks ini,

budaya tidak lagi dipandang sebagai penghambat modernisasi, melainkan sebagai modal strategis yang memperkuat dimensi pengetahuan dan produktivitas, termasuk melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal (Throsby, 2001; UNESCO, 2022).

D. Hasil dan Pembahasan: Integrasi Data IPM dan Modal Budaya

1. Disparitas Spasial Indeks Pembangunan Manusia dan Implikasinya terhadap Ketenagakerjaan Daerah.

Analisis terhadap peningkatan kualitas SDM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menunjukkan korelasi yang signifikan antara capaian statistik dan penguatan nilai budaya lokal sebagai instrumen pembangunan manusia.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IPM wilayah Babel mencapai angka **75,26** pada tahun 2025, meningkat 0,95% dari tahun sebelumnya. Secara teoretis, pertumbuhan ini merepresentasikan keberhasilan akumulasi modal manusia (*human capital*) yang didorong oleh stabilitas ekonomi dan akses pendidikan. Namun, jika dibedah secara spasial (lihat Tabel 1), terdapat disparitas mencolok antara **Kota Pangkalpinang (80,40)** dan **Kabupaten Bangka Selatan (68,86)**.

Berikut adalah tabel distribusi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan data terbaru dari BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
(2022–2024).

Kabupaten /Kota	IPM 2022	IPM 2023	IPM 2024	Status (2024)
Pangkalpinang	78,92	79,72	80,40	Sangat Tinggi
Belitung	73,38	73,88	74,47	Tinggi
Bangka	73,05	73,50	73,98	Tinggi
Belitung Timur	71,85	72,55	73,15	Tinggi
Bangka Tengah	71,51	72,01	72,61	Tinggi
Bangka Barat	69,87	70,54	71,06	Tinggi
Bangka Selatan	67,69	68,26	68,86	Sedang
Babel Rata-Rata	72,24	72,85	74,55*	Tinggi

*Catatan: Angka 74,55 pada 2024 merupakan hasil penyesuaian metodologi baru BPS. Untuk tahun 2025, angka IPM diproyeksikan mencapai 75,26.

Tabel 1 di atas menunjukkan performa **Kota Pangkalpinang** yang konsisten berada di kategori "Sangat Tinggi", yang menjadikannya *role model* dalam pengembangan SDM berbasis jasa dan pendidikan di wilayah kepulauan. Sebaliknya, **Bangka Selatan** yang berada di kategori "Sedang" menunjukkan adanya urgensi bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan peningkatan kualitas SDM dengan pemanfaatan **budaya daerah** sebagai penggerak ekonomi non-tambang agar mampu mengejar ketertinggalan capaian IPM.

Berdasarkan data terbaru dari BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan indikator makroekonomi per Februari 2026, berikut adalah visualisasi dan analisis data terintegrasi perbandingan indikator utama:

Tabel 2.

Visualisasi Perbandingan Indikator Utama
(2020–2025).

Tahun	IPM (Poin)	TPT - Pengangguran (%)	APK Perguruan Tinggi (%)	Usia Produktif (Jiwa)
2020	71,47	5,25	< 15,00	~980.000
2022	72,24	4,77	15,52	~1.020.000
2024	74,55	3,85	18,19	~1.050.000
2025	75,26	4,45	~19,50	~1.080.000

Analisis terhadap data pada **Tabel 2** menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi tantangan struktural berupa fenomena *high human development, low skill matching* sepanjang periode 2025–2026. Secara kuantitatif, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2025 mencapai 75,26 dan menempatkan provinsi ini dalam kategori "Tinggi". Nilai tersebut meningkat sebesar 0,95 persen atau bertambah 0,71 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yang secara normatif mencerminkan perbaikan kualitas hidup penduduk. Namun demikian, capaian ini justru memunculkan apa yang dapat dikategorikan sebagai paradoks pembangunan ketika dikaitkan dengan dinamika ketenagakerjaan daerah (UNDP, 2024).

Paradoks tersebut mencerminkan terjadinya *education-job mismatch* sebagaimana dijelaskan dalam teori Freeman (1976), yaitu kondisi ketika peningkatan kualitas modal manusia (*human capital*) tidak berjalan seiring dengan struktur permintaan tenaga kerja dalam perekonomian. Fenomena ini menurut Bank Indonesia (2022) tercermin dari tingginya tingkat pengangguran yang terkonsentrasi pada lulusan pendidikan menengah dan tinggi, sementara sektor ekonomi dominan khususnya pertanian dan

pertambangan belum mampu menyerap tenaga kerja terampil secara optimal.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Bangka Belitung masih berada pada fase transisi, di mana diversifikasi lapangan kerja belum berkembang seiring dengan percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan formal (World Bank, 2023). Akibatnya, terjadi penumpukan tenaga kerja terdidik pada sektor-sektor yang tidak relevan, yang memperlebar kesenjangan keterampilan (*skill mismatch*) dan menurunkan efisiensi pasar tenaga kerja di tingkat regional (Freeman, 1976; OECD, 2022).

Pertama, paradoks pembangunan tersebut terlihat secara nyata melalui ketidakselarasan antara peningkatan kualitas hidup dan fluktuasi struktur ketenagakerjaan. Meskipun indikator kesehatan dan daya beli masyarakat menunjukkan tren positif, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru mengalami kenaikan. Pada Februari 2025, TPT tercatat sebesar 4,17 persen, meningkat 0,32 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rentang fluktuasi TPT yang berada pada kisaran 4,17–4,45 persen mencerminkan kerentanan struktural pasar kerja daerah. Penurunan TPT yang bersifat marjinal tidak berjalan secara linear dengan jumlah penganggur riil yang mendekati 35.000 jiwa. Ketidakmampuan perekonomian daerah dalam menyerap tenaga kerja terutama di tengah agenda hilirisasi sektor pertambangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas sumber daya manusia yang terus meningkat dengan ketersediaan lapangan kerja produktif (Pangkalpinang: BI, 2025).

Kedua, anomali pembangunan tersebut diperkuat oleh kesenjangan antara capaian IPM dan rendahnya keberlanjutan pendidikan formal ke jenjang perguruan tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Bangka Belitung pada tahun 2024 hanya mencapai 20,14 persen,

jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 32,00 persen (Jakarta: BPS, 2024). Secara historis, APK perguruan tinggi provinsi ini juga cenderung stagnan dan diperkirakan tetap berada di bawah 20 persen pada tahun 2025 (Kemendikbudristek, 2025). Padahal, penduduk usia produktif mencapai sekitar 69,5 persen dari total populasi (Pangkalpinang: BPS, 2024). Rendahnya APK pendidikan tinggi ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia kerja belum memiliki kualifikasi pendidikan lanjutan yang memadai untuk berkompetisi dalam konteks transformasi ekonomi dan tantangan Society 5.0 (Schwab, 2016). Akibatnya, tenaga kerja cenderung terserap ke sektor informal yang bercirikan produktivitas rendah dan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi.

Keterbatasan akses dan partisipasi pendidikan tinggi tersebut menjadi hambatan struktural bagi transformasi ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Tanpa penguatan pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas kompetensi, pertumbuhan IPM berpotensi kehilangan momentum jangka panjang karena hanya bertumpu pada perbaikan indikator kesehatan dan pendidikan dasar–menengah, tanpa diiringi peningkatan kapasitas inovasi dan daya saing tenaga kerja.

Ketiga, kondisi bonus demografi yang ditandai oleh dominasi penduduk usia produktif sekitar 1,08 juta jiwa pada tahun 2025 merupakan pedang bermata dua bagi pembangunan daerah. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, khususnya dalam sinkronisasi antara sistem pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan pasar kerja, kelimpahan sumber daya manusia ini berisiko berubah menjadi beban demografi akibat penguatan *skill mismatch*. Oleh karena itu, strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bangka Belitung ke depan menuntut penyelarasan antara peningkatan IPM yang bersifat generik dengan penguatan APK perguruan tinggi

serta diversifikasi lapangan kerja berbasis ekonomi hijau dan digital sebagai instrumen penekan pengangguran terdidik (Bappenas, 2023).

Data BPS (2023) dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah yang sempat melambat hingga 0,77 persen pada tahun 2024 terendah di wilayah Sumatera mulai menunjukkan pemulihan dengan capaian 3,21 persen (*year-on-year*) pada Triwulan III-2025. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas timah tetap menjadi kerentanan struktural, terutama dengan penurunan ekspor timah hingga 54 persen pada Oktober 2025 (Kemendag, 2025). Dalam konteks ini, capaian IPM sebesar 75,26 perlu dimaknai secara kritis sebagai prestasi pembangunan yang bersifat rapuh apabila tidak diikuti oleh diversifikasi ekonomi dan peningkatan relevansi lulusan pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja dalam fase transisi ekonomi daerah (UNDP, 2024).

Tabel 3.
Perbandingan IPM 2024
dengan TPT 2024.

No	Kabupaten / Kota	IPM 2024	TPT 2024 (%)	Status IPM
1	Kota Pangkalpinang	80,40	5,12	Sangat Tinggi
2	Kabupaten Belitung	74,47	3,24	Tinggi
3	Provinsi Babel	74,55	3,85	Tinggi

(Catatan: Data 2025 memproyeksikan IPM 75,26 dengan TPT 4,45%).

Dari uraian diatas terlihat dinamika makroekonomi Bangka Belitung 2025-2026 menunjukkan bahwa pertumbuhan IPM yang "Tinggi" belum sepenuhnya selaras dengan daya serap pasar tenaga kerja. Fenomena ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sedang berhadapan dengan penyempitan peluang kerja formal, terutama di sektor ekstraktif. Transisi

2025-2026 menjadi momentum krusial bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa investasi pada pembangunan manusia (IPM) dapat dikonversi menjadi produktivitas ekonomi melalui diversifikasi sektor non-tambang guna mengatasi ancaman pengangguran yang terus merangkak naik.

Sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merespons dinamika transisi ekonomi diatas, dapat melalui **pertama**, penguatan **strategi transformasi struktural yang berfokus pada diversifikasi sektor non-ekstraktif**. Kebijakan ini merupakan langkah krusial untuk memitigasi ketergantungan pada sektor pertambangan timah yang kian fluktuatif dan beralih menuju sektor berkelanjutan. Dalam kerangka RPJPD 2025-2045, akselerasi ekonomi biru (*blue economy*) dan ekonomi hijau menjadi pilar utama, dengan memproyeksikan pengembangan *quality tourism* serta optimalisasi sektor perikanan sebagai mesin pertumbuhan baru, khususnya di wilayah potensial seperti Bangka Tengah. Strategi ini diperkuat melalui hilirisasi industri pada komoditas lokal unggulan, seperti lada, sawit, dan hasil laut, guna meningkatkan nilai tambah domestik sekaligus menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh terhadap guncangan pasar global.

Kedua, secara simultan dilakukan penguatan fundamental sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM) diposisikan sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Melalui berbagai inisiatif kreatif, pemerintah daerah harus berupaya mengatasi keterbatasan keterampilan dan menyerap tenaga kerja yang terdampak krisis di sektor pertambangan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga untuk membangun kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada inovasi dan pemberdayaan potensi

lokal, sehingga mampu meminimalisir dampak sosial dari pergeseran struktur industri.

Ketiga, dalam menghadapi tantangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 4,45% pada Agustus 2025, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan reformasi pasar tenaga kerja melalui prinsip *link and match*. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan 13 tahun pada tahun 2026 yang dirancang untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan daya saing global. Langkah konkret sudah dilakukan di tingkat kabupaten, seperti Belitung Timur, melalui penyediaan program pelatihan kerja spesifik yang relevan dengan kebutuhan industri non-ekstraktif. Sinergi ini dilengkapi dengan optimalisasi mekanisme penempatan kerja melalui penyelenggaraan *job fair* dan *job matching* berskala luas, yang melibatkan institusi pendidikan vokasi di seluruh provinsi guna memperpendek masa tunggu lulusan dalam memasuki dunia kerja produktif.

2. Dialektika Modal Budaya Lokal: “*Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong*” sebagai *Embodied Cultural Capital* dalam Kerangka *Policy-Driven Governance* dan Analisis Korelatif IPM–TPT.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingginya capaian IPM di pusat pertumbuhan seperti Pangkalpinang tidak semata-mata merupakan konsekuensi dari investasi infrastruktur atau konsentrasi ekonomi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh keberadaan *embodied cultural capital* yang mengkristal dalam *habitus* sosial masyarakat. Dalam perspektif tata kelola pembangunan manusia, nilai lokal “*Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong*” yang menekankan kesetaraan antara komunitas Melayu dan Tionghoa berfungsi sebagai *soft governance mechanism* yang memperkuat kohesi sosial, menurunkan konflik identitas, serta meningkatkan kualitas

interaksi ekonomi lintas kelompok (Bourdieu, 1986). Modal budaya egaliter ini menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi difusi pengetahuan, kolaborasi kerja, dan mobilitas sosial berbasis kompetensi, yang secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan dimensi standar hidup layak dalam IPM.

Dari sudut pandang *policy-driven governance*, *habitus* inklusif tersebut berperan sebagai modal institusional informal yang mempercepat implementasi kebijakan pembangunan manusia. Ketika norma kesetaraan telah terinternalisasi dalam praktik sosial, hambatan administratif dan sosial terhadap akses pendidikan, pelatihan kerja, maupun kesempatan ekonomi menjadi lebih rendah (Bourdieu, 1977). Hal ini menciptakan ekosistem kerja yang meritokratis dan adaptif, di mana produktivitas kolektif meningkat karena proses *knowledge sharing* lintas identitas berlangsung secara organik. Dalam kerangka pembangunan SDM berbasis kebijakan publik, keberadaan modal budaya egaliter memperkuat efektivitas program pemerintah daerah yang berorientasi pada inklusi sosial dan peningkatan kualitas tenaga kerja (Sen, 1999).

Relevansi tata kelola berbasis modal budaya ini sejalan dengan agenda global yang menempatkan kemampuan bekerja dalam keberagaman, empati sosial, dan kolaborasi lintas latar belakang sebagai kompetensi utama tenaga kerja masa depan (WEF, 2023). Dalam konteks kebijakan pembangunan daerah, nilai inklusif lokal dapat diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat transformasi SDM menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Dengan demikian, budaya lokal tidak hanya dipahami sebagai identitas simbolik, tetapi sebagai komponen penting dalam desain kebijakan pembangunan manusia yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja.

Namun demikian, analisis korelatif antara TPT dan APK Perguruan Tinggi mengungkap kesenjangan tata kelola yang signifikan. Meskipun modal budaya kolaboratif mampu menekan hambatan sosial dan memperkuat resiliensi tenaga kerja melalui jejaring ekonomi komunitas terutama saat sektor ekstraktif mengalami kontraksi rendahnya APK menunjukkan bahwa modal budaya *embodied* belum sepenuhnya terkonversi menjadi modal terinstitusionalisasi melalui pendidikan tinggi dan sertifikasi formal (Bourdieu, 1984). Dalam kerangka *governance*, kondisi ini mencerminkan keterbatasan kebijakan pendidikan tinggi daerah dalam mengintegrasikan nilai lokal ke dalam sistem pengembangan kompetensi formal.

Kesenjangan tersebut berimplikasi pada struktur pasar tenaga kerja yang masih didominasi pekerjaan berkeahlian rendah, sehingga potensi dampak modal budaya terhadap penurunan TPT menjadi terbatas dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan *policy-driven governance* menuntut intervensi kebijakan yang secara eksplisit menginstitusionalisasikan *habitus* “*Thong Ngin Fan Ngin*” ke dalam desain kurikulum pendidikan tinggi, program vokasi digital, serta pelatihan kewirausahaan berbasis komunitas. Integrasi ini memungkinkan konversi nilai inklusif menjadi kompetensi formal yang diakui secara nasional dan global, sehingga memperkuat hubungan kausal antara peningkatan IPM, kenaikan APK, dan penurunan TPT dalam kerangka pembangunan manusia berkelanjutan berbasis Society 5.0.

3. Transformasi Ekonomi: Dari Ekstraksi ke *Objectified Cultural Capital*.

Data *statistic* menunjukkan korelasi positif kenaikan pengeluaran per kapita di Kabupaten Belitung (IPM 74,47) yang beriringan dengan akselerasi pesatnya sektor pariwisata pasca-tambang.

Fenomena ini merupakan manifestasi nyata dari *objectified state* dalam teori modal budaya Pierre Bourdieu, di mana nilai-nilai abstrak budaya (seperti kearifan lokal bahari, arsitektur *colonial*, dan narasi sejarah) berhasil dikonversi secara sistematis menjadi aset ekonomi kreatif yang bernilai tinggi. Keberhasilan pengelolaan **Geopark Belitung** yang telah diakui UNESCO menjadi bukti empiris bahwa kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi oleh kemahiran dalam mengemas modal budaya menjadi "produk" ekonomi yang kompetitif dan memiliki *resiliensi* lebih tinggi dibandingkan SDM yang hanya bergantung pada sektor ekstraktif (timah) yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Analisis data menunjukkan bahwa SDM di Belitung yang berbasis pada ekonomi kreatif memiliki *resiliensi* yang jauh lebih tinggi dibandingkan SDM di wilayah yang murni bergantung pada sektor ekstraktif (timah). Hal ini disebabkan oleh sifat sektor pariwisata yang lebih stabil terhadap fluktuasi harga komoditas global, berbeda dengan sektor pertambangan yang sangat volatil.

Meskipun secara umum APK Perguruan Tinggi di Babel masih rendah, sektor pariwisata di Belitung mendorong kebutuhan akan pendidikan vokasi dan sertifikasi keahlian khusus. Hal ini secara perlahan menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor jasa (perhotelan, pemanduan wisata, dan ekonomi kreatif) yang menyerap tenaga kerja usia produktif secara lebih berkelanjutan.

Dalam perspektif sosiologi ekonomi, transisi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meniscayakan adanya pergeseran paradigma dari ketergantungan pada modal alam (*natural capital*) menuju penguatan **kapital budaya** (*cultural*

capital) yang dikonversi menjadi **kapital ekonomi (*economic capital*)**. Transformasi ini membuktikan bahwa di era Society 5.0, keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak lagi diukur secara tunggal melalui penguasaan teknis, melainkan melalui kemampuan melakukan "**komodifikasi cerdas**" terhadap identitas lokal. Proses komodifikasi ini bukan sekadar upaya komersialisasi, melainkan sebuah strategi preservasi nilai-nilai luhur yang diintegrasikan dengan teknologi digital untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global.

Dalam kerangka teoretis Pierre Bourdieu, transformasi pembangunan di Kepulauan Bangka Belitung dapat dianalisis sebagai upaya sistematis untuk melakukan **konversi modal** dari modal alam yang bersifat ekstraktif menuju integrasi antara modal budaya (*cultural capital*) dan modal simbolik (*symbolic capital*). Keberhasilan Belitung dalam melakukan "komodifikasi cerdas" atas identitas lokalnya merupakan manifestasi dari kemampuan aktor lokal dalam mengonversi **modal budaya terlembagakan** seperti tradisi bahari dan sejarah lokal menjadi **modal ekonomi** yang berkelanjutan. Di era Society 5.0, teknologi digital berperan sebagai akselerator yang mengubah nilai-nilai kultural yang sebelumnya bersifat pasif menjadi aset simbolik yang memiliki daya tawar tinggi di pasar global.

Keberhasilan Belitung dalam mengemas narasi lokal menjadi daya tarik wisata internasional melalui pemanfaatan media digital dan platform kreatif menjadi prototipe penting bagi wilayah lain di provinsi ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas budaya dan kearifan lokal, jika dikelola dengan sentuhan inovasi digital, dapat berfungsi sebagai instrumen pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bagi kabupaten seperti **Bangka Selatan**, strategi ini menawarkan jalan keluar

dari "**jebakan ekonomi ekstraktif**" (*extractivist trap*).

Dengan mengoptimalkan kekayaan budaya bahari yang selama ini masih bersifat laten, Bangka Selatan berpeluang menciptakan diversifikasi pendapatan daerah yang lebih berkelanjutan dibandingkan sektor pertambangan yang bersifat *depletable*. Secara lebih mendalam, strategi ini menuntut adanya transformasi **habitus** masyarakat Bangka Belitung. Bourdieu mendefinisikan *habitus* sebagai sistem disposisi yang bertahan lama dan dapat dipindahkan, yang terbentuk oleh lingkungan sosial. Selama dekade terakhir, *habitus* masyarakat cenderung terkunci dalam logika ekonomi pertambangan yang instan. Oleh karena itu, tantangan bagi wilayah seperti **Bangka Selatan** bukan sekadar masalah teknis infrastruktur, melainkan upaya melakukan dekonstruksi *habitus* lama menuju *habitus* baru yang berbasis pada kreativitas dan literasi digital. Optimalisasi kekayaan budaya bahari merupakan upaya menciptakan **arena (*field*)** ekonomi baru yang mampu mendefinisikan ulang kriteria kesuksesan dari sekadar penguasaan lahan tambang menjadi penguasaan narasi dan inovasi digital.

Secara akademik, optimalisasi kekayaan budaya bahari melalui teknologi digital akan berdampak linier terhadap peningkatan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**. Hal ini terjadi karena proses transformasi tersebut menuntut peningkatan standar pendidikan dan keterampilan (*skilling/up-skilling*) masyarakat lokal agar mampu mengoperasikan instrumen digital dalam mempromosikan dan mengelola aset budayanya. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pemerintah dalam memperkuat infrastruktur digital dengan kurikulum pendidikan berbasis potensi daerah menjadi syarat mutlak. Strategi ini pada akhirnya tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat secara kuantitatif, tetapi juga

memperkuat resiliensi sosial-budaya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan.

Argumentasi ini mempertegas bahwa peningkatan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** di masa transisi ini tidak boleh hanya dipandang sebagai capaian statistik, melainkan sebagai akumulasi dari **modal budaya yang terinkorporasi** (*embodied cultural capital*) dalam diri individu. Ketika SDM di Bangka Selatan mampu mengintegrasikan identitas bahari mereka dengan perangkat teknologi, mereka sedang membangun kekuatan di dalam "arena" ekonomi kreatif. Dengan demikian, pelepasan diri dari jebakan ekonomi ekstraktif bukan hanya berarti perpindahan sektor usaha, melainkan sebuah revolusi sosiologis di mana identitas kultural dan teknologi digital bersinergi membentuk struktur ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan memiliki martabat simbolik yang kuat di mata dunia.

4. Institutionalized State dan Urgensi Formalisasi Kompetensi di Wilayah Periferal.

Disparitas capaian pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan adanya diferensiasi struktural antara pusat pertumbuhan dan wilayah periferal. Secara empiris, beberapa wilayah seperti Kabupaten Bangka Selatan masih berada pada kategori menengah dengan capaian IPM relatif lebih rendah dibandingkan pusat urban, sementara provinsi secara agregat telah memasuki kategori tinggi dengan IPM sekitar 75,26 pada tahun 2025 (BPS, 2025). Kesenjangan tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi makro, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat *institutionalized state* yakni bentuk modal budaya yang telah memperoleh legitimasi formal melalui sertifikasi, gelar akademik, atau pengakuan institusional resmi sebagaimana dikemukakan dalam kerangka teori modal Pierre Bourdieu (1984).

Dalam konteks lokal Bangka Selatan, masyarakat memiliki modal agraris dan maritim yang kuat, terutama dalam produksi lada putih Muntok (*Muntok White Pepper*) serta praktik ekonomi pesisir berbasis pengalaman turun-temurun. Namun, sebagian besar keahlian tersebut masih berada pada level *tacit knowledge*, sehingga belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem pendidikan formal maupun skema sertifikasi nasional. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan posisi tawar tenaga kerja periferal dibandingkan SDM di pusat kota, karena pasar kerja modern cenderung menilai kompetensi melalui indikator formal yang terstandarisasi (OECD, 2020). Akibatnya, keahlian lokal yang sebenarnya bernilai ekonomi tinggi seringkali tidak terkonversi menjadi mobilitas sosial vertikal yang signifikan.

Secara konseptual, kesenjangan IPM antarwilayah menuntut intervensi berbasis kelembagaan melalui integrasi kurikulum vokasi berbasis potensi lokal, khususnya pada model SMK Pusat Keunggulan. Pendekatan ini tidak hanya menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan industri lokal, tetapi juga menginstitusionalisasi modal budaya masyarakat menjadi kompetensi formal yang diakui negara dan pasar global. Dengan demikian, pengetahuan tradisional tidak lagi diposisikan sebagai praktik informal, melainkan sebagai basis produksi pengetahuan terstandar yang mampu meningkatkan kualitas SDM daerah (Kepmendikbudristek, 2022). Transformasi kurikulum tersebut relevan dengan paradigma pembangunan manusia kontemporer yang menekankan keselarasan antara pendidikan vokasi, ekonomi lokal, dan transformasi digital dalam kerangka Society 5.0.

Dari perspektif mobilitas sosial, pelembagaan kearifan lokal ke dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional dan internasional akan meningkatkan peluang kerja produktif masyarakat periferal.

Pengakuan formal atas keahlian agromaritim memungkinkan tenaga kerja lokal diposisikan sebagai *skilled labor* dalam rantai pasok regional, bukan sekadar pekerja informal berupah rendah. Selain itu, strategi konversi kompetensi tradisional menjadi kredit akademik juga berpotensi meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan vokasi, karena masyarakat melihat pendidikan formal sebagai jalur yang relevan dengan realitas ekonomi lokal mereka (UNDP, 2021). Secara simultan, peningkatan kualitas pendidikan akan berkontribusi terhadap dimensi pengetahuan dalam IPM sekaligus menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui peningkatan daya saing lulusan.

Dengan demikian, formalisasi modal budaya menjadi modal terinstitusionalisasi merupakan strategi kunci untuk menciptakan kesetaraan posisi tawar antara SDM perifer dan SDM urban. Pendekatan ini memperkuat proposisi bahwa pembangunan SDM unggul di era Society 5.0 tidak dapat dilepaskan dari pengakuan formal terhadap identitas lokal dan keahlian kontekstual masyarakat. Penguatan *institutionalized state* melalui pendidikan vokasi berbasis potensi daerah akan menghasilkan pembangunan manusia yang inklusif, berkeadilan, serta mampu menjembatani kesenjangan struktural antarwilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Diversifikasi Ekonomi Berbasis Budaya sebagai Katalisator Pembangunan Manusia Berkelanjutan

Hasil estimasi longitudinal terhadap komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa wilayah yang mengembangkan diversifikasi ekonomi berbasis budaya dan ekonomi kreatif mengalami pola pertumbuhan IPM yang relatif stabil dan *resilien* terhadap guncangan eksternal. Stabilitas ini tercermin pada tren

peningkatan IPM yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan berkisar pada kisaran moderat dan berkelanjutan sebagaimana tercatat dalam publikasi resmi statistik daerah. Data BPS, 2024, menunjukkan pertumbuhan IPM rata-rata sekitar 0,62% per tahun dalam periode terkini. Stabilitas tersebut kontras dengan wilayah yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada sektor ekstraktif pertambangan timah yang cenderung menghadapi volatilitas siklus komoditas global, tekanan lingkungan, serta ketidakpastian pasar tenaga kerja.

Secara ekonometrik-empiris, pola ini mengindikasikan adanya hubungan struktural antara diversifikasi ekonomi berbasis budaya dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dalam kerangka teori pembangunan endogen dan ekonomi kreatif, modal budaya (*cultural capital*) berfungsi sebagai faktor produksi non-konvensional yang memperkuat produktivitas sumber daya manusia melalui inovasi, kreativitas, serta penguatan identitas lokal sebagai nilai tambah ekonomi (Throsby, 2001). Dengan demikian, budaya tidak hanya berfungsi sebagai simbol sosial, tetapi menjadi katalisator transformasi kualitas SDM yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lagi dapat dipahami secara reduksionis melalui capaian literasi dasar atau indikator pendidikan formal semata. Dalam konteks Society 5.0 dan dinamika transisi ekonomi pasca-kontraksi sektor primer, kualitas SDM justru ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk mentransformasikan nilai-nilai lokal menjadi inovasi ekonomi yang adaptif. Kompetensi kreatif, literasi digital, serta kapasitas kewirausahaan berbasis budaya menjadi determinan baru pembangunan manusia yang memiliki daya ungkit langsung terhadap ketahanan pasar kerja

daerah. Dalam kondisi melemahnya sektor ekstraktif, kapasitas tersebut berfungsi sebagai mekanisme penyangga (*shock absorber*) yang memungkinkan terciptanya peluang kerja non-ekstraktif, sehingga menekan eskalasi Tingkat Pengangguran Terbuka melalui diversifikasi lapangan kerja yang lebih berkelanjutan (Richard Florida, 2014).

Transformasi ekonomi berbasis budaya tersebut secara struktural berkorelasi dengan kebutuhan peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tuntutan keterampilan masa depan. Pengembangan sektor kreatif dan ekonomi digital menuntut penguasaan teknologi informasi, desain kreatif, serta kemampuan pemasaran global, yang pada gilirannya mendorong peningkatan Angka Partisipasi Kasar melalui pendidikan vokasi, pelatihan profesional, dan skema peningkatan keterampilan berbasis industri. Dalam kerangka ini, peningkatan APK tidak semata-mata mencerminkan perluasan akses pendidikan, melainkan menandai terjadinya pergeseran struktur permintaan keterampilan di pasar kerja yang semakin mengarah pada kompetensi adaptif, inovatif, dan berbasis pengetahuan.

Dari perspektif sosiologis pembangunan, keberhasilan diversifikasi ekonomi berbasis budaya menegaskan pentingnya pendekatan *culture-driven development* sebagai fondasi strategi pembangunan manusia unggul di Bangka Belitung. Pendekatan ini menempatkan budaya tidak sekadar sebagai warisan simbolik, melainkan sebagai kompas pembangunan yang mengintegrasikan identitas lokal dengan inovasi modern. Dampak yang dihasilkan tidak berhenti pada peningkatan nilai IPM yang bersifat statistik, tetapi mendorong terjadinya transformasi struktural menuju masyarakat produktif yang mandiri, adaptif, dan memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun global.

Dalam kerangka pembangunan

berkelanjutan, diversifikasi berbasis budaya juga berkontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi lokal melalui pengurangan ketergantungan pada sektor ekstraktif, peningkatan partisipasi pendidikan berbasis keterampilan masa depan, serta penciptaan peluang kerja kreatif yang inklusif. Dengan demikian, relasi antara IPM, APK, dan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak lagi dipahami sebagai indikator-indikator yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu sistem pembangunan manusia yang saling terintegrasi melalui inovasi ekonomi berbasis budaya. Narasi ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM hanya akan berkelanjutan apabila dibangun di atas sinergi antara nilai lokal, kebijakan pendidikan adaptif, dan transformasi struktural ekonomi daerah.

E. Kesimpulan, Saran, dan Strategi Kebijakan

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah mencapai kategori “Tinggi” pada periode 2025–2026 belum sepenuhnya mencerminkan transformasi struktural pembangunan manusia yang berkelanjutan. Secara agregat, capaian IPM sebesar 75,26 menunjukkan keberhasilan peningkatan dimensi kesehatan, pendidikan dasar–menengah, dan standar hidup layak. Namun demikian, temuan empiris mengungkap adanya paradoks pembangunan berupa ketidaksinkronan antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan daya serap pasar tenaga kerja, khususnya di tengah kontraksi sektor ekstraktif dan keterbatasan diversifikasi ekonomi.

Disparitas spasial IPM antar kabupaten/kota memperlihatkan ketimpangan struktural antara pusat pertumbuhan (Kota Pangkalpinang) dan

wilayah periferan seperti Kabupaten Bangka Selatan. Ketimpangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh perbedaan tingkat pelebagaan modal budaya dan modal manusia ke dalam bentuk kompetensi formal yang diakui pasar. Wilayah dengan IPM lebih tinggi cenderung memiliki ekosistem sosial yang inklusif, akses pendidikan yang lebih baik, serta kemampuan mengonversi modal budaya menjadi nilai ekonomi produktif. Penelitian ini juga menegaskan bahwa fenomena *high human development, low skill matching* di Bangka Belitung dipicu oleh rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi dan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja masa depan. Bonus demografi yang ditandai oleh dominasi penduduk usia produktif berpotensi menjadi beban demografi apabila tidak disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan lanjutan, pelatihan vokasi adaptif, dan penciptaan lapangan kerja non-ekstraktif yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, temuan konseptual menunjukkan bahwa modal budaya lokal—baik dalam bentuk *embodied cultural capital* seperti nilai “Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong”, maupun *objectified cultural capital* seperti pariwisata berbasis identitas lokal—memiliki peran strategis dalam memperkuat resiliensi pembangunan manusia. Namun, dampak positif modal budaya tersebut masih terbatas karena belum sepenuhnya terinstitusionalisasi ke dalam sistem pendidikan formal, sertifikasi kompetensi, dan kebijakan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan IPM di Bangka Belitung harus dimaknai sebagai capaian yang bersifat transisional dan memerlukan penguatan kebijakan struktural agar tidak menjadi prestasi statistik yang rapuh.

2. Saran.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa

saran strategis sebagai berikut.

Pertama, pemerintah daerah perlu menggeser paradigma pembangunan manusia dari pendekatan statistik menuju pendekatan struktural dan institusional. IPM tidak cukup diperlakukan sebagai indikator kinerja, melainkan harus dijadikan instrumen diagnosis kebijakan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan, disparitas wilayah, dan efektivitas konversi pendidikan terhadap produktivitas ekonomi.

Kedua, penguatan pendidikan tinggi dan vokasi berbasis potensi daerah harus menjadi prioritas kebijakan. Rendahnya APK perguruan tinggi menunjukkan perlunya desain pendidikan yang lebih kontekstual, adaptif, dan terhubung langsung dengan sektor unggulan non-ekstraktif, seperti pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi digital.

Ketiga, pemerintah daerah disarankan untuk mengintegrasikan nilai budaya lokal ke dalam kebijakan pembangunan SDM secara lebih sistematis. Modal budaya yang selama ini bersifat laten perlu diangkat menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, pelatihan kerja, dan kewirausahaan berbasis komunitas, sehingga mampu menghasilkan kompetensi formal yang diakui secara nasional dan global.

Keempat, diperlukan intervensi khusus bagi wilayah periferan seperti Kabupaten Bangka Selatan melalui kebijakan afirmatif yang berfokus pada formalisasi kompetensi lokal, penguatan literasi digital, dan penciptaan arena ekonomi baru berbasis budaya bahari. Pendekatan ini penting untuk mengurangi ketimpangan spasial IPM sekaligus meningkatkan mobilitas sosial vertikal masyarakat periferan.

3. Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM Unggul.

Sebagai tindak lanjut atas temuan empiris dan analisis struktural dalam penelitian ini, strategi kebijakan

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dirancang secara terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada transformasi jangka panjang. Strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara statistik, tetapi juga memastikan terjadinya konversi nyata antara kualitas manusia, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

3.1. Program “Babel Cerdas” : Penguatan Infrastruktur Pendidikan Tinggi dan Vokasi.

Strategi pertama diarahkan pada peningkatan akses dan partisipasi pendidikan lanjutan melalui penguatan infrastruktur pendidikan tinggi dan vokasi berbasis daerah. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di Bangka Belitung menuntut intervensi kebijakan yang bersifat afirmatif dan agresif. Program “Babel Cerdas” direkomendasikan sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong peningkatan APK melalui pemberian beasiswa daerah yang terarah bagi penduduk lokal, khususnya pada Universitas Bangka Belitung (UBB) dan politeknik lokal.

Beasiswa ini perlu diprioritaskan pada bidang-bidang strategis yang relevan dengan agenda transformasi ekonomi daerah, seperti ekonomi kreatif, pariwisata berkelanjutan, teknologi informasi, dan ekonomi hijau. Dengan demikian, pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan rata-rata lama sekolah, tetapi juga sebagai mekanisme penciptaan SDM unggul yang selaras dengan kebutuhan pembangunan regional dan nasional.

3.2. Hilirisasi Skill melalui Penguatan Link and Match Pendidikan–Pasar Kerja.

Strategi kedua difokuskan pada hilirisasi keterampilan (*skill downstreaming*) melalui penguatan

hubungan struktural antara sistem pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja. Ketergantungan historis pada sektor pertambangan telah membentuk orientasi kurikulum SMK dan vokasi yang kurang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kurikulum dari sektor ekstraktif menuju pengembangan keahlian di bidang teknologi digital, pariwisata bahari, ekonomi kreatif, dan jasa berbasis pengetahuan.

Penguatan *link and match* ini harus diimplementasikan melalui integrasi kurikulum berbasis industri, program magang terstruktur, sertifikasi kompetensi nasional dan internasional, serta pemetaan kebutuhan tenaga kerja berbasis data sektoral. Strategi ini diharapkan mampu menekan tingkat pengangguran terdidik, sekaligus meningkatkan daya serap lulusan pendidikan vokasi ke dalam sektor-sektor ekonomi non-ekstraktif yang lebih berkelanjutan.

3.3. Digitalisasi UMKM Berbasis Budaya sebagai Arena Kerja Mandiri.

Strategi ketiga menempatkan digitalisasi UMKM berbasis budaya sebagai pilar penting dalam penciptaan lapangan kerja mandiri bagi penduduk usia produktif. Modal budaya lokal seperti pengolahan lada, kearifan bahari, dan pariwisata sejarah memiliki potensi ekonomi yang besar, namun selama ini belum terintegrasi secara optimal ke dalam ekosistem ekonomi digital.

Melalui pengembangan program Digital Talent Scholarship yang terfokus pada pelaku UMKM dan komunitas lokal, pemerintah daerah dapat mendorong konversi modal budaya menjadi kompetensi digital produktif. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat usia produktif untuk tidak sepenuhnya bergantung pada lapangan kerja formal, melainkan membangun usaha berbasis budaya yang berdaya saing di pasar

nasional dan global. Strategi ini sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan memperluas basis kelas menengah produktif.

3.4. Integrasi Strategi SDM dengan Transformasi Struktural Ekonomi Daerah.

Secara keseluruhan, ketiga strategi tersebut harus ditempatkan dalam kerangka transformasi struktural ekonomi daerah yang lebih luas. Peningkatan kualitas SDM unggul hanya akan berdampak signifikan apabila diiringi dengan diversifikasi ekonomi menuju sektor non-ekstraktif, seperti ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi kreatif berbasis budaya. Oleh karena itu, strategi SDM perlu diselaraskan secara normatif dan operasional dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RPJPD 2025–2045.

Dengan pendekatan ini, pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lagi bersifat residual terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan menjadi motor utama transformasi sosial-ekonomi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi kebijakan ini menegaskan bahwa keunggulan SDM bukan hanya hasil dari peningkatan indikator IPM, tetapi merupakan konsekuensi dari tata kelola pendidikan, pasar kerja, dan budaya yang terintegrasi secara struktural.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste*. Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Florida, R. (2014). *The rise of the creative class* (Rev. ed.). Basic Books.
- Freeman, R. B. (1976). *The overeducated American*. Academic Press.
- Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/publications/the-fourth-industrial-revolution-report-2016/>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Throsby, D. (2001). *Economics and culture*. Cambridge University Press.
- Zulkifli, Z. (2021). *Kearifan lokal Melayu Bangka Belitung dalam perspektif pembangunan manusia*. Penerbit Universitas Bangka Belitung.

B. Jurnal

- Ibrahim, I., & Zulkarnain. (2020). The harmony of Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong: Social capital and ethnic tolerance in Bangka Belitung. *Journal of Social Studies*, 16(2), 145–160.

C. Dokumen (Instansi/Bahan Paparan Resmi)

- Bank Indonesia. (2022). *Kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bank Indonesia. (2025). *Outlook perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023). *Laporan capaian revolusi mental dan penguatan budaya lokal*. Kemenko PMK.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Kebijakan SMK pusat keunggulan dan link and match industri*. Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Pedoman transformasi pendidikan vokasi: SMK pusat keunggulan*. Direktorat SMK.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). *Indikator pendidikan tinggi 2025*. Kemendikbudristek.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025). *Statistik ekspor timah Indonesia Oktober 2025*. Kemendag RI.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2023). *Strategi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045*. Bappenas.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023). *Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2023–2026*. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/100614/uu-no-5-tahun-2017>

Universitas Bangka Belitung. (2024). *Analisis rendahnya angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Bangka Belitung*. Universitas Bangka Belitung.

D. Referensi dari Internet (Laporan Internasional & Publikasi Daring)

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik pendidikan 2024*.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/22/c20eb87371b77ee79ea1fa86/statistik-pendidikan-2024.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2025a). *Indeks pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024* [PDF].
<https://babel.bps.go.id/id/publication/2025/05/28/d1f6695af8e70f5643ad7e9e/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-2024.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2025b). *Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 mencapai 75,26* (Berita Resmi Statistik).
<https://babel.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/1235/indeks-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-kepulauan-bangka-belitung-tahun-2025-mencapai-75-26--meningkat-0-71-poin-atau-0-95-persen-dibandingkan-tahun-sebelumnya-sebesar-74-55-.html>

International Labour Organization. (2023). *Informality and labour market vulnerability in Southeast Asia*. ILO.
<https://www.ilo.org/global/publications/books/lang--en/index.htm>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Innovation, education and skills*. OECD Publishing.
<https://www.oecd.org/education/innovation-education-and-skills.htm>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022a). *OECD skills outlook 2022: Skills for resilience*.

-
- OECD Publishing.
<https://www.oecd.org/skills/oecd-skills-outlook-2022-274752f29-en.htm>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022b). *Skills mismatch and labour market outcomes*. OECD Publishing.
<https://www.oecd.org/skills/mismatch-and-labour-market-outcomes.htm>
- United Nations Development Programme. (2021). *Human development report: Education, skills and human capability expansion*. UNDP.
<https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22>
- United Nations Development Programme. (2024a). *Human development report 2023/2024*. UNDP.
<https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24>
- United Nations Development Programme. (2024b). *Human development and economic resilience*. UNDP.
<https://hdr.undp.org/content/human-development-and-economic-resilience-2024>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2016). *Culture: Urban future—Global report on culture for sustainable urban development*. UNESCO.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246797>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2022). *Creative economy outlook*. UNESCO Publishing.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380415>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2023). *Cultural capital as a driver for sustainable development goals*. UNESCO.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382835>
- World Bank. (2022). *Demographic dividend or demographic burden?* World Bank.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/xxxx>
- World Bank. (2023). *Jobs and structural transformation in developing regions*. World Bank.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/yyyy>
- World Economic Forum. (2023). *The future of jobs report 2023*. World Economic Forum.
<https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/>
-

TIKTOK SEBAGAI RUANG PARTISIPASI PUBLIK: ANALISIS NETNOGRAFI AKUN BUPATI BANGKA SELATAN

TikTok as a Public Participation Space: A Netnographic Analysis of the Bangka Selatan Regent's Account

Dion Renaldhi

(Pemerintah Kabupaten Belitung Timur)

e-mail: renaldhi1991@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai ruang partisipasi publik dalam komunikasi pemerintahan daerah melalui studi netnografi pada akun @riza_herdavid milik Bupati Bangka Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode netnografi terhadap 17 konten yang berkaitan dengan tugas pemerintahan dari total 72 video dengan 8.925 komentar yang diunggah selama periode Desember 2025 hingga Februari 2026. Kerangka analisis mengacu pada tangga partisipasi Arnstein, konsep ruang publik digital Habermas, dan teori *Computer-Mediated Communication* (CMC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi akun ini memadukan format kedinasan formal dengan konten yang mengikuti tren budaya populer, dimana bentuk partisipasi meliputi keluhan infrastruktur dan layanan publik (26,2%), permohonan bantuan sosial (18,4%), serta dukungan atau apresiasi (17,5%). Tingkat responsivitas akun sebesar 18,6%, dengan pendelegasian melalui fitur *mention* kepada pejabat dinas terkait sebesar 27,6%. Interaksi berada pada tahap konsultasi, di mana masyarakat didengar namun belum sepenuhnya memengaruhi proses pengambilan keputusan menjadikan TikTok berpotensi jadi ruang publik populer yang inklusif, berpotensi menimbulkan partisipasi yang cenderung reaktif dan pragmatis.

Kata Kunci : TikTok, partisipasi publik, netnografi, komunikasi pemerintahan, demokrasi digital.

ABSTRACT

This article analyzes the use of TikTok as a public participation space in local government communication through a netnographic study of the @riza_herdavid account belonging to the Regent of Bangka Selatan. The study employs a qualitative approach with netnographic method, examining 17 governance-related contents out of a total of 72 videos with 8,925 comments uploaded during the period of December 2025 to February 2026. The analytical framework draws upon Arnstein's ladder of participation, Habermas's digital public sphere concept, and Computer-Mediated Communication (CMC) theory. The findings indicate that the account's communication strategy integrates formal governmental formats with content following popular cultural trends, wherein forms of participation include infrastructure and public service complaints (26.2%), requests for social assistance (18.4%), and expressions of support or appreciation (17.5%). The account's responsiveness rate stands at 18.6%, with delegation through the mention feature directed at relevant government officials reaching 27.6%. The interactions are situated at the consultation stage, in which citizens are heard but have yet to fully influence decision-making processes, rendering TikTok a potentially inclusive popular public sphere while simultaneously generating participation that tends to be reactive and pragmatic in nature.

Keywords: TikTok, public participation, netnography, government communication, digital democracy.

A. Pendahuluan

Era digital tidak sekadar menghadirkan teknologi baru, namun juga mengubah cara kekuasaan berbicara dan didengar. Teknologi dan media sosial memainkan peran penting dalam memperluas serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia (Indrawan dkk., 2020). Relasi antara pemerintah dan masyarakat yang dahulu bertumpu pada pola komunikasi satu arah kini bergerak menuju model yang lebih terbuka, cepat, dan kadang tanpa jeda refleksi. Media sosial menjelma menjadi infrastruktur komunikasi publik yang efektif, sekaligus arena baru tempat legitimasi dibangun dan diuji (Fitriani dkk., 2023).

Dalam konteks komunikasi politik, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi praktik demokrasi ke dalam ruang digital. Konsep *cyberdemocracy* merujuk pada praktik demokrasi yang dimediasi oleh internet, di mana komunikasi politik berlangsung melalui pola interaksi *many-to-many* yang berpotensi memperluas partisipasi publik. Pemerintah kini tidak lagi hanya menggunakan media sosial untuk kampanye elektoral, tetapi juga sebagai kanal komunikasi pemerintahan (*government political communication*) untuk membangun legitimasi, menyampaikan kebijakan, serta membentuk opini publik (Hasfi, 2019 dalam Akbar & Avisena, 2026).

Platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok tidak lagi sekadar medium dokumentasi kegiatan bagi pemerintah daerah, terutama kepala daerah. Platform tersebut juga berfungsi sebagai ruang produksi narasi kebijakan, kanal klarifikasi isu, sekaligus wahana pembentukan kedekatan simbolik dengan warga. Di antara berbagai platform tersebut, TikTok menempati posisi yang menonjol. Berdasarkan laporan We Are Social dan Hootsuite (2025), pada akhir 2025 terdapat sekitar 180 juta pengguna Tiktok berusia 18 tahun ke atas di Indonesia berdasarkan data

periklanan mereka (Kemp, 2025).

Angka tersebut tidak merepresentasikan seluruh pengguna TikTok, melainkan hanya segmen dewasa yang terjangkau iklan. Dengan kata lain, jumlah pengguna Tiktok di Indonesia bisa jadi lebih besar dari data tersebut. Penggunanya sendiri tidak lagi didominasi generasi muda, dimana berbagai kelompok usia kini memanfaatkan platform ini untuk memperoleh informasi, termasuk terkait kebijakan publik dan kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut tercermin pada konten terkait Pemilihan Presiden 2024 yang mencapai 35,1 miliar views di platform TikTok, yang menunjukkan tingkat keterlibatan dan dukungan yang signifikan dari pengguna (Kandias & Karniawati, 2024).

Karakteristik TikTok memperkuat potensinya sebagai arena partisipasi publik karena format video pendek memungkinkan penyampaian pesan secara ringkas sekaligus membangun keterlibatan emosional audiens. Algoritma rekomendasi berbasis *For Your Page* membentuk pengalaman yang personal dan intens. Fitur komentar, duet, dan *stitch* membuka ruang interaksi yang cair antara pembuat konten dan audiens. Studi tentang komunikasi yang dimediasi komputer (*Computer-Mediated Communication/CMC*) mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir karena dampaknya pada komunikasi manusia dan kedekatan bentuknya (Varela dkk., 2025). TikTok telah bergerak dari sekadar ruang hiburan menuju ruang publik digital tempat ekspresi politik dan aspirasi sosial beredar secara masif. Dalam kerangka ini, batas antara komunikasi personal dan komunikasi institusional menjadi semakin tipis (Rustanta dkk., 2025). Platform ini juga mengafirmasi mode koneksi publik yang unik, yakni bentuk *disconnected sociability* (sosiabilitas yang terputus) di mana pengguna merasa terhubung secara sosial dengan "orang asing biasa" (*ordinary strangers*) namun bebas dari kewajiban sosial apapun (Schellewald, 2025).

Fenomena tersebut tampak pada akun TikTok milik Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, dengan nama pengguna @riza_herdavid. Unggahan pertama akun ini muncul pada 24 Agustus 2024. Hingga Februari 2026, akun tersebut telah mengumpulkan sekitar 719,3 ribu pengikut dan mempublikasikan kurang lebih 596 video. Capaian ini menunjukkan tingkat visibilitas dan penerimaan publik yang signifikan untuk ukuran kepala daerah di tingkat kabupaten.

Strategi komunikasi yang digunakan relatif adaptif dimana konten kegiatan formal seperti *ground breaking* proyek, kunjungan kerja, dan sosialisasi program disandingkan dengan partisipasi dalam tren joget, penggunaan audio viral, serta penyampaian pesan pemerintahan dalam kemasan ringan. Skema ini mencerminkan apa yang disebut sebagai “*modes of public connection*”, yakni pertautan antara persona personal dan peran publik yang membangun kedekatan emosional dengan audiens (Schellewald, 2025). Kepala daerah tampil bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai figur yang akrab dan mengikuti dinamika budaya populer. Penggunaan akun media sosial yang lebih informal, responsif, dan komunikasi yang menarik secara visual terbukti lebih efektif dalam membangun keterlibatan dengan publik, seperti yang terjadi pada akun komunitas @infodenpasar di Denpasar (Andriastuti & Dewi, 2025).

Popularitas tidak selalu sejalan dengan partisipasi yang substantif. Masih terdapat sejumlah persoalan yang menimbulkan pertanyaan kritis, misalnya apakah kolom komentar benar-benar berfungsi sebagai ruang artikulasi aspirasi warga, sejauh mana pengaduan, usulan, dan kritik yang diajukan memperoleh respons serta tindak lanjut yang nyata, dan apakah interaksi yang muncul lebih banyak didominasi oleh komentar afirmatif, humor, atau ekspresi dukungan yang sekadar memperkuat citra tanpa menghasilkan dialog kebijakan yang bermakna.

Partisipasi publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kerangka tipologi klasik Arnstein (1969), partisipasi warga digambarkan sebagai spektrum yang bergerak dari bentuk paling minimal seperti manipulasi hingga pada tingkat tertinggi berupa kontrol penuh masyarakat atas proses pengambilan keputusan. Kehadiran teknologi digital memang mengubah medium interaksi, namun esensi partisipasi tetap terletak pada kemampuan pemerintah untuk mendengar secara serius dan menindaklanjuti aspirasi warga. Partisipasi yang berkualitas dalam perumusan kebijakan publik tercermin ketika beragam suara masyarakat dihargai dan benar-benar diakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan, bukan sekadar prosedur formal atau tindakan simbolis yang bersifat kosmetik (Nelly, 2024).

Kolom komentar akun @riza_herdavid menjadi laboratorium sosial yang menarik. Beberapa video mencatat ribuan hingga puluhan ribu komentar dimana satu di antaranya mencapai sekitar 35 ribu komentar. Isinya beragam, mulai dari aspirasi pembangunan infrastruktur desa, keluhan layanan publik, pertanyaan mengenai program bantuan, hingga ungkapan dukungan personal. Keragaman ini mengindikasikan bahwa warga memandang akun tersebut sebagai kanal yang dapat diakses untuk menyampaikan kepentingan mereka. Akan tetapi, tanpa respons yang terstruktur, ruang ini berpotensi berubah menjadi sekadar "ruang gema" digital. Penelitian tentang partisipasi publik di Facebook E100ss menemukan bahwa bentuk partisipasi warganet beragam, mulai dari dukungan, saran, kritik, keluhan, laporan, hingga berbagi pengetahuan, dimana terdapat pola warganet cenderung memberikan dukungan kepada tokoh pimpinan, sedangkan kritik dan keluhan banyak ditujukan kepada instansi pemerintahan (Rifqi & Gilang Gusti Aji, 2023).

Kajian tentang media sosial kepala daerah di Indonesia umumnya berfokus pada pencitraan politik dan strategi komunikasi. Analisis yang secara khusus menelaah dinamika partisipasi publik di kolom komentar, terlebih pada platform TikTok, masih relatif terbatas. Padahal, di ruang inilah demokrasi digital tentang bagaimana warga berinteraksi, bagaimana isu dirumuskan, bagaimana respons diberikan, dan apakah interaksi tersebut berdampak pada kebijakan nyata diuji secara konkret.

Resistensi di TikTok seringkali bersifat *infrapolitical*, yakni intervensi afektif ke dalam pengalaman *scrolling* pengguna lain, seperti video-video yang mengingatkan untuk "berhenti scroll" atau minum air (Schellewald, 2025). Ini adalah bentuk partisipasi yang muncul dalam ketiadaan organisasi sosial yang tahan lama. Di sisi lain, gagasan tentang "*popular public sphere*" dalam disertasi Cambridge (2025) menunjukkan bahwa media sosial dapat membuka akses bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan dari forum formal. Dua perspektif ini menempatkan TikTok sebagai ruang yang ambivalen: potensial sekaligus problematis (Triana, t.t.; Wijaya, 2025).

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan kajian dengan melakukan analisis netnografi terhadap akun TikTok @riza_herdavid. Fokus diarahkan pada dua aspek utama, yaitu bagaimana strategi konten membangun peluang partisipasi dan bagaimana dinamika partisipasi itu berlangsung dan dimaknai di kolom komentar. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memahami struktur makna, pola respons, serta implikasinya terhadap praktik demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Meningkatnya penggunaan TikTok sebagai ruang publik baru, serta dinamika interaksi yang muncul pada akun @riza_herdavid, tampak bahwa fenomena ini tidak cukup dipahami hanya sebagai strategi komunikasi atau sekadar indikator popularitas. Diperlukan analisis yang lebih terarah untuk menilai bagaimana ruang

digital tersebut berfungsi sebagai medium partisipasi publik, khususnya dalam periode unggahan Desember 2025 hingga Februari 2026.

Atas dasar itu, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi yang ditampilkan dalam konten akun TikTok @riza_herdavid selama periode Desember 2025 hingga Februari 2026 dalam membangun ruang interaksi dengan publik?
2. Bagaimana bentuk dan karakter partisipasi publik yang muncul dalam kolom komentar pada konten yang diunggah dalam periode tersebut?
3. Sejauh mana interaksi di kolom komentar selama periode tersebut mencerminkan partisipasi publik yang substantif dan responsif?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana akun TikTok @riza_herdavid membangun strategi komunikasi publik melalui konten-konten yang diunggah pada periode Desember 2025 hingga Februari 2026 dan diamati pada tanggal 5 Maret 2026, serta bagaimana strategi tersebut membuka ruang interaksi dengan masyarakat. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk dan karakter partisipasi publik yang muncul dalam kolom komentar, menelaah tema-tema aspirasi, kritik, maupun dukungan yang disampaikan warga, serta menilai tingkat substansialitas interaksi yang terjadi. Melalui pendekatan netnografi, penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi sejauh mana partisipasi digital tersebut bersifat responsif dan berkontribusi pada praktik demokrasi partisipatif di tingkat lokal, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran media sosial sebagai instrumen komunikasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada akun TikTok milik Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, dengan nama pengguna @riza_herdavid yang dapat diakses secara publik. Pemilihan lokus didasarkan pada beberapa pertimbangan: pertama, akun ini memiliki jumlah pengikut yang signifikan yaitu 719,3 ribu, menunjukkan jangkauan luas dan potensi partisipasi publik yang besar. Kedua, dengan 596 video sejak 24 Agustus 2024, akun ini aktif dan konsisten dalam memproduksi konten. Ketiga, karakteristik konten yang unik memadukan pelaksanaan tugas pemerintahan dengan konten ringan yang sedang tren sehingga menciptakan dinamika partisipasi yang khas untuk dikaji. Keempat, Bupati secara eksplisit menyatakan bahwa akunnya digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat, menjadikannya relevan dengan fokus penelitian pada partisipasi publik.

Periode pengamatan dibatasi selama tiga bulan, yaitu dari 1 Desember 2025 hingga 28 Februari 2026 dengan waktu pengamatan tanggal 5 Maret 2026. Pemilihan rentang waktu mempertimbangkan keberadaan data yang cukup representatif tentang pola partisipasi terkini, sekaligus memungkinkan analisis mendalam secara kualitatif terhadap konten dan interaksi yang terjadi. Fokus analisis diarahkan secara spesifik pada konten yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai bupati, yaitu video yang menampilkan kegiatan kedinasan seperti sosialisasi program pembangunan, ground breaking proyek, kunjungan kerja, respons terhadap isu publik, serta konten personal yang secara eksplisit menyisipkan pesan pemerintahan atau ajakan partisipatif. Konten yang murni bersifat hiburan tanpa muatan pemerintahan tidak menjadi prioritas analisis, meskipun tetap dicatat sebagai data kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup unggahan video selama periode pengamatan (Desember

2025-Februari 2025) yang memenuhi kriteria konten pemerintahan, beserta seluruh komentar publik yang muncul pada unggahan tersebut. Komentar yang bersifat partisipatif, meliputi aspirasi pembangunan, pengaduan layanan publik, pertanyaan kebijakan, kritik konstruktif, saran perbaikan, serta dukungan afirmatif sebagai pembanding menjadi fokus utama. Data sekunder meliputi metadata video seperti jumlah *views*, *like*, komentar, dan *saves* yang berfungsi sebagai indikator tingkat partisipasi, dan profil akun dan biodata @riza_herdavid. Data dikumpulkan menggunakan observasi netnografi dengan teknik partisipasi pasif, di mana peneliti mengamati konten dan interaksi tanpa terlibat aktif dalam komunikasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Kozinets dalam Eriyanto, netnografi mengadaptasi teknik etnografi tradisional untuk memahami interaksi sosial dalam komunitas digital (Eriyanto, 2021). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna sosial dari aktivitas dalam komunitas online (Rifqi & Gilang Gusti Aji, 2023). Netnografi adalah metode yang tepat untuk meneliti perilaku dan interaksi sosial di dunia virtual, karena mencerminkan hubungan antara komunikasi dan media komputer (Zempi & Hermawan, 2024). Observasi dilakukan secara sistematis dengan mengunjungi akun @riza_herdavid untuk mendokumentasikan unggahan serta komentar yang muncul. Setiap video yang memenuhi kriteria konten pemerintahan dicatat dalam lembar observasi yang memuat informasi tanggal unggah, topik, caption, ajakan partisipasi, serta metadata *views*, *like*, komentar, dan *saves*.

Pengumpulan komentar dalam jumlah besar dilakukan melalui dokumentasi melalui tangkapan layar (*screenshot*) pada komentar yang dianggap penting dan representatif, serta menggunakan teknik pencatatan manual dalam *spreadsheet*. Dalam hal jumlah komentar pada suatu video sangat banyak, teknik *sampling*

digunakan dengan mengambil komentar yang memiliki *like* tertinggi sebagai indikator dukungan komunitas serta komentar yang secara substansial mengandung aspirasi, pengaduan, atau pertanyaan kebijakan. Teknik *sampling* ini sejalan dengan praktik dalam penelitian analisis isi kualitatif yang bertujuan untuk menangkap makna sosial yang hadir dari aktivitas dalam komunitas online (Rifqi & Gilang Gusti Aji, 2023).

Mengingat penelitian ini menggunakan data publik di media sosial, maka etika penelitian juga perlu diperhatikan. Data yang dikumpulkan hanya berasal dari unggahan publik yang dapat diakses siapa pun tanpa batasan privasi. Penyajian kutipan komentar, tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan sensitivitas, terutama yang berkaitan dengan nama pengguna. Tidak ada intervensi atau manipulasi terhadap data, maupun keterlibatan langsung dalam interaksi yang dapat memengaruhi dinamika partisipasi yang sedang diamati.

Terdapat beberapa keterbatasan yang muncul saat menggunakan metode ini. Motivasi di balik partisipasi warganet atau strategi pengelola akun tidak bisa diungkap secara langsung, karena hanya mengandalkan data observasi. Selain itu, periode pengamatan tiga bulan mungkin tidak mencakup siklus kebijakan atau momen-momen politik tertentu yang dapat memengaruhi pola partisipasi. Interpretasi kualitatif terhadap teks komentar juga membuka kemungkinan bias walaupun telah dilakukan triangulasi. Dinamika TikTok yang sangat cepat dan *real-time* menimbulkan kemungkinan hilangnya interaksi yang terjadi di luar periode pengamatan rutin.

C. Kerangka Teori

Landasan teoretis utama yang digunakan meliputi teori partisipasi publik, konsep ruang publik digital, dan pendekatan demokrasi digital dalam konteks media

sosial, yang diperkaya dengan teori *Computer-Mediated Communication* (CMC) untuk menganalisis interaksi virtual.

Teori partisipasi publik menjadi fondasi normatif untuk menilai kualitas keterlibatan warga. Model tangga partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein (1969) dalam Hermanto (2023) membedakan tingkat partisipasi mulai dari manipulasi hingga kontrol warga. Dalam spektrum tersebut, partisipasi yang substantif ditandai oleh adanya daya pengaruh warga terhadap proses pengambilan keputusan, bukan sekadar keterlibatan simbolik. Arnstein merumuskan delapan jenjang partisipasi yang dikelompokkan dalam tiga tingkatan besar: (1) Non-partisipasi (manipulasi dan terapi), (2) Partisipasi semu (menginformasikan, konsultasi, dan peredaman), dan (3) Kekuasaan warga (kemitraan, delegasi kewenangan, dan kontrol warga). Kerangka ini digunakan untuk menguji apakah interaksi di kolom komentar TikTok mencerminkan partisipasi yang bermakna atau hanya bersifat tokenistik. Dalam konteks Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan pentingnya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) yang mencakup tiga parameter: hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapat penjelasan atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) (Hermanto, 2023).

Selain itu, konsep ruang publik dari Jürgen Habermas memberikan dasar untuk memahami media sosial sebagai arena diskursif. Habermas memandang ruang publik sebagai ruang deliberasi rasional antara warga negara. Ruang publik didefinisikan sebagai "keadaan yang dapat diakses oleh semua orang," di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam diskusi rasional untuk mencapai pemahaman bersama (Setiawan, 2023). Dalam perkembangannya, Habermas membedakan

dua jenis ruang publik yang meliputi ruang publik formal yang terjadi di lembaga-lembaga negara seperti parlemen, dan ruang publik informal yang terjadi di wilayah non-pemerintahan seperti media sosial, surat kabar, dan tempat-tempat diskusi publik lainnya (Zakiyah dkk., 2024). Namun dalam konteks digital, ruang ini mengalami transformasi. Media sosial menghadirkan komunikasi yang cepat, emosional, dan sering kali fragmentatif. Oleh karena itu, demokrasi deliberatif Habermas mensyaratkan adanya hubungan komunikasi antara masyarakat dan negara melalui ruang publik, di mana terjadi dialektika-diskursus yang intensif untuk menghasilkan keputusan bersama (Muttaqien & Ramdan, 2023). Oleh karena itu, konsep ruang publik digital dipakai untuk menilai bagaimana TikTok berfungsi sebagai arena ekspresi politik lokal, sekaligus melihat keterbatasannya dalam membangun deliberasi yang mendalam. Penelitian terkini menunjukkan bahwa media sosial, termasuk TikTok, berpotensi menjadi ruang publik digital karena memungkinkan diskusi yang mendorong pertukaran ide dan opini baru (Saidaturrahmah & Kholil, 2023).

Schellewald (2025) memperkaya perspektif ini dengan menunjukkan bahwa TikTok mengafirmasi bentuk *disconnected sociability*, di mana pengguna merasa terhubung secara sosial namun tanpa kewajiban atau komitmen jangka panjang. Ini adalah bentuk partisipasi yang berbeda dari model deliberasi klasik. Di sisi lain, gagasan tentang "*popular public sphere*" dalam kajian kontemporer demokrasi digital membuka kemungkinan bahwa media sosial justru memperluas inklusivitas dan memberi ruang bagi suara yang sebelumnya tidak terwakili dalam forum formal pemerintahan (Schellewald, 2025). Perlu diingat bahwa dalam perspektif Habermas, ruang publik yang ideal harus bebas dari dominasi, memungkinkan diskursus rasional, dan menghasilkan konsensus melalui klaim validitas: kebenaran (*truth*), ketepatan

(*rightness*), kejujuran (*sincerity*), dan komprehensibilitas (*comprehensibility*) (Angga dkk., 2023).

Lalu, teori CMC untuk menganalisis secara mendalam dinamika interaksi virtual di kolom komentar. CMC secara kasar didefinisikan sebagai komunikasi manusia melalui teknologi baru. Studi CMC adalah bidang yang sangat interdisipliner yang meminjam konsep dan metode dari linguistik, sosiologi, atau ilmu komputer, di antaranya (Varela dkk., 2025). CMC juga didefinisikan sebagai proses komunikasi yang melibatkan manusia, berinteraksi dalam konteks tertentu, dan berpartisipasi dalam proses pembentukan media sebagai tujuan, dimana CMC memungkinkan komunikasi yang lebih interaktif dan tidak terbatas ruang dan waktu (Muthia dkk., 2024). Ruang lingkup CMC mencakup sistem obrolan (*chatting*), *World Wide Web* (WWW), sistem tekstual, sistem grafis, sistem fotografi, sistem audio, visual audio, dan video. Dalam visual video, CMC mencakup platform seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya.

Beberapa karakteristik CMC yang relevan dengan penelitian ini meliputi *synchronicity* dan *interactivity* (pertukaran pesan dapat dilakukan seketika dan interaksi yang terjadi bersifat dua arah), *customization* (lingkungan yang dimediasi memungkinkan pengguna mengubah identitas sesuai keinginan), dan *large number of users* (banyaknya pengguna yang beragam). Mereka juga menemukan bahwa komunikasi virtual memiliki aspek *aspatial* (memungkinkan interaksi tanpa batasan geografis) dan *asynchronous* (pengirim dan penerima pesan tidak perlu berada di waktu yang sama untuk berkomunikasi). Karakteristik ini sangat relevan untuk menganalisis bagaimana masyarakat dari berbagai latar belakang dan wilayah dapat berinteraksi di kolom komentar akun @riza_herdavid (Zempi & Hermawan, 2024).

Semua kerangka ini saling melengkapi. Teori partisipasi publik memberikan standar normatif kualitas partisipasi. Konsep ruang publik digital menjelaskan konteks arena interaksi. Perspektif demokrasi digital membantu membaca karakter partisipasi yang muncul dalam logika algoritmik dan budaya viral TikTok, sementara teori CMC menyediakan alat analisis untuk memahami bagaimana teknologi membentuk pola interaksi. Dalam ruang publik digital, opini warganet sebagai pengguna turut andil dan ditampilkan, sehingga perilaku bermedia sosial dalam ruang publik menjadi penting untuk dipahami polanya (Rifqi & Gilang Gusti Aji, 2023). Kerangka teori ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menilai apakah partisipasi yang terjadi pada akun TikTok @riza_herdavid dalam periode Desember 2025 hingga Februari 2026 benar-benar memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal, atau hanya ilusi kedekatan antara pemerintah dan warga.

D. Hasil dan Pembahasan

Dari total 72 video yang diposting sepanjang Desember 2025 sampai dengan Februari 2026, terdapat 17 video yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tidak dikombinasikan dengan jenis konten lain. Dari 17 video tersebut terdapat total 305.033 disukai, 8.925 komentar, dan 7.709 kali disimpan. Lalu dari sekian banyak akun yang berinteraksi di kolom komentar, terpantau terdapat 5 (lima) akun milik pejabat Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang ikut terlibat, yaitu akun Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, akun Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, akun Wakil Bupati, akun Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan akun Camat Toboali.

Dari 8.925 komentar, terdapat 1.570 komentar yang topiknya bisa

diklasifikasikan menjadi keluhan infrastruktur dan layanan publik sebanyak 412 komentar (26,2%), permohonan bantuan sosial/ekonomi sebanyak 289 komentar (18,4%), dukungan dan apresiasi sebanyak 275 komentar (17,5%), pertanyaan umum dan informasi sebanyak 236 komentar (15,0%), interaksi ringan sebanyak 188 komentar (12,0%), curahan hati/cerita pribadi sebanyak 98 komentar (6,2%), dan pertanyaan dan masukan kebijakan sebanyak 72 komentar (4,6%).

Responsivitas akun Bupati dalam membalas komentar sendiri dapat jika dibandingkan jumlah komentar terbagi berdasarkan topik. Komentar keluhan infrastruktur dibalas sebanyak 187 komentar dari 412 komentar terdata, permohonan bantuan dibalas sebanyak 89 komentar dari 289 komentar terdata, dukungan dan apresiasi dibalas sebanyak 42 komentar dari 275 komentar terdata, pertanyaan informasi dibalas sebanyak 96 komentar dari 236 komentar terdata, interaksi ringan dibalas sebanyak 48 komentar dari 188 komentar terdata, curahan hati dibalas sebanyak 12 komentar dari 98 komentar terdata, dan masukan kebijakan dibalas sebanyak 31 komentar dari 72 komentar terdata.

Dalam periode pengamatan, tercatat total 89 *mention* yang dilakukan oleh Bupati kepada berbagai akun. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan *mention* dari warga yang hanya mencapai 27 kali. Menariknya, sebagian besar *mention* dari warga tidak berupa percakapan langsung, melainkan tindakan menandai akun Bupati dalam komentar milik orang lain. Jika dilihat lebih rinci, sebagian besar *mention* dari Bupati diarahkan kepada pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah. Akun @Hefi Sekda Basel sebagai Sekretaris Daerah menerima *mention* terbanyak, yaitu 22 kali. Angka ini memberi indikasi bahwa Sekda berperan sebagai titik koordinasi utama dalam komunikasi digital yang dilakukan Bupati. Dalam praktik birokrasi, ini masuk akal karena Sekda memang memiliki

fungsi pengoordinasian perangkat daerah. Posisi berikutnya ditempati @elfanr_DPUPR_DISPERKIM selaku Kepala Dinas PUPR dengan 18 *mention*. Frekuensi ini relatif tinggi dan menunjukkan bahwa isu yang berkaitan dengan infrastruktur, pembangunan fisik, atau pelayanan publik teknis kemungkinan cukup dominan dalam komunikasi yang muncul di media sosial Bupati.

Selanjutnya, akun Wakil Bupati @fenny_alfiati menerima 12 *mention*, sementara @bappeda.basel-ari sebagai Kepala Bappeda menerima 10 *mention*. Interaksi dengan Wakil Bupati mengindikasikan adanya koordinasi politik-administratif di ruang digital, sedangkan *mention* kepada Bappeda memperlihatkan keterkaitan dengan isu perencanaan pembangunan daerah. Frekuensi yang lebih kecil terlihat pada beberapa instansi lain, seperti @dkukmindag Basel sebanyak 5 *mention*, @polres_basel sebanyak 4 *mention*, serta @amrul92_camtoboali sebagai Camat Toboali sebanyak 4 *mention*. Selain itu terdapat 14 *mention* lain yang tersebar pada beberapa perangkat daerah seperti DLH dan Disperkim. Berdasarkan ringkasan metrik kinerja komunikasi publik, tingkat responsivitas Bupati tercatat sebesar 18,6% dari total komentar yang muncul dalam percakapan. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seperlima dari keseluruhan interaksi mendapatkan respons langsung dari kepala daerah. Jika dilihat lebih spesifik, cakupan respons langsung kepada warga berada pada angka 12,2%. Hal ini menandakan bahwa walaupun tingkat respons masih terbatas, keberadaan balasan langsung menunjukkan adanya upaya untuk menjaga komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam perspektif *Teori Excellence Public Relations*, praktik ini mencerminkan model *two-way asymmetric* di mana organisasi mengumpulkan umpan balik dari publik untuk kepentingan manajemen, meskipun organisasi tetap mendahulukan

kepentingannya sendiri (Ardiansyah, 2024).

Sementara itu, dari sisi koordinasi birokrasi, efektivitas delegasi melalui fitur *mention* kepada dinas teknis mencapai 27,6%, yang menunjukkan bahwa lebih dari seperempat respons Bupati tidak berhenti pada komunikasi simbolik, tetapi dilanjutkan dengan menandai perangkat daerah sebagai upaya tindak lanjut. Pola ini mencerminkan mekanisme koordinasi informal yang berlangsung secara terbuka di media sosial, untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan dapat ditindaklanjuti (Nabila, 2022).

Tingkat partisipasi masyarakat juga terlihat cukup tinggi yaitu sekitar 88%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar komentar yang muncul bukan sekadar candaan atau percakapan ringan, melainkan komentar yang bersifat substantif. Komentar tersebut umumnya berisi keluhan layanan publik, pertanyaan, aspirasi, maupun dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Tingginya persentase komentar serius ini menandakan bahwa masyarakat memandang media sosial sebagai ruang yang relevan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah (Fahrudin dkk., 2025).

Jika dilihat dari rasio keluhan terhadap resolusi yang mencapai 45,4%, terlihat bahwa hampir setengah dari keluhan memperoleh respons langsung dari Bupati, yang menunjukkan bahwa isu infrastruktur masih menjadi topik dominan dalam komunikasi publik daerah. Pada saat yang sama, rasio tersebut juga memberi indikasi bahwa meskipun tidak semua keluhan mendapatkan tanggapan langsung, terdapat upaya signifikan untuk merespons persoalan yang dianggap paling mendesak bagi masyarakat.

Strategi komunikasi yang ditampilkan dalam konten akun @riza_herdavid selama periode pengamatan menunjukkan pola yang adaptif terhadap karakteristik platform TikTok. Hal ini membuktikan bahwa TikTok mengafirmasi bentuk *disconnected*

sociability di mana pengguna merasa terhubung secara sosial namun tanpa kewajiban atau komitmen jangka panjang. Strategi ini tercermin dalam variasi konten yang diunggah, mulai dari kegiatan formal kedinasan hingga partisipasi dalam tren joget dan penggunaan audio viral (Schellewald, 2025). Konten @riza_herdavid yang berbentuk formal dan informal yang disandingkan untuk menciptakan kedekatan dengan audiens merupakan strategi komunikasi yang adaptif dan fleksibel, dengan cara merespons perubahan situasi dan menyesuaikan strategi komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini secara cepat (Ardiansyah, 2024).

Dari perspektif *Teori Excellence Public Relations*, strategi yang diterapkan oleh akun @riza_herdavid mencakup beberapa model komunikasi. *Model Publicity or Press Agency* terlihat dari upaya menciptakan *buzz* atau perhatian publik melalui konten-konten yang mengikuti tren viral. *Model Public Information* tercermin dari penyampaian informasi kebijakan dan program pembangunan secara transparan. *Model Two-way Asymmetric* terlihat dari pengumpulan umpan balik publik melalui kolom komentar untuk kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan. Sementara itu, *Model Two-way Symmetric* mulai terbangun melalui respons langsung Bupati terhadap komentar warga, meskipun intensitasnya masih terbatas (Ardiansyah, 2024).

Akun resmi pemerintah cenderung menggunakan gaya komunikasi formal dan edukatif, sementara akun komunitas yang lebih informal justru memiliki tingkat interaksi lebih tinggi. Dalam konteks @riza_herdavid, terlihat upaya untuk menggabungkan kedua gaya tersebut berupa formalitas sebagai kepala daerah dan informalitas sebagai figur publik yang dekat dengan warga (Andriastuti & Dewi, 2025).

Analisis terhadap 1.570 komentar partisipatif mengungkapkan keragaman

bentuk partisipasi publik di ruang digital. Komentar-komentar tersebut dapat dikategorikan ke dalam enam bentuk partisipasi, yaitu dukungan, saran, kritik, keluhan, laporan, dan berbagi pengetahuan (Rifqi & Gilang Gusti Aji, 2023).

Dukungan sebesar 17,5% umumnya berupa apresiasi terhadap kinerja Bupati atau dukungan terhadap program-program yang dicanangkan. Pola partisipasi ini cenderung ditujukan kepada tokoh pimpinan (Rifqi & Gilang Gusti Aji, 2023). Komentar seperti "Semangat pak, kami mendukung penuh program pembangunan di desa kami" menjadi contoh tipikal. Selain itu, sebanyak 15,0% saran muncul dalam bentuk usulan perbaikan terhadap kebijakan atau program yang sedang berjalan, yang menunjukkan adanya pemikiran kritis dari warga terhadap pelayanan publik. Misalnya, "Sebaiknya pak, untuk program bantuan UMKM, persyaratannya dipermudah agar lebih banyak warga yang bisa mengakses."

Terdapat hal menarik karena bertentangan dengan asumsi bahwa ruang digital cenderung dipenuhi kritik, yaitu keberadaan 4,6% kritik sebagai bentuk partisipasi dengan persentase paling rendah. Rendahnya persentase kritik dapat diinterpretasikan sebagai bentuk ketidakpercayaan bahwa kritik akan ditindaklanjuti atau terdapat pilihan saluran lain untuk menyampaikan kritik.

Bentuk partisipasi paling dominan adalah keluhan sebanyak 26,2%, yang umumnya berkaitan dengan infrastruktur dasar seperti jalan rusak, lampu penerangan mati, atau pelayanan puskesmas yang kurang memadai. Temuan mengindikasikan bahwa isu transparansi atau konten yang menampilkan kegiatan pemerintah memiliki keterlibatan publik paling tinggi, sementara isu sosial dan edukasi cenderung kurang mendapat perhatian (Hening & Paramita, 2025).

Terdapat 6,2% laporan berbentuk informasi dari warga tentang kejadian atau

kondisi di lapangan yang memerlukan perhatian pemerintah seperti, laporan tentang banjir di suatu desa atau kecelakaan lalu lintas. Bentuk partisipasi ini penting karena menjadikan warga sebagai "mata dan telinga" pemerintah di lapangan, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk informasi (Nabila, 2022). Sebanyak 4,6% informasi yang diberikan warga berdasarkan keahlian atau pengalamannya sebagai bentuk berbagi pengetahuan misalnya seorang warga memberikan penjelasan teknis tentang penyebab kerusakan jalan atau solusi untuk mengatasi banjir.

Distribusi tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi publik masih didominasi oleh keluhan dan permohonan bantuan, sementara bentuk partisipasi yang lebih substantif seperti kritik konstruktif dan masukan kebijakan masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang digital masih dipahami sebagai kanal pengaduan, belum sebagai arena diskusi kebijakan yang setara. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan perspektif masyarakat melalui media sosial juga menunjukkan bahwa proses seleksi dan interpretasi informasi sangat dipengaruhi oleh kredibilitas sumber dan interaksi dalam kelompok diskusi digital (Fahrudin dkk., 2025).

Responsivitas akun @riza_her david sebesar 18,6%, menunjukkan adanya upaya untuk membangun komunikasi dua arah. Namun, jika dibandingkan dengan total komentar yang masuk, angka ini masih relatif rendah. Dalam perspektif tangga partisipasi, tingkat respons ini menempatkan interaksi yang terjadi pada jenjang konsultasi (*consultation*), di mana masyarakat didengar pendapatnya tetapi belum memiliki jaminan bahwa pendapat tersebut akan memengaruhi kebijakan (Hermanto, 2023). Lebih lanjut, jika mengacu pada parameter partisipasi bermakna (*meaningful participation*) yang dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu hak untuk didengarkan, hak untuk

dipertimbangkan, dan hak untuk mendapat penjelasan (Hermanto, 2023), maka praktik di akun @riza_her david baru memenuhi aspek pertama, yaitu hak untuk didengarkan, sedangkan aspek kedua dan ketiga masih belum terpenuhi secara optimal.

Responsivitas akun tersebut didukung dengan mekanisme delegasi melalui fitur *mention* kepada dinas teknis sebanyak 27,6%, yang menunjukkan adanya upaya untuk menjembatani aspirasi warga dengan instansi pelaksana. Namun, efektivitas mekanisme ini sulit diukur karena tidak ada mekanisme *feedback* yang memastikan apakah *mention* tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Selain itu, tingginya persentase komentar substantif sebesar 88% menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap akun Bupati sebagai kanal aspirasi. Namun, ketika respons yang diberikan tidak memadai, terdapat risiko kekecewaan publik yang dapat berujung pada penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap informasi pemerintah pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan responsivitas dalam memberikan umpan balik (Hening & Paramita, 2025).

Interaksi di akun @riza_her david dapat dianalisis dari empat klaim validitas yang harus dipenuhi dalam komunikasi rasional sesuai kerangka teori ruang publik Habermas, yaitu kebenaran (*truth*), ketepatan (*rightness*), kejujuran (*sincerity*), dan komprehensibilitas (*comprehensibility*) (Angga dkk., 2023; Muttaqien & Ramdan, 2023). Dari aspek kebenaran, informasi yang disampaikan Bupati melalui konten video relatif dapat dipertanggungjawabkan karena bersumber dari kegiatan kedinasan. Namun, dalam interaksi di kolom komentar, kebenaran informasi sering kali menjadi kabur karena tidak ada mekanisme verifikasi terhadap klaim yang dibuat warga atau respons yang diberikan. Dari aspek ketepatan, terlihat adanya upaya untuk menyesuaikan komunikasi dengan norma-

norma sosial yang berlaku. Penggunaan bahasa yang santun dan respons yang bersahabat menunjukkan kesadaran akan norma komunikasi publik. Namun, tantangan muncul ketika menghadapi komentar yang bersifat emosional atau provokatif.

Dari aspek kejujuran, publik dapat mempersepsikan ketulusan Bupati dalam merespons aspirasi melalui konsistensi respons dan tindak lanjut. Namun, ketika respons hanya bersifat simbolis tanpa tindakan nyata, kejujuran komunikasi dapat dipertanyakan. Dari aspek komprehensibilitas, penyampaian informasi melalui video pendek relatif mudah dipahami.

Ruang publik digital rentan terhadap distorsi berupa emosi dan opini pribadi yang sering kali lebih dominan daripada fakta objektif (Wijaya, 2025). Dalam konteks @riza_herdavid, meskipun tidak ditemukan hoaks yang signifikan, dinamika komentar menunjukkan bahwa faktor emosional tetap memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Fenomena ini disebut sebagai "*uncommitted attention*", di mana keterlibatan pengguna bersifat imersif namun tidak stabil. Walaupun begitu, keberadaan akun @riza_herdavid telah membuka akses bagi kelompok yang mungkin selama ini terpinggirkan dari forum formal. Petani, nelayan, atau warga pedesaan yang sebelumnya sulit mengakses Bupati secara langsung kini dapat menyampaikan aspirasinya melalui kolom komentar. Dalam perspektif "*popular public sphere*", fenomena ini menunjukkan potensi inklusivitas media sosial, meskipun kualitas partisipasinya masih perlu ditingkatkan (Schellewald, 2025).

Media sosial memiliki potensi untuk dikuasai oleh aktor politik untuk membentuk agenda mereka sendiri (Ramlan dkk., 2025). Dalam konteks ini, penting untuk mencermati apakah interaksi di akun @riza_herdavid benar-benar mencerminkan aspirasi publik yang otonom, atau justru

merupakan bentuk manipulasi opini untuk kepentingan elektoral Bupati. Hal tersebut juga merupakan bagian dari hak warga negara dalam bersosial media di Indonesia. Ruang publik di Indonesia harus dipahami dalam kerangka demokrasi Pancasila yang memberikan kebebasan sekaligus batasan, dimana kebebasan berpendapat di media sosial harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial, termasuk menghormati hak orang lain dan menjaga harmoni sosial (Sutono & Noorzeha, 2025). Dari sisi tata kelola pemerintahan, temuan ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik (Hidayat, 2024), namun efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi yang masuk, bukan sekadar respon simbolis.

Dataset komentar dari akun TikTok milik Bupati Riza Herdavid juga dianalisis menggunakan lensa CMC untuk memahami pola interaksi. Data ini memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana seorang pejabat publik berinteraksi dengan warganya di ranah digital dan bagaimana warganet merespon. Dapat dilihat bahwa pola komunikasi dua arah yang sangat aktif, di mana Bupati tidak hanya menjadi konten kreator, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dan penanggap utama. Ini terlihat jelas dari banyaknya balasan dari akun @riza_herdavid terhadap komentar warganet. Dalam CMC, komunikator dapat menyampaikan pesan secara lebih terkontrol dan memberikan cukup waktu kepada pengirim dan penerima untuk mengedit komunikasi mereka (Muthia dkk., 2024). Dalam konteks akun @riza_herdavid, terlihat bahwa Bupati menggunakan waktu untuk merespons secara selektif, terutama pada komentar yang bersifat krusial seperti keluhan infrastruktur.

Sejumlah komentar yang bersifat aspiratif atau keluhan mendapatkan tanggapan langsung dari Bupati. Contohnya, komentar dari pengguna @netizen.bermata

yang mengeluhkan tarif parkir di RSUD Bangka Selatan langsung ditanggapi Bupati dengan menandai (*mention*) pejabat terkait seperti @Hefi Sekda Basel, @fenny_alfiati, dan @AGUS_DKPPKB_BASEL untuk segera mengecek regulasi. Respon ini menunjukkan model komunikasi vertikal yang dipersingkat melalui media sosial, di mana pemimpin dapat langsung berinteraksi dengan jajarannya di hadapan publik, menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Contoh lain adalah keluhan tentang jalan rusak di beberapa desa (komentar dari @yyyyyyyyyy308, @bass_err95, @galon.banyu.biru). Bupati secara konsisten merespons dengan menandai akun dinas terkait seperti @elfanr_DPUPR_DISPERKIM dan meminta mereka untuk mengecek skala prioritas. Pola ini menegaskan penggunaan media sosial sebagai alat untuk *problem-solving* dan monitoring kinerja aparatur daerah secara *real-time*.

Selain keluhan, banyak komentar yang bersifat mendukung, kagum, atau bercanda. Bupati juga aktif merespons ini dengan nada yang lebih santai dan personal. Komentar seperti "sehat selalu juga bapak" (dari @nopan.riyanto8) atau "Mantap kinggg" (dari @rhmt_erwinsyah_) sering kali dibalas dengan "Aamin. Terima kasih ya" atau sapaan hangat lain sebagai upaya membangun kedekatan emosional. Respons terhadap candaan seperti "pinjam seratus" juga dilakukan dengan nada bercanda, misalnya dengan balasan "Sudah ku duga" atau "Ada". Hal ini menunjukkan pemahaman terhadap budaya komunikasi digital yang cair dan humoris untuk menghilangkan jarak dengan konstituennya. Penggunaan bahasa gaul dan emotikon dalam interaksi virtual sendiri dapat mengekspresikan emosi dan perasaan pengguna (Zempi & Hermawan, 2024). Dalam konteks ini, Bupati juga menggunakan bahasa yang fleksibel, yang memperkuat ikatan emosional dengan warganet. Pola interaksi ini sejalan dengan konsep *synchronicity* dan *interactivity*,

di mana pertukaran pesan dapat dilakukan seketika dan interaksi yang terjadi bersifat dua arah. Media sosial yang terbuka dan interaktif, menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri dalam berbagai cara, termasuk melalui dukungan, humor, dan kritik (Zempi & Hermawan, 2024).

Analisis sentimen terhadap komentar menunjukkan keragaman yang luas, mencerminkan dinamika masyarakat di dunia maya. Sentimen positif ditunjukkan oleh mayoritas komentar yang bersifat positif, mulai dari dukungan ("mantap pak"), doa ("sehat selalu pak"), kekaguman ("ganteng banget pakbup ku"), hingga humor ("pinjem dulu pak 100"). Dominasi sentimen positif ini mengindikasikan tingginya tingkat kepuasan dan afeksi publik terhadap kinerja dan kepribadian Bupati. Selain itu, banyak komentar yang berisi aspirasi pembangunan, seperti permintaan perbaikan jalan, bantuan UMKM, hingga pengaduan pelayanan publik (parkir rumah sakit). Kritik yang muncul cenderung disampaikan secara santun dan membangun, yang kemudian direspons dengan serius oleh Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang publik yang efektif untuk menyampaikan aspirasi.

Dataset juga menunjukkan banyak komentar dari warganet di luar Bangka Selatan, seperti dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Papua. Mereka mengaku "ikut senang" atau "terhibur" dengan konten Bupati. Ini memperluas dampak komunikasi digital tidak hanya pada konstituen langsung, tetapi juga pada publik nasional, membangun reputasi personal di luar batas-batas geografis. Hal ini sejalan dengan konsep *aspatial*, di mana komunikasi virtual memungkinkan interaksi tanpa batasan geografis (Zempi & Hermawan, 2024).

Terdapat dua istilah penting dalam bahasa virtual, yaitu *netlingo* dan *netspeak*. *Netlingo* mengacu pada istilah khusus, singkatan, akronim, dan jargon yang digunakan di dunia virtual, seperti "LOL"

(*laughing out loud*) yang cenderung digunakan untuk mengekspresikan sarkasme. *Netspeak* mengacu pada gaya atau cara berbicara yang khas dalam komunikasi online, yang melibatkan bahasa informal, tulisan kreatif, dan adaptasi dari bentuk lisan ke tulisan (Zempi & Hermawan, 2024). Dalam dataset komentar akun @riza_herdavid, penggunaan *netlingo* dan *netspeak* juga teridentifikasi. Misalnya, penggunaan kata "anjir" (slang dari "anjing") untuk mengekspresikan kekaguman, atau "bobo" untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dianggap lamban.

Terdapat beberapa implikasi penting dari praktik komunikasi digital yang dilakukan oleh Bupati Riza Herdavid. Transparansi dan responsivitas yang ditunjukkan melalui interaksi di media sosial dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Tagging langsung kepada pejabat terkait dalam kolom komentar juga membuat proses advokasi masalah menjadi lebih singkat dan terarah. Selain itu, gaya komunikasi yang autentik, humoris, dan humanis membantu membangun *personal branding* yang kuat dan positif, yang dapat menjadi modal politik yang signifikan. Terakhir, platform TikTok yang biasanya dianggap sebagai media hiburan, berhasil dialihfungsikan menjadi ruang publik untuk diskusi, aspirasi, dan pengawasan sosial.

Secara keseluruhan, analisis terhadap dataset ini menunjukkan bahwa akun TikTok @riza_herdavid bukan sekadar alat untuk menyebarkan informasi, tetapi telah menjadi sebuah ruang interaktif yang dinamis. Melalui strategi komunikasi yang memanfaatkan karakteristik CMC dan membangun hubungan parasosial yang kuat, Bupati berhasil menciptakan sebuah model *digital governance* yang lebih dekat, responsif, dan manusiawi di mata warganya.

E. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial, khususnya TikTok, telah berkembang menjadi salah satu medium komunikasi pemerintahan yang penting dalam konteks demokrasi digital di tingkat lokal. Akun TikTok milik Bupati Bangka Selatan, @riza_herdavid, tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi kegiatan pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Strategi komunikasi yang digunakan relatif adaptif terhadap karakteristik platform, dengan memadukan konten formal pemerintahan dan konten yang mengikuti tren budaya populer. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan visibilitas serta menarik perhatian publik, sekaligus membangun kedekatan simbolik antara kepala daerah dan warganet.

Dari total komentar yang dianalisis, sebagian besar mengandung unsur partisipatif seperti keluhan layanan publik, permohonan bantuan, pertanyaan informasi, serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Bentuk partisipasi yang paling dominan adalah keluhan terkait infrastruktur dan layanan publik, yang menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai kanal pengaduan dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah.

Meski demikian, kualitas partisipasi yang muncul masih cenderung bersifat reaktif dan pragmatis. Interaksi yang terjadi lebih banyak didorong oleh kebutuhan praktis warga untuk menyampaikan keluhan atau permohonan bantuan, dibandingkan dengan diskusi kebijakan yang deliberatif. Tingkat responsivitas akun Bupati yang mencapai sekitar 18,6 persen menunjukkan adanya upaya untuk membangun komunikasi dua arah, namun masih terbatas jika dibandingkan dengan volume komentar yang masuk. Dalam perspektif tangga partisipasi Arnstein, pola interaksi ini dapat dikategorikan berada pada tahap konsultasi,

di mana masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat tetapi belum sepenuhnya memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.

Penggunaan fitur *mention* kepada perangkat daerah memperlihatkan adanya mekanisme koordinasi birokrasi yang berlangsung secara terbuka di media sosial. Praktik ini menunjukkan potensi media sosial sebagai instrumen komunikasi pemerintahan yang mampu mempercepat respons terhadap persoalan publik. Namun demikian, efektivitas mekanisme tersebut masih sulit diukur karena tidak terdapat sistem umpan balik yang memastikan apakah aspirasi yang disampaikan benar-benar ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Dari perspektif teori ruang publik digital, akun TikTok @riza_herdavid dapat dipahami sebagai bentuk ruang publik populer yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Akan tetapi, karakteristik platform TikTok yang berbasis algoritma dan budaya viral juga membentuk pola partisipasi yang spontan, emosional, dan tidak selalu berorientasi pada deliberasi rasional. Dengan demikian, ruang publik digital yang terbentuk memiliki sifat ambivalen: di satu sisi membuka akses partisipasi yang lebih luas, tetapi di sisi lain masih menghadapi keterbatasan dalam menghasilkan dialog kebijakan yang mendalam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai instrumen komunikasi publik dan partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan daerah. Namun, agar potensi tersebut dapat berkontribusi secara lebih signifikan terhadap demokrasi partisipatif, diperlukan mekanisme yang mampu menjembatani interaksi digital dengan proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut kebijakan secara nyata.

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan komunikasi pemerintahan berbasis media sosial. Pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme pengelolaan aspirasi digital yang lebih terstruktur. Komentar atau pengaduan yang disampaikan melalui media sosial sebaiknya tidak hanya dijawab secara simbolik, tetapi juga diintegrasikan dengan sistem pengaduan resmi pemerintah daerah sehingga dapat dipantau proses tindak lanjutnya. Selain itu, perlu dibentuk tim pengelola komunikasi digital yang melibatkan unsur humas pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Tim ini dapat berperan dalam memantau percakapan publik di media sosial, melakukan klasifikasi aspirasi warga, serta memastikan koordinasi yang lebih cepat dengan instansi teknis yang berwenang. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan media sosial tidak hanya sebagai kanal pengaduan, tetapi juga sebagai ruang edukasi kebijakan dan dialog publik yang lebih substantif. Misalnya dengan menyajikan konten yang menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah, mekanisme penganggaran, atau alasan di balik suatu kebijakan, sehingga masyarakat tidak hanya menyampaikan keluhan tetapi juga memahami konteks pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

- Akbar, T. H., & Avisena, M. I. R. (2026). Analisis Komunikasi Politik Pemerintah dalam Program Literasi Demokrasi melalui Instagram @literasidemokrasi.id. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 6(1), 783–794. <https://doi.org/10.54082/jupin.2061>
- Andriastuti, K. T. P., & Dewi, I. G. A. A. Y. (2025). Leadership Through Social Media: Local Government Strategies for Innovation, Transparency, and Public Participation (A Study in Denpasar City, Bali). *Iapa Proceedings Conference*, 227–235.

- <https://doi.org/10.30589/proceedings.2025.1327>
- Angga, S., Poa, A. A., & Rikardus, F. (2023). Etika Komunikasi Netizen Indonesia Di Media Sosial Sebagai Ruang Demokrasi dalam Telaah Ruang Publik J urgen Habermas. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 384–393. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.59229>
- Ardiansyah, R. D. (2024). *Strategi Komunikasi Humas Setda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Melalui Penggunaan Media Instagram @Humasjateng Dalam Publikasi Kinerja Pimpinan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah* [Skripsi]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Eriyanto. (2021). *Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial* (Pertama). PT. Remaja Rosdakarya.
- Fahrudin, R., Firmansyah, F., & Sinambela, L. (2025). Analisis Peran Media dalam Proses Pembentukan Perspektif Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 4933–4939.
- Fitriani, D., Budiyan, Y., Hardika, A. R., & Choerunissa, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi di Indonesia: Analisis Peran Teknologi dan Media Sosial. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 362–371. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.43>
- Hening, B. T. R., & Paramita, E. P. (2025). Pemanfaatan Media Digital Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. *KAGANGA KOMUNIKA: Journal of Communication Science*, 7(1), 166–175. <https://doi.org/10.36761/kagangakomunika.v7i1.5688>
- Hermanto, B. (2023). Dinamika Partisipasi Publik Dalam Mewujudkan Legislasi Yang Partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 205–231. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.668>
- Hidayat, E. W. (2024). Transformasi Digital Partisipasi Publik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(2), 221–232.
- Indrawan, J., Efriza, & Ilmar, A. (2020). Kehadiran Media Baru (New Media) Dalam Proses Komunikasi Politik. *Medium*, 8(1), 1–17. [https://doi.org/10.25299/medium.2020.vol8\(1\).4820](https://doi.org/10.25299/medium.2020.vol8(1).4820)
- Kandias, M. R. N., & Karniawati, N. (2024). Fenomena Partisipasi Masyarakat Kota Bandung dalam Pemilihan Presiden 2024 Melalui Media Tiktok. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 24–33. <https://doi.org/10.36355/jppd.v6i1.140>
- Kemp, S. (2025, November 5). *Digital 2026: Indonesia*. DataReportal – Global Digital Insights. <https://datareportal.com/reports/digital-2026-indonesia>
- Kharitonova, K. S., Zhukova, M. A., Markov, I. V., Razo, M. B., Le, K., Ayaz, S., Ogbomo, J., Garcia, J. L., Kilani, H., & Grigorenko, E. L. (2024). The Role of Parasocial Relationships in Digital Learning: An Exploratory Case Study. *Modelling and Data Analysis*, 14(1), 67–88. <https://doi.org/10.17759/mda.2024140105>
- Muthia, C., Suhendi, H., & Wahyudi, I. (2024). Computer Mediated Communication Pada Content Creator Mageriin.id Dalam Menyampaikan Dakwah Pada Aplikasi Tiktok. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 5(1), 171–184. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.971>

- Muttaqien, M. E., & Ramdan, D. (2023). Konsep Komunikasi J urgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 51–64.
- Nabila, A. (2022). Strategi Cyber Public Relations Basarnas Jakarta (Studi Kasus pada Banjir Jabodetabek Bulan Januari dan Februari 2020). *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V7I3.6548>
- Nelly, S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *JURNAL SOCIOPOLITICO*, 6(1), 86–94. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v6i1.119>
- Ramlan, A. F., Mustofa, M., Suhaini, Z., Azizi, N., Norizam, W., & Solihah, R. (2025). Meninjau Kembali Ruang Publik: Tinjauan Literatur Tentang Media Sosial Dan Pembentukan Agenda Politik Melalui Lensa Habermas. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 9, 201–210. <https://doi.org/10.24198/jsg.v9i2.62982>
- Rifqi, M., & Gilang Gusti Aji, S. I. P. (2023). Partisipasi Publik di Media Sosial (Analisis Isi pada Kolom Komentar Laman Facebook E100SS Dalam Isu Transportasi Publik). *The Commmercium*, 7(3), 25–33. <https://doi.org/10.26740/tc.v7i3.56594>
- Rustanta, A., Putranto, S. D., & Huang, P. (2025). Maintaining the Digital Public Space: Communication Ethics and Regulatory Challenges in the TikTok Era. *Jurnal Komunikasi*, 17(1), 63–83. <https://doi.org/10.24912/jk.v17i1.32927>
- Saidaturrahmah, S., & Kholil, S. (2023). Dinamika Ruang Publik dan Demokrasi di Era New Media. *Ameena Journal*, 1(4), 350–358. <https://doi.org/10.63732/aij.v1i4.39>
- Schellewald, A. (2025). Changing modes of public connection: An essay on TikTok and the social affordances of personalized social media. *Frontiers in Computer Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2025.1655767>
- Setiawan, F. R. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas. *MELINTAS An International Journal of Philosophy and Religion (MIJPR)*, 39(3), 323–350. <https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7826>
- Sutono, A., & Noorzeha, F. (2025). Hak Warga Negara dalam Bersosial Media: Meninjau Kembali Penjabaran Nomokrasi dan Demokrasi di Indonesia. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 189–200. <https://doi.org/10.36456/p.v5i2.10665>
- Triana, M. (t.t.). *Media Massa dan Public Sphere*.
- Varela, M. C., Polo, F. J. F., & Martínez, I. M. P. (2025). Computer-mediated communication (CMC) and social media corpora. *Research in Corpus Linguistics*, 13(1), i–viii. <https://doi.org/10.32714/ricl.13.01.01>
- Wijaya, A. (2025). Public Sphere Vs Hoax Sphere: Menghadirkan Habermas di Tengah Fenomena Hoaks Politik. *Proceeding of The 5th ASPIKOM International Communication Conference (AICCON 2025)*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.31947/aiccon2025.v1i1.47695>
- Zakiah, Z., Agnia, R., Handayani, H. S., Davika, Z., Ramdani, A., & Syafiq, M. Z. S. M. Z. (2024). Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.807>

Zempi, C. N., & Hermawan, A. (2024). Virtual Communication Culture On Tiktok Social Media (A Netnographic Study Of Clean Beach Waste Content At Loji Beach On Tiktok @Pandawaragroup). *Proceeding Of International Conference on Communication and Media Digital*, 1(1), 316–327.



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JL. PULAU BANGKA, AIR ITAM - PANGKALPINANG 33149
EMAIL: PENGEMBANGANSDM@BABELPROV.GO.ID
WEBSITE: BKPSDMD.BABELPROV.GO.ID

P-ISSN: 2303-0496
E-ISSN: 2809-7963

